

**PROGRAM KERJA
BADAN PENGARAH PAPUA
PERWAKILAN PROVINSI PAPUA BARAT DAYA**



PERIODE TAHUN 2026

*“Percepatan Pembangunan dan Otonomi Khusus Papua
Dalam Rangka Mewujudkan Papua Mandiri, Adil, dan Sejahtera”*



TIM PENYUSUN

Drs. Otto Ihalauw, MA	: Pengarah
drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, Sp.PM., MPH.	: Anggota Kelompok Kerja Papua Sehat
Helena Trivona Tuririday, M.Si.	: Anggota Kelompok Kerja Papua Cerdas
Herman Wafom Tubur, SP., M.Si.	: Anggota Kelompok Kerja Papua Produktif
Dea Anggie Varena, S.Kom.	: Staf/PPNPN Sekretariat BPP Provinsi Papua Barat Daya

DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Latar Belakang	4
1.2 Landasan Penyusunan Program Kerja	4
1.3 Maksud & Tujuan	5
1.3.1 Maksud	5
1.3.2 Tujuan	5
BAB II ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM KERJA TAHUN 2026	6
2.1 Arah Kebijakan	6
2.2 Program Kerja Tahun 2026	6
2.2.1 Papua Sehat	7
2.2.2 Papua Cerdas	9
2.2.3 Papua Produktif	11
2.2.4 Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) – Damai	14
2.2.5 Program Kerja Strategis Bersama (Kolaborasi Misi)	16
2.3 Identifikasi Hambatan Pelaksanaan Tusi SHEK serta Program Kerja Tahun 2026	17
BAB III PENUTUP	19

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 disusun sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) pada Tahun 2025, serta sebagai bagian dari penguatan pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Tahun 2026 memiliki posisi strategis sebagai periode awal penguatan implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029, yang merupakan penjabaran operasional dari Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041. Dalam konteks tersebut, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya berperan penting dalam memastikan agar arah kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan pusat dan daerah berjalan selaras, terintegrasi, dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat Papua Barat Daya.

Berdasarkan evaluasi capaian kinerja Tahun 2025, percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan kemajuan bertahap pada misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, serta penguatan tata kelola pemerintahan. Namun demikian, masih terdapat tantangan berupa kesenjangan capaian antarwilayah, keterbatasan kapasitas kelembagaan, dinamika sosial-keamanan, serta keterbatasan dukungan pendanaan yang memerlukan penajaman prioritas dan penguatan koordinasi lintas sektor.

Oleh karena itu, Program Kerja Tahun 2026 diarahkan untuk memperkuat kualitas dan dampak pelaksanaan SHEK melalui penajaman fokus program, pendekatan berbasis masalah dan wilayah prioritas, serta penguatan peran Badan Pengarah Papua sebagai penghubung kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

1.2 Landasan Penyusunan Program Kerja

Penyusunan Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen perencanaan pembangunan, antara lain:

1. Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041.
2. Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.
3. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029.
4. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Papua Barat Daya.
5. Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025.

1.3 Maksud & Tujuan

1.3.1 Maksud

Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

1.3.2 Tujuan

Program Kerja Tahun 2026 bertujuan untuk:

- 1) Mengarahkan fokus pelaksanaan SHEK agar lebih efektif, terukur, dan berdampak pada pencapaian sasaran RIPPP dan RAPPP.
- 2) Memperkuat sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- 3) Mendukung peningkatan kualitas tata kelola pembangunan dan koordinasi lintas sektor.
- 4) Menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun 2026.

BAB II

ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM KERJA TAHUN 2026

2.1 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 difokuskan pada penguatan kualitas dan dampak pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam rangka mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026 diarahkan untuk:

1. Menajamkan fokus intervensi kebijakan pada isu dan wilayah prioritas yang memiliki capaian indikator pembangunan relatif rendah.
2. Memperkuat peran Badan Pengarah Papua sebagai penghubung kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah guna memastikan konsistensi perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
3. Mendorong pendekatan berbasis masalah dan berbasis wilayah, dengan mengutamakan efektivitas, efisiensi, dan keberlanjutan kebijakan.
4. Mengoptimalkan kolaborasi lintas sektor sebagai instrumen utama dalam mendukung pencapaian sasaran RIPPP dan RAPPP.

2.2 Program Kerja Tahun 2026

Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 disusun sebagai instrumen operasional untuk melaksanakan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) secara lebih terarah, berdampak, dan berbasis kebutuhan wilayah. Program kerja ini dirumuskan dengan mengacu pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), serta hasil evaluasi pelaksanaan kinerja Tahun 2025.

Uraian program kerja Tahun 2026 dikelompokkan ke dalam lima klaster misi, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, Papua Polhukam/Damai, serta Program Kerja Strategis Bersama (kolaborasi lintas misi). Daftar kegiatan secara rinci tercantum dalam matriks program kerja yang disusun berdasarkan hasil identifikasi isu, kebutuhan daerah, serta usulan Pokja.

Catatan:

Uraian kebutuhan pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan akan disampaikan secara terpisah dalam bentuk proposal kegiatan, seiring dengan proses finalisasi rekrutmen Pokja Tahun 2026 yang berpotensi memengaruhi skema pelaksanaan dan pembiayaan program.

2.2.1 Papua Sehat

PAPUA SEHAT					
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	OPD/Objek	Estimasi Pelaksanaan	Komponen Pembiayaan
	Rapat	Forum SHEK			
1		PSC 119	Dinas Kesehatan, BPBD, RSUD, Puskesmas, Kominfo, Kepolisian, K/L	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
2		Kolaborasi Penanganan Stunting	Pemda, Bappeda, Keuangan, Dinas Kesehatan, Dinas Sosial	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
3		Penilaian Indikator UHH	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	April	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
4		Penanganan Kasus Infeksi Menular	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	Juni	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
5		Roadmap Layanan Kesehatan (Kolaborasi Prov-Kab/Kota)	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	Juli	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
6		Pembiayaan Kesehatan melalui BPJS	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	Agustus	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
7		Sistem Layanan Rujukan Terpadu	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	September	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
8		Penanganan ODGJ di PBD	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	Oktober	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
9		Kolaborasi Penanganan HIV-AIDS	Dinas Kesehatan, LSM, Tokoh Adat, Tokoh Agama	November	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
10		Rakor tentang RS Siloam	Gubernur, Wagub, Wakil Walkot, Siloam, Dinas Kesehatan	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
11		Rakor Beasiswa Bidang Kesehatan dengan Institut Ilmu Kesehatan Kediri	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Pihak PT	Januari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
	Perjadin Biasa	Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Sehat & Otsus			
12		Kabupaten Raja Ampat	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)

13		Kabupaten Tambrauw	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
14		Kabupaten Maybrat	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
15		Kabupaten Sorong Selatan	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
16		Kabupaten Sorong	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Uji Petik Layanan Dasar di wilayah 3T			
17		Kabupaten Raja Ampat : Lokus Misool dan Warsambin	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Maret	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
18		Kabupaten Sorong Selatan : Lokus Kokoda Utara dan Kais	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Juni	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
19		Kabupaten Tambrauw : Lokus Sausapor dan Kebar	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Mei	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
20		Kabupaten Maybrat : Lokus Marei dan Konja	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	April	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
21		Kabupaten Sorong : Lokus Sayosa dan Sekitar Makbon	Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
		Koordinasi dengan Kemenkes RI			
22		Jakarta : Topik Percepatan Pengadaan SDM	Kemenkes	Maret	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
23		Jakarta : Topik PSC 119 (Lanjutan)	Kemenkes	Mei	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
24		Jakarta : Percepatan Pembangunan RS Vertikal di PBD	Kemenkes	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
25		Jakarta : Sistem Distribusi Obat dan Logistik di PBD	Kemenkes	Agustus	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Sehat & Otsus			
26	Perjadin Dalkot	Kota Sorong	Dinas Kesehatan	Januari-April-Juli-Oktober (4x)	Perjadin (Transpor Lokal)
27		Provinsi Papua Barat Daya	Dinas Kesehatan	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (Transpor Lokal)

2.2.2 Papua Cerdas

PAPUA CERDAS					
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	OPD/Objek	Estimasi Pelaksanaan	Komponen Pembiayaan
	Rapat	Forum SHEK			
1		Pendidikan Vokasi	Pemda Prov/Kab/Kota, K/L	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
2		Persiapan Penerimaan Mahasiswa Baru AKNESS	Pemda Prov/Kab/Kota, K/L	Februari-September (1x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
3		PTS dan PT di PBD	PTS, PT, Pemda Prov, K/L, Dinas Pendidikan	Maret-November (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
4		Identifikasi Program Berbasis Evaluasi Raport Pendidikan dan Capaian/Target Pendidikan Menengah (SMP/SMA/K)	Dinas Pendidikan	Februari-Juli (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
5		Identifikasi Program Berbasis Evaluasi Raport Pendidikan dan Capaian/Target Pendidikan Usia Dini/PraSekolah (PAUD/TK/KB)	Dinas Pendidikan	Februari-Oktober (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
6		Identifikasi Program Berbasis Evaluasi Raport Pendidikan dan Capaian/Target Pendidikan Dasar	Dinas Pendidikan	Februari-September (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
7		Identifikasi Program Berbasis Evaluasi Raport Pendidikan dan Capaian/Target Pendidikan Luar Sekolah (PLS)	Dinas Pendidikan, K/L, PKK/DWP/GOW/DP2A	Februari-Agustus (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
8		Aspek Yuridis Optimalisasi Implementasi Permendikdasmen No 1 Tahun 2025 dalam Kerangka Percepatan Papua Cerdas di PBD	Dinas Pendidikan, PSW YPK/YPPK/YAPIS/ADVENT/K/L	Maret-Oktober (2x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
9		Evaluasi dan Identifikasi Peningkatan SPM Pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya	Dinas Pendidikan, BPMP PBD	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
10		Sinkronisasi Pengembangan Diri dan Kualitas Guru di Provinsi PBD	Dinas Pendidikan, BPMG PBD	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
11		Harmonisasi Program Percepatan RAPPP tahun 2025-2029	Dinas Pendidikan, Bappenas, Kemenkeu	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
12		Koordinasi dan Evaluasi Program SSH di Tanah Papua	UNIPA, Pemda Pelaksana, Pokja Cerdas BPP Seluruhnya	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
13		Rapat Koordinasi Revitalisasi Teknis Pelestarian dan Pelindungan Bahasa di Provinsi Papua Barat Daya	BPP, K/L, Dinas Pendidikan	Agustus	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
	Perjadin Biasa	Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Cerdas & Otsus			

14		Kabupaten Sorong Selatan	Dinas Pendidikan	Feb-Mar-Mei-Jul-Sept-Nov (6x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
15		Kabupaten Tambrau	Dinas Pendidikan	Feb-Apr-Jun-Sept-Okt (5x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
16		Kabupaten Raja Ampat	Dinas Pendidikan	Feb-Mar-Jul-Agt-Okt (5x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
17		Kabupaten Maybrat	Dinas Pendidikan	Feb-Apr-Jun-Sept-Des (5x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
18		Kabupaten Sorong	Dinas Pendidikan	Jan-Mar-Jul-Nov-Des (5x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Cerdas di wilayah 3T			
19		Kabupaten Sorong Selatan : Lokus Kokoda Utara	Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Juni	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
20		Kabupaten Maybrat : Lokus Aifat Timur Jauh Maybrat	Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Mei	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
21		Kabupaten Tambrau : Lokus Bikar	Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
22		Kabupaten Raja Ampat : Lokus Kofiau	Dinas Pendidikan, Tokoh Masyarakat, Tokoh Adat	Agustus	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta
		Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Cerdas & Otsus			
23	Perjadin Dalkot	Kota Sorong	Dinas Pendidikan	Jan-Mar-Jul-Nov-Des (5x)	Perjadin (Transpor Lokal)
24		Provinsi Papua Barat Daya	Dinas Pendidikan	Jan-Mar-Jul-Nov-Des (5x)	Perjadin (Transpor Lokal)

2.2.3 Papua Produktif

PAPUA PRODUKTIF					
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	OPD/Objek	Estimasi Pelaksanaan	Komponen Pembiayaan
	Rapat	Forum SHEK			
1		Data Terpilah OAP	BPS PBD, Dinas Dukcapil, Bappeda	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
2		Potensi dan Strategi Pengembangan Pariwisata di Sorong Selatan	Dispar Kab. Sorong Selatan, Bappeda, DPMPTSP	Februari-Maret (1x)	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
3		Pelaksanaan Bantuan Hibah	BPKAD PBD, Bappeda, OPD Teknis	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
4		Peranan Penyuluh Pertanian, Perkebunan, Perikanan, Peternakan di PBD	Dinas Pertanian, DKP, Penyuluh Lapangan	Maret-April	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
5		Pelaksanaan Bandara Internasional DEO Sorong	UPBU DEO Sorong, Dishub, Bappeda	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
6		Pelaksanaan KEK Sorong	Administrator KEK Sorong, DPMPTSP, Bappeda	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
7		Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKIM) Kota Sorong	Disperindag Kota Sorong, Dinas Koperasi	April	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
8		Audiensi dengan Asosiasi Pengusaha OAP (ASPAP) PBD	ASPAP, Dinas Koperasi, UMKM	April	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
9		FGD Sinkronisasi Peluang Kerja dan Peningkatan Daya Saing Tenaga Kerja Terdidik/Terlatih OAP	Disnaker, Bappeda, Dunia Usaha	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
10		Audiensi dengan Kelompok Usaha Komoditi Ekspor Kabupaten Tambrau	Disperindag Tambrau, Bea Cukai	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
11		Pertemuan dengan Forum Pencaker OAP di PBD	Disnaker, BLK, Lembaga Pelatihan	Juni	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
12		Rakor dengan Disnaker, Pertamina, dan LSTK PBD	Disnaker, Pertamina, LSTK	Juni	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
	Perjadin Biasa	Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Produktif & Otsus		Juli	
4		Kabupaten Raja Ampat	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
5		Kabupaten Tambrau	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
6		Kabupaten Maybrat	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)

7		Kabupaten Sorong Selatan	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
8		Kabupaten Sorong	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
9		Kunker di Kab Sorong Selatan (Moswaren) terkait Program Cetak Sawah Raya	Dinas Pertanian, Balai Pusat	Mei	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
10		Kunker di Kab Sorong (Lokus Budidaya Rumpun Laut)	DKP, Pokdakan	Juni	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
11		Kunker di Kab Sorong dan Sorong Selatan terkait Produk Unggulan Udang	DKP	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
12		Kunker di Kab Sorong dan Sorong Selatan terkait Usaha Agrobisnis Kelapa Sawit	Dinas Perkebunan, Perusahaan	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
13		Kunker di Kab Sorong terkait Program Transmigrasi Lokal (Monev)	Disnakertrans, Bappeda	Agustus	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Kunker terkait Koperasi Merah Putih		September	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
14		Kabupaten Raja Ampat	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
15		Kabupaten Tambora	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
16		Kabupaten Maybrat	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
17		Kabupaten Sorong Selatan	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
18		Kabupaten Sorong	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Kunker dalam rangka Evaluasi Program Pembangunan Papua Produktif & Otsus			
19		Kota Sorong	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	Januari-April-Juli-Oktober (4x)	Perjadin (Transpor Lokal)
20		Provinsi Papua Barat Daya	Bappeda, Disperindag, DPMPTSP	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (Transpor Lokal)
		Kunker terkait Koperasi Merah Putih			
21	Perjadin Dalkot	Kota Sorong	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (Transpor Lokal)
22		Provinsi Papua Barat Daya	Dinas Koperasi, Pengurus Koperasi	Apr-Juli (2x)	Perjadin (Transpor Lokal)
23		Kunker di Kota Sorong (Lokus Budidaya Rumpun Laut)	DKP	Juni	Perjadin (Transpor Lokal)
24		Kunker di BPVP Sorong (Monev)	BPVP	Juli	Perjadin (Transpor Lokal)

25		Kunker di Disnaker PBD (Monev Program Bantuan permodalan Bagi UMKM OAP)	Disnaker	Juli	Perjadin (Transpor Lokal)
26		Kunker di BPS Sorong (Sensus Ekonomi 2026)	BPS	Agustus	Perjadin (Transpor Lokal)
27		Kunker di Kota Sorong terkait Produk Unggulan Udang	DPMPTSP, Pelaku Usaha	Agustus	Perjadin (Transpor Lokal)
28		Kunker di Kota Sorong (Lokus Usaha Grup Swalayan) Paragon, Alfamart, dll	Perusahaan, DPMPTSP	September	Perjadin (Transpor Lokal)
29		Kunker di Kota Sorong (Lokus Usaha Mama" OAP Pasar Remu dan Pasar Rufe)	Disperindag, Pengelola Pasar	September	Perjadin (Transpor Lokal)
30		Kunker di Bappenda PBD	Bappenda	Oktober	Perjadin (Transpor Lokal)
31		Kunker di Dinas ESDM PBD (Pertambangan)	Dinas ESDM	Oktober	Perjadin (Transpor Lokal)
32		Kunker di Dinas DLHK PBD (Perhutanan)	Dinas DLHK	November	Perjadin (Transpor Lokal)
33		Kunker di BRI Cabang Sorong (Monev Program KUR)	BRI Cabang Sorong	November	Perjadin (Transpor Lokal)
34		Kunker di Dinas Perindakop PBD (Impor-Ekspor)	Disperindagkop	November	Perjadin (Transpor Lokal)
		Podcast			
35	Podcast	Rancangan Penyelenggaraan Ketenagakerjaan di PBD	Disnaker, Dunia Usaha	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber, Publikasi Media
36		Potensi Wisata di PBD	Dispar, Pelaku Wisata	Juni	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber, Publikasi Media
37		Kiat-Kiat Menjadi Petani Unggulan	Dinas Pertanian, Praktisi	Oktober	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber, Publikasi Media

2.2.4 Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) – Damai

PAPUA POLHUKAM/DAMAI					
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	OPD/Objek	Estimasi Pelaksanaan	Komponen Pembiayaan
	Rapat	Forum SHEK			
1		Bersama Forum Keagamaan (FKUB PBD)	Pimpinan Lintas Agama	Januari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
2		Bersama Ormas (OKP Cipayung Plus)	Ormas (KNPI, dst)	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
3		Bersama Kesbangpol	Kesbangpol	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
4		Bersama Polda, Korem 181, dan Forum Lintas Suku PBD	Polda, Korem, Forum Lintas Suku	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
5		Terkait Penyelesaian Konflik Tapal Batas Sorong Selatan-Sorong	MRP, Gub, Kemendagri, Pemda (Sorsel-Sorong)	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
6		Terkait Penyelesaian Konflik Tapal Batas Tambrauw-Manokwari	MRP, Gub, Kemendagri, Pemda (Tambrauw-Mkw)	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
7		Terkait Legalitas Perkampungan OAP (Kota/Kab. Sorong)	Kesbangpol, LMA, MRP, Pertanahan, Pemda	Oktober	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
8		Bersama Pimpinan Partai Politik PBD	Pimpinan Parpol, KPU	Oktober	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
9		Sosialisasi Bahaya Gadget (Media Sosial) Bagi Anak	Pegiat Medsos, DP3A, Komnas Anak	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
10		Sosialisasi Nilai-Nilai Pancasila	BPPI RI, DPD RI, LMA	April	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
11		Rakor terkait Perdasus Kriteria OAP	DPRP, MRP, Forum Lintas Suku, Capil PBD	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
12		Rakor terkait Konflik 3 Pulau Raja Ampat	MRP, Gubernur, Biro Hukum, Forum Lintas Suku, dll	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
13		Rakor terkait Penyelesaian Konflik Maybrat	Keuskupan KMS, Klasis Aifat, Pemda Maybrat, TNI/Polri, MRP	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
14		Rakor terkait Pemetaan Tanah Adat	MRP, Kesbangpol, DPRP/K, NGO, MA	Maret	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
15		Rakor Keabsahan LMA Se-PBD	MRP, Kesbangpol, LMA	Oktober	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
16		FGD Kamtibmas Kota/Kab. Sorong	Polda, Korem, MRP, Forum Lintas Suku	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber

17		FGD Perlindungan HAM dan HAK OAP	Pegiat HAM	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
18		FGD Kesetaraan Gender	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
19		FGD Anak Jalanan	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinsos, MRP	Mei	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
20		FGD Keterbukaan Informasi Publik	PWI, AJI	Juni	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
21		FGD Kamtibmas PBD	Polda, Korem, MRP, LMA, Lintas Suku, Pemda	Desember	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
	Perjadin Biasa	Kunker dalam rangka Evaluasi Tingkat Kejahatan & Tingkat Risiko Terkena Kejahatan, Hibah Ormas dst (Program Papua Polhukam/Damai) & Otsus			
22		Kabupaten Raja Ampat	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
23		Kabupaten Tambrauw	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
24		Kabupaten Maybrat	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
25		Kabupaten Sorong Selatan	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
26		Kabupaten Sorong	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
		Kunker Keabsahan LMA			
27		Kabupaten Raja Ampat	Kesbangpol, LMA, MRP	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
28		Kabupaten Tambrauw	Kesbangpol, LMA, MRP	Juli	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
29		Kabupaten Maybrat	Kesbangpol, LMA, MRP	Agustus	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
30		Kabupaten Sorong Selatan	Kesbangpol, LMA, MRP	Agustus	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
31		Kabupaten Sorong	Kesbangpol, LMA, MRP	September	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
	Perjadin Dalkot	Kunker dalam rangka Evaluasi Tingkat Kejahatan & Tingkat Risiko Terkena Kejahatan, Hibah Ormas dst (Program Papua Polhukam/Damai) & Otsus			
32		Kota Sorong	Kesbangpol, LMA, Polres	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
33		Provinsi Papua Barat Daya	Kesbangpol, LMA, Polda	April-Juli-Oktober (3x)	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)

		Kunker Keabsahan LMA			
34		Kota Sorong	Kesbangpol, LMA, MRP	September	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
35		Provinsi Papua Barat Daya	Kesbangpol, LMA, MRP	September	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor)
36	Podcast	Terkait Kamtibmas PBD	Polda, Korem, RRI	November	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber, Publikasi Media

2.2.5 Program Kerja Strategis Bersama (Kolaborasi Misi)

PROKER STRATEGIS BERSAMA					
NO	JENIS KEGIATAN	NAMA KEGIATAN	OPD/Objek	Estimasi Pelaksanaan	Komponen Pembiayaan
		Forum SHEK			
1	Rapat	Terkait Sosial Budaya Suku Imekko dan Persiapan DOB Imekko	Kepala Suku/Tokoh Adat Imekko, DPRK Otsus, MRP, Tim Ahli	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
2		Terkait Revitalisasi Pendidikan dan Pelatihan Vokasi	Tim TKDV PBD, DPRK Otsus	Januari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
3		Terkait Pelaksanaan Otonomi Khusus	MRP, DPRP Otsus, LMA	Februari	Konsumsi Peserta, Spanduk, Honorarium Narasumber
4	Perjadin Biasa	Kunker dalam rangka Monev Warga OAP Imekko (Eks Warga Bandara DEO di Kampung Maibo)	Pemkab Sorong Selatan, DPRP, MRP, LMA	Januari	Perjadin (UH, Akomodasi, Transpor), Konsumsi Peserta

2.3 Identifikasi Hambatan Pelaksanaan Tusi SHEK serta Program Kerja Tahun 2026

Pelaksanaan tugas dan fungsi **sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)** Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya pada Tahun 2026 dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendukung maupun hambatan yang perlu menjadi perhatian dalam perencanaan dan pengambilan kebijakan ke depan.

Salah satu hambatan utama yang perlu dicermati adalah **keterbatasan dukungan pembiayaan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua, khususnya dalam pelaksanaan pendampingan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pemerintah daerah**. Sebagai lembaga pengarah yang memiliki mandat untuk **mengkoordinasi pelaksanaan embinaan, pengawasan, serta evaluasi kebijakan dan program Otonomi Khusus, posisi Badan Pengarah Papua harus dijaga tetap independen, objektif, dan berwibawa**.

Dalam konteks tersebut, **ketergantungan pembiayaan kegiatan Badan Pengarah Papua kepada pemerintah daerah** berpotensi menimbulkan tantangan kelembagaan, baik dari sisi independensi pelaksanaan tugas maupun dari sisi efektivitas fungsi pengarah. Kondisi tersebut dapat memengaruhi relasi kelembagaan antara Badan Pengarah Papua dan pemerintah daerah, serta berpotensi mengurangi daya dorong dan posisi strategis Badan Pengarah Papua dalam menjalankan fungsi SHEK secara optimal.

Oleh karena itu, **keterbatasan alokasi anggaran yang belum sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026** menjadi salah satu hambatan yang perlu mendapatkan perhatian serius. **Kebutuhan pembiayaan yang memadai** sangat diperlukan untuk mendukung pelaksanaan fungsi SHEK secara konsisten, menjangkau wilayah prioritas, serta memastikan keberlanjutan pendampingan kebijakan kepada pemerintah daerah **tanpa membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)**.

Selain aspek pembiayaan, **dinamika kelembagaan berupa proses rekrutmen dan penetapan Pokja Badan Pengarah Papua yang masih berlangsung** juga berpengaruh terhadap perencanaan detail pelaksanaan program dan kebutuhan anggaran. Kondisi ini menuntut adanya **fleksibilitas dalam perencanaan program kerja serta penyesuaian skema pembiayaan** agar tetap selaras dengan mandat dan kapasitas kelembagaan yang tersedia.

Sehubungan dengan hal tersebut, **Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura maupun Manokwari diharapkan dapat mempertimbangkan alokasi anggaran Tahun 2026 secara proporsional dan berkelanjutan**, setidaknya dengan mengacu pada pola dan besaran anggaran yang telah digunakan pada tahun-tahun sebelumnya, **agar Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026** dapat dilaksanakan secara optimal, independen, dan sesuai dengan mandat kelembagaan.

Penguatan dukungan anggaran yang memadai akan menjadi prasyarat penting dalam menjaga **marwah kelembagaan Badan Pengarah Papua**, memperkuat posisi pengarah terhadap pemerintah daerah, serta memastikan bahwa **pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua berjalan secara efektif, objektif, dan berkelanjutan**.

BAB III

PENUTUP

Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 disusun sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya. Program kerja ini merupakan tindak lanjut atas hasil evaluasi kinerja Tahun 2025 serta bagian dari penguatan implementasi Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029.

Melalui Program Kerja Tahun 2026, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya berkomitmen untuk memperkuat kualitas pelaksanaan SHEK dengan pendekatan yang lebih terarah, berbasis masalah dan wilayah prioritas, serta kolaboratif lintas sektor. Fokus program diarahkan pada penguatan misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, serta program strategis bersama yang mendukung penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan daerah.

Keberhasilan pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026 sangat bergantung pada dukungan dan sinergi seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun mitra strategis lainnya. Dalam konteks tersebut, dukungan pembiayaan yang memadai dan berkelanjutan menjadi prasyarat penting untuk menjaga independensi, efektivitas, dan kewibawaan Badan Pengarah Papua dalam menjalankan fungsi pembinaan, pengawasan, monitoring, dan evaluasi terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua.

Dengan mempertimbangkan keterbatasan alokasi anggaran dan dinamika kelembagaan yang ada, pelaksanaan Program Kerja Tahun 2026 akan mengedepankan prinsip efisiensi, penajaman prioritas, serta optimalisasi kolaborasi lintas sektor. Uraian kebutuhan pembiayaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masing-masing kegiatan akan disampaikan secara terpisah sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Akhirnya, diharapkan Program Kerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026 dapat menjadi instrumen yang adaptif, realistis, dan berdaya guna dalam memperkuat pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus Papua, serta berkontribusi nyata dalam mewujudkan Papua Barat Daya yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Laporan Bulanan

Badan Pengarah Papua

DESEMBER 2025

Laporan Operasional & Kegiatan

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua

Provinsi Papua Ba



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkat, rahmat dan hidayah-Nya sehingga, penyusunan Laporan Bulanan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini merupakan laporan operasional dan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Desember 2025. Laporan ini disusun untuk memberikan gambaran mengenai perkembangan, realisasi dan kinerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.

Demikian, semoga laporan ini dapat bermanfaat.

Sorong, 9 Januari 2026

Anggota BP3OKP

Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,



Drs. Otto Ihalaui, MA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
BAB I PENDAHULUAN	4
1.1 Maksud & Tujuan	4
1.2 Ringkasan Kelembagaan	4
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan.....	4
1.2.2 Definisi	5
1.2.3 Struktur Kelembagaan.....	5
1.2.4 Tugas dan Fungsi.....	5
1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	6
1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya	7
BAB II KEGIATAN DAN CAPAIAN	8
2.1 Rekapitulasi Kegiatan	8
2.2 Capaian	65
BAB III PENUTUP	69

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Maksud & Tujuan

Laporan ini disusun dengan maksud untuk memberikan informasi terkait kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya serta sebagai laporan rutin yang dilaporkan kepada Wakil Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Eksekutif Badan Pengarah Papua (BPP), Kepala Sekretariat BPP Provinsi Jayapura (selaku koordinator Sekretariat BPP), serta Kepala Sekretariat BPP Sorong (KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya).

Tujuan dari disusunnya laporan ini antara lain :

- 1) Sebagai sarana pemantauan pelaksanaan kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya periode bulan Desember 2025.
- 2) Sebagai laporan pertanggungjawaban kegiatan BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya pada bulan Desember 2025.
- 3) Sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan dan/ atau program kerja, penyelenggaraan dan evaluasi kerja BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya untuk bulan yang akan datang.
- 4) Sebagai laporan operasional Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

1.2 Ringkasan Kelembagaan

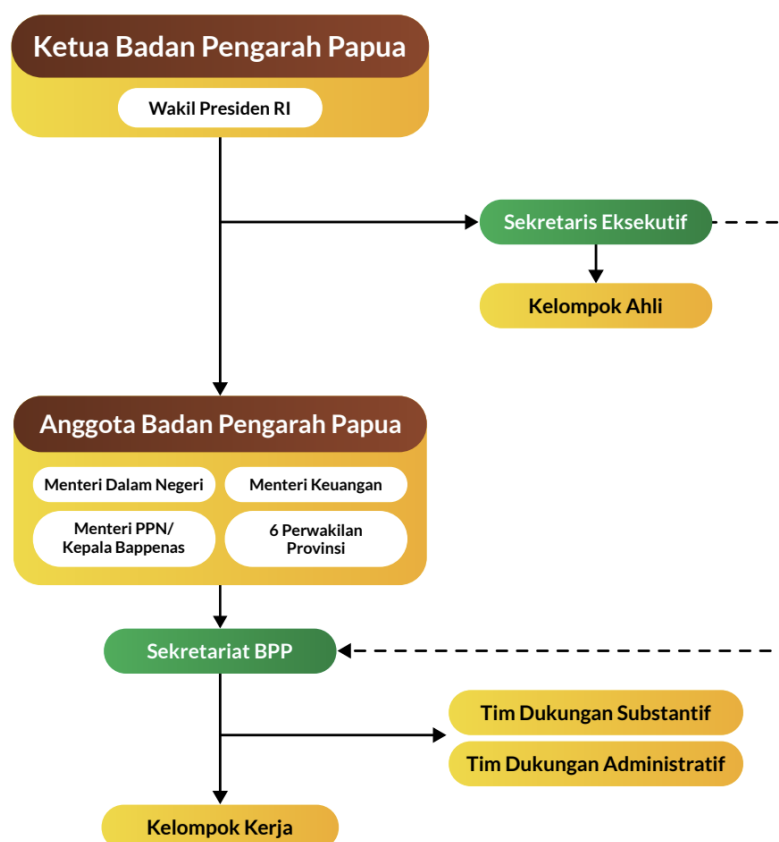
1.2.1 Landasan/Dasar Aturan

- 1) Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 2) Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.
- 3) Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua.
- 4) Keputusan Ketua Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penetapan Anggota Kelompok Kerja Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua.

1.2.2 Definisi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 1 : Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua yang selanjutnya disebut Badan Pengarah Papua adalah badan khusus yang melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua.
- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 2 : Badan Pengarah Papua merupakan lembaga nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden.

1.2.3 Struktur Kelembagaan



1.2.4 Tugas dan Fungsi

- 1) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 3, Badan Pengarah Papua mempunyai tugas melaksanakan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di wilayah Papua sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Sesuai Perpres Nomor 121 Tahun 2022 Pasal 4, Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Badan Pengarah Papua menyelenggarakan fungsi :
- Pemberian arah kebijakan umum pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Sinkronisasi, harmonisasi, dan koordinasi serta pemberian arahan pembinaan, pengawasan, evaluasi, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pengelolaan perencanaan, penganggaran, pendanaan, penerimaan, dan penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan Provinsi Papua yang dilaksanakan oleh Kementerian/lembaga dan pemerintah daerah Provinsi Papua;
 - Pemberian pertimbangan, arahan, dan rekomendasi penyelesaian permasalahan dan isu strategis pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua;
 - Pengendalian penyelenggaraan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua untuk jangka menengah;
 - Penyampaian pelaporan pelaksanaan Otonomi Khusus dan percepatan pembangunan di wilayah Papua kepada Presiden; dan
 - Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Presiden.

1.2.5 Sumber Daya Manusia Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

Ringkasan jumlah sumber daya manusia yang ada di Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya antara lain :

No	Unit Kerja	Jumlah (Orang)
1	Pimpinan (Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya)	1
2	Kelompok Kerja	
	Papua Sehat	1
	Papua Cerdas	1
	Papua Produktif	1
	Papua Polhukam/Damai	1 (Nonaktif)
	Usulan Pokja yang Aktif Terlibat	4
3	KPPN Sorong sebagai Tim Dukungan Administratif	5
4	Staf PPNPN	3
Jumlah		13

1.2.6 Sarana & Prasarana Sekretariat BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya

No	Uraian	Jumlah (Unit/Set) / Keterangan
A	Bangunan	1 Unit (Milik GKN Sorong)
B	Ruangan	
	Front Office	1 Unit
	Ruang Rapat	1 Unit
	Ruang Kerja Pimpinan/Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Istirahat Pimpinan/ Anggota BP3OKP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya	1 Unit
	Ruang Dapur	1 Unit
	Ruang Kamar Mandi/Toilet	2 Unit
C	Peralatan dan Perlengkapan	
	Meja Kerja	10 Unit
	Kursi Kerja	10 Unit
	Meja Rapat	1 Unit
	Kursi Rapat	9 Unit
	Meja Tamu	1 Unit
	Kursi Tamu	3 Unit
	AC	5 Unit
	Printer	2 Unit
	Laptop	7 Unit
	Sofa Tamu	1 Set
	Smart TV	3 Unit
	Meja dan Kursi Makan	1 Set
	Kulkas	1 Unit
	Kompor Listrik	1 Unit
	Dispenser	2 Unit
	Mesin Kopi	1 Unit
	Jam Dinding	3 Unit
	Kitchen Set	1 Set
	CCTV	4 Unit
	Lemari Arsip	1 Unit
	Lemari Kamar	1 Unit
	Tempat Tidur	1 Unit
	Rak Piring Kecil	2 Unit
	Starlink	1 Unit
	Hardisk	2 Unit
	Sound System, Mic Set	1 Set
	ATK (Stapler, Gunting, Penggaris, dll)	Tersedia
	Peralatan Makan (Piring, Sendok, dll)	Tersedia

BAB II

KEGIATAN DAN CAPAIAN

2.1 Rekapitulasi Kegiatan

Rekapitulasi kegiatan BPP Provinsi Papua Barat Daya pada bulan Desember tahun 2025, antara lain :

1) Kegiatan 1

Nama Kegiatan	Forum SHEK Misi Papua Sehat: Strategi Penanganan dan Penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 1 Desember 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1) Mengidentifikasi kondisi terkini penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya; 2) Mengharmoniskan arah kebijakan daerah dengan agenda Misi Papua Sehat dalam RIPPP 2022–2041; 3) Menyelaraskan peran pemerintah daerah, lembaga kesehatan, tokoh masyarakat, dan organisasi/LSM dalam upaya penanggulangan HIV/AIDS; 4) Meningkatkan koordinasi lintas sektor sebagai dasar percepatan intervensi prioritas di wilayah Papua Barat Daya. 5) Meningkatkan pemahaman peserta mengenai strategi penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS. 6) Merumuskan rekomendasi tindak lanjut untuk program penanganan HIV/AIDS di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Dinas Kesehatan Prov/Kab/Kota se-PBD; LMA/LSM; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	Penyakit infeksi masih memberikan kontribusi signifikan terhadap rendahnya usia harapan hidup di Provinsi Papua Barat Daya. Salah satu penyakit infeksi menular yang menjadi perhatian adalah HIV/AIDS, yang tidak hanya

	berdampak pada aspek kesehatan, tetapi juga menimbulkan dampak sosial bagi penderita dan keluarganya. Oleh karena itu, diperlukan pemutakhiran data untuk mengetahui situasi HIV/AIDS terkini, serta penguatan kolaborasi lintas sektor dalam upaya penanganan dan penanggulangannya. Kesimpulan: 1. Diperlukan penguatan kolaborasi lintas sektor, termasuk unsur pemerintah dan kemasyarakatan, dalam penanganan HIV/AIDS. 2. Diperlukan penganggaran yang lebih terfokus dan tepat sasaran agar upaya penanganan HIV/AIDS dapat memberikan dampak yang optimal.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Akan dilakukan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan penanganan dan penanggulangan HIV/AIDS guna memastikan efektivitas program sesuai RIPPP dan/ atau RAPPP.
Dokumentasi	



2) Kegiatan 2

Nama Kegiatan	Sosialisasi Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi: Strategi Pembangunan Papua Cerdas dan Papua Produktif di Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin-Rabu, 1-3 Desember 2025 di Hotel Kyriad Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan kegiatan sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) dalam rangka penyampaian kebijakan negara terkait implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2023, serta Peraturan Menteri Koordinator PMK tentang Pembentukan Tim Revitalisasi Vokasi Daerah (TKVD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan Prov/Kab/Kota se-PBD; BPVP Sorong; Kemenko PMK; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Pemerintah daerah dan OPD teknis, khususnya Dinas Ketenagakerjaan serta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, memahami kebijakan revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi serta mulai menyusun perencanaan sebagai bentuk optimalisasi implementasi Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2023.

	2. Terlaksananya persiapan revitalisasi Akademi Komunitas (AK) di Kabupaten Sorong Selatan serta kabupaten/kota lainnya di Provinsi Papua Barat Daya. 3. Tim Revitalisasi Vokasi Daerah (TKVD) Provinsi Papua Barat Daya telah terbentuk dan memiliki Surat Keputusan sejak tahun 2024, namun pelaksanaannya selama ini belum berjalan secara optimal.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Menyusun rencana SHEK dengan melibatkan: 1. Tim Revitalisasi Vokasi Daerah (TKVD) Provinsi Papua Barat Daya. 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya dalam rangka persiapan revitalisasi AK/AKNESS tahun 2026. 3. Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) terkait pelaksanaan program pelatihan vokasi tahun 2026 yang selaras dengan misi Papua Produktif.
Dokumentasi	 

3) Kegiatan 3

Nama Kegiatan	Diskusi Kelompok Terpumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Kamis, 2-4 Desember 2025 di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Diskusi Kelompok Terpumpun (FGD) Pra-Kongres Bahasa Daerah sebagai bagian dari rangkaian persiapan pelaksanaan Kongres Bahasa Daerah, serta berdiskusi mengenai isu, tantangan, dan arah kebijakan perlindungan bahasa daerah di Indonesia, khususnya di wilayah Tanah Papua.
Peserta Kegiatan	BPP (6 Anggota BPP); Balai Bahasa Pusat dan Provinsi Papua; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Terhimpunnya gambaran umum mengenai kondisi eksisting bahasa daerah, termasuk tantangan dalam upaya perlindungan, pelestarian, dan pengembangannya, khususnya di wilayah Tanah Papua. 2. Terjadinya pertukaran informasi dan pandangan antar peserta dari berbagai daerah terkait praktik, pendekatan, serta inisiatif perlindungan bahasa daerah. 3. Diperolehnya masukan awal sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan agenda dan kegiatan lanjutan terkait perlindungan bahasa daerah di Tanah Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut dari keikutsertaan dalam kegiatan ini, direncanakan pelaksanaan kegiatan pra-Rapat Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek) perlindungan bahasa daerah di Tanah Papua sebagai forum koordinasi dan pendalaman isu, dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait.

Dokumentasi



4) Kegiatan 4

Nama Kegiatan	Diseminasi dan Publikasi Hasil Kegiatan Sekolah Sepanjang Hari
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 2 Desember 2025 di Aula Setda Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan diseminasi dan publikasi hasil Program Sekolah Sepanjang Hari. Adapun tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah sebagai berikut: 1. Mensosialisasikan kebijakan dan konsep Program Sekolah Sepanjang Hari kepada satuan pendidikan. 2. Memberikan pemahaman mengenai pelaksanaan kegiatan pembelajaran dan nonpembelajaran dalam Program Sekolah Sepanjang Hari. 3. Meningkatkan kesiapan sekolah dan tenaga pendidik dalam mengimplementasikan Program Sekolah Sepanjang Hari.

	4. Mendorong dukungan dan partisipasi seluruh pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab. Maybrat; Dinas Pendidikan Kab. Maybrat; Peneima Manfaat SSH Kab. Maybrat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	1. Meningkatnya pemahaman peserta terhadap konsep dan tujuan Program Sekolah Sepanjang Hari. 2. Terbangunnya kesamaan persepsi antara pihak sekolah dan pemangku kepentingan terkait pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari. 3. Teridentifikasinya tantangan serta kebutuhan sekolah dalam implementasi Program Sekolah Sepanjang Hari. 4. Meningkatnya komitmen sekolah untuk mendukung pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari secara bertahap dan berkelanjutan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Melaksanakan pendampingan dan monitoring pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari pada sekolah-sekolah sasaran. 2. Menyusun pedoman teknis pelaksanaan yang lebih rinci sebagai acuan bagi sekolah. 3. Meningkatkan koordinasi antara pemerintah daerah, sekolah, dan orang tua/wali siswa. 4. Melakukan evaluasi secara berkala untuk menilai efektivitas dan dampak pelaksanaan Program Sekolah Sepanjang Hari.
Dokumentasi	-

5) Kegiatan 5

Nama Kegiatan	Kunjungan kerja dalam rangka Koordinasi terkait Data Terpilah OAP Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 3 Desember 2025 di Kantor Dinas Dukcapil Kabupaten Maybrat

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Rapat koordinasi ini bertujuan untuk meninjau perkembangan pendataan terpilah Orang Asli Papua (OAP) di Kabupaten Maybrat, mengevaluasi pelaksanaan serta mekanisme verifikasi data di lapangan, mengidentifikasi kendala teknis dan kelembagaan yang dihadapi, serta menghimpun masukan guna memperkuat pengelolaan dan pemanfaatan data OAP secara terintegrasi lintas OPD.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Dukcapil Kab. Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	1. Pendataan OAP di Kabupaten Maybrat telah menunjukkan progres yang signifikan dengan capaian sekitar $\pm 90\%$ dari total penduduk. 2. Mekanisme verifikasi berbasis tokoh lokal menjadi salah satu kekuatan utama dalam menjamin validitas data OAP. 3. Kendala yang masih dihadapi antara lain keterbatasan sumber daya manusia (SDM) operator, rendahnya tingkat perekaman KTP-el, serta belum optimalnya pelaporan data kematian. 4. Diperlukan penguatan kolaborasi lintas OPD agar data OAP dapat dimanfaatkan secara optimal dan tepat sasaran dalam perencanaan dan pelaksanaan program.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Mendorong dinas agar menyelesaikan pendataan OAP pada dua distrik yang tersisa sesuai dengan target waktu yang telah ditetapkan. 2. Mendorong peningkatan perekaman KTP-el melalui pelaksanaan layanan jemput bola. 3. Menyarankan/mendorong dinas agar menyusun Buku Profil Pendataan OAP Kabupaten Maybrat sebagai bahan dokumentasi dan perencanaan. 4. Mendorong sinkronisasi serta pemanfaatan data OAP secara lintas OPD.

	5. Mengusulkan dukungan sarana dan prasarana operasional pendataan kepada pemerintah daerah dan pemerintah provinsi.
Dokumentasi	-

6) Kegiatan 6

Nama Kegiatan	Kunjungan kerja dalam rangka Sinkronisasi-Koordinasi-Evaluasi pelaksanaan Program MBG dan SSH pada Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 3 Desember 2025 di Distrik Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menyelaraskan pemahaman dan pelaksanaan Program MBG dan SSH antara pemerintah daerah, distrik, sekolah, dan pemangku kepentingan terkait. 2. Melakukan koordinasi teknis terkait pelaksanaan MBG dan SSH di Distrik Aifat Timur Tengah. 3. Mengevaluasi capaian, kendala, dan praktik baik (best practices) dalam implementasi kedua program di tingkat lapangan. 4. Mengidentifikasi kebutuhan dukungan lanjutan, baik dari aspek kebijakan, anggaran, maupun teknis operasional.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab. Maybrat; Dinas Pendidikan Kab. Maybrat; Satgas MBG Kab. Maybrat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi, Koordinasi dan Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas dan Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya kesepahaman bersama antar pemangku kepentingan mengenai tujuan dan mekanisme pelaksanaan MBG dan SSH. 2. Teridentifikasinya kondisi riil pelaksanaan program di Distrik Aifat Timur Tengah, termasuk capaian dan kendala utama. 3. Tersusunnya daftar kebutuhan dan prioritas dukungan untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program.

	4. Meningkatnya komitmen sekolah, pemerintah distrik, dan masyarakat dalam mendukung keberlanjutan MBG dan SSH.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Penguatan koordinasi lintas OPD dan pemerintah distrik dalam pengelolaan MBG dan SSH. 2. Penyempurnaan mekanisme distribusi MBG dengan memanfaatkan potensi pangan lokal. 3. Peningkatan dukungan sarana prasarana dan tenaga pendukung untuk sekolah pelaksana SSH. 4. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi berkala berbasis indikator kinerja yang jelas.
Dokumentasi	-

7) Kegiatan 7

Nama Kegiatan	Talkshow Pokja Papua Sehat BPP Prov Papua Barat Daya dengan Kompas TV
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 3 Desember 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan fungsi Sosialisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua melalui pemanfaatan media massa sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat.
Peserta Kegiatan	Pokja Papua Sehat; Tim Kompas TV
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	Informasi terkait misi Papua Sehat dan peran Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya telah tersampaikan kepada masyarakat melalui media Kompas TV Sorong.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu dilakukan kegiatan diseminasi dan publikasi serupa secara rutin melalui media massa agar masyarakat semakin terpapar dan memahami misi Papua Sehat sesuai dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).



8) Kegiatan 8

Nama Kegiatan	FGD Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Investasi Berkeadilan untuk Mendukung Visi Pembangunan Papua Barat Daya yang Berbasis Ekonomi Lokal
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 3 Desember 2025 di Hotel Rylich Panorama Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sebagai forum diskusi dan pertukaran pandangan mengenai peran masyarakat hukum adat dalam mendorong investasi yang berkeadilan, sejalan dengan visi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya yang maju, mandiri, dan sejahtera berbasis ekonomi lokal.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi dan Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif dan Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan Focus Group Discussion (FGD) mengenai Peran Masyarakat Hukum Adat dalam Investasi Berkeadilan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa keberhasilan investasi di Provinsi Papua Barat Daya sangat ditentukan oleh penerapan prinsip keadilan, penghormatan terhadap hak masyarakat hukum adat, serta orientasi pada penguatan ekonomi lokal. Diskusi menegaskan pentingnya keterlibatan aktif Orang Asli Papua (OAP) sebagai subjek pembangunan, termasuk melalui penerapan prinsip Free,

	Prior and Informed Consent (FPIC) dalam setiap tahapan investasi di wilayah adat. Selain itu, teridentifikasi berbagai tantangan dalam implementasi investasi yang inklusif, khususnya terkait kepastian hak ulayat, model kemitraan yang adil, serta integrasi potensi lokal seperti UMKM dan sumber daya adat dalam kegiatan penanaman modal. FGD ini juga memperkuat komitmen pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan untuk mendorong investasi yang berkelanjutan, berkeadilan, dan memberikan manfaat langsung bagi kesejahteraan masyarakat adat di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Perlu dilakukan pemetaan hutan adat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai dasar pengakuan dan perlindungan hak masyarakat hukum adat. 2. Perlu disusun dan ditetapkan Peraturan Daerah Khusus (Perdapus) yang mendukung proses pemetaan hutan adat di Provinsi Papua Barat Daya. 3. Penguatan regulasi dan kebijakan terkait pengalihan hak atas tanah adat menjadi saham atau bentuk kepemilikan lain yang adil sebagai bagian dari skema investasi berkeadilan bagi masyarakat adat.
Dokumentasi	-

9) Kegiatan 9

Nama Kegiatan	Kunjungan kerja dalam rangka Koordinasi terkait Koperasi Merah Putih di Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 4 Desember 2025 di Kantor Dinas Koperasi Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Melakukan koordinasi lintas pemangku kepentingan terkait pelaksanaan dan pengembangan Koperasi Merah Putih di Kabupaten Maybrat. 2. Menyelaraskan pemahaman mengenai peran, fungsi, dan arah kebijakan Koperasi Merah Putih sebagai penggerak ekonomi masyarakat. 3. Mengidentifikasi kondisi aktual, permasalahan, dan kebutuhan koperasi di lapangan.

	4. Merumuskan langkah-langkah strategis tindak lanjut dalam rangka penguatan kelembagaan dan usaha koperasi.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab. Maybrat; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Terbangunnya kesepahaman bersama mengenai peran strategis Koperasi Merah Putih dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Maybrat. 2. Terpetakannya kondisi riil koperasi, termasuk potensi, tantangan, dan kebutuhan penguatan. 3. Teridentifikasinya kebutuhan dukungan kebijakan, pendampingan, dan pembiayaan koperasi. 4. Meningkatnya komitmen pemerintah daerah dan pengurus koperasi untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan usaha koperasi.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Penguatan kelembagaan Koperasi Merah Putih melalui pendampingan manajemen, administrasi, dan tata kelola usaha. 2. Penyusunan peta jalan (roadmap) pengembangan koperasi berbasis potensi unggulan Kabupaten Maybrat. 3. Fasilitasi akses permodalan dan kemitraan usaha bagi koperasi. 4. Peningkatan kapasitas SDM pengurus dan anggota koperasi melalui pelatihan berkelanjutan. 5. Integrasi program Koperasi Merah Putih ke dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah secara berkelanjutan.
Dokumentasi	-

10) Kegiatan 10

Nama Kegiatan	FGD Master Plan Pembangunan Pusat Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 5 Desember 2025 di Hotel Kyriad Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Focus Group Discussion (FGD) sekaligus melaksanakan tugas dan fungsi Sosialisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Badan Pengarah Papua (BPP), serta memastikan perencanaan Master Plan Pembangunan Pusat Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya selaras dengan arah kebijakan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Cerdas); Dinas Pendidikan PBD; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan FGD menghasilkan kontribusi substantif dari berbagai pemangku kepentingan, antara lain perwakilan bidang kebudayaan kabupaten/kota di Papua Barat Daya, Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK), tokoh adat, komunitas seni, akademisi, dan pemerhati kebudayaan. Diskusi menekankan pentingnya pemetaan struktur adat dan potensi budaya lokal sebagai dasar perencanaan, perlindungan dan revitalisasi bahasa daerah serta kerajinan tradisional, pengembangan database digital kebudayaan, serta integrasi hak ulayat dan kearifan lokal ke dalam tata ruang wilayah (RTRW). FGD juga menegaskan bahwa pusat kebudayaan harus dirancang sebagai instrumen penguatan ketahanan identitas masyarakat, bukan semata fasilitas fisik. Kegiatan ini diformulasikan berdasarkan landasan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan, peraturan tentang cagar budaya, serta visi misi pembangunan Provinsi Papua Barat Daya. Sebagai output awal, tersusun draft dokumen Master Plan pembangunan kawasan budaya yang komprehensif, memuat strategi

	pelestarian situs budaya, peningkatan kapasitas pelaku budaya, serta kerangka program kebudayaan yang akan menjadi acuan perencanaan dan pengajuan dukungan sumber daya, termasuk ke Kementerian Kebudayaan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Sebagai tindak lanjut, Badan Pengarah Papua akan mengawal draft dokumen Master Plan Pembangunan Pusat Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya kepada para pemangku kepentingan terkait agar ditetapkan sebagai dokumen resmi pemerintah daerah. Dokumen ini akan diintegrasikan dalam perencanaan program pembangunan daerah serta dijadikan dasar pengusulan dukungan anggaran dan sumber daya ke kementerian/lembaga terkait, khususnya Kementerian Kebudayaan. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas OPD, lembaga kebudayaan, dan komunitas adat untuk memastikan implementasi master plan berjalan berkelanjutan, termasuk perencanaan pendirian dan pengembangan pusat kebudayaan sebagai ruang ekspresi, edukasi, dan penguatan identitas budaya Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

11) Kegiatan 11

Nama Kegiatan	Undangan Ibadah Perayaan Natal GBPB Yesyurun Kota Sorong Tahun 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 5 Desember 2025 di GBPB Jemaat Yussyurun, Rufe, Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan Ibadah Perayaan Natal sebagai bentuk kehadiran dan dukungan moral Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan keharmonisan sosial di tengah masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja): Pengurus Gereja; Jemaat Gereja
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	1. Terjalinnnya hubungan yang harmonis antara Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya dengan unsur masyarakat dan lembaga keagamaan. 2. Tersampainya pesan kebersamaan, persaudaraan, dan kedamaian sebagai bagian dari penguatan kohesi sosial di wilayah Kota Sorong. 3. Terbangunnya suasana kebersamaan yang mendukung terciptanya stabilitas sosial dalam rangka mendukung pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Memperkuat komunikasi dan silaturahmi dengan tokoh agama dan masyarakat sebagai bagian dari upaya menjaga keharmonisan sosial. 2. Mendorong keterlibatan BPP dalam kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan yang mendukung persatuan dan stabilitas daerah. 3. Menjadikan momentum keagamaan sebagai sarana penguatan nilai-nilai sosial yang sejalan dengan semangat pembangunan Papua yang damai dan berkelanjutan.



12) Kegiatan 12

Nama Kegiatan	Upacara HUT Ke-3 Tahun Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 8 Desember 2025 di Alun-Alun Aimas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri Upacara Peringatan Hari Ulang Tahun ke-3 Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk partisipasi dan dukungan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya terhadap peringatan hari jadi daerah, serta sebagai momentum penguatan semangat kebersamaan dan komitmen pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	1. Terlaksananya upacara peringatan HUT ke-3 Provinsi Papua Barat Daya dengan tertib dan khidmat. 2. Terbangunnya semangat kebersamaan dan persatuan antar unsur pemerintah daerah, pemangku kepentingan, dan masyarakat. 3. Tersampainya pesan dan refleksi pembangunan daerah sebagai penguatan komitmen dalam mendukung pembangunan Provinsi Papua Barat Daya ke depan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Menjadikan momentum peringatan HUT Provinsi Papua Barat Daya sebagai sarana penguatan koordinasi dan sinergi antar pemangku kepentingan pembangunan.

	2. Mendorong konsistensi dukungan terhadap program dan kebijakan pembangunan daerah yang selaras dengan arah pembangunan Papua secara nasional. 3. Memperkuat peran BPP dalam mendukung percepatan pembangunan Provinsi Papua Barat Daya melalui pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumentasi	

13) Kegiatan 13

Nama Kegiatan	Penyambutan Kepala Staf Angkatan Darat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 8 Desember 2025 di VIP Room Bandara DEO Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan penyambutan Kepala Staf Angkatan Darat sebagai bentuk partisipasi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung kegiatan kenegaraan serta memperkuat koordinasi dan sinergi antara unsur pemerintah dan aparat pertahanan di wilayah Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Kepala Staf Angkatan Darat; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan penyambutan Kepala Staf Angkatan Darat di Bandara DEO Sorong dengan tertib dan lancar.

	2. Terjalannya hubungan dan komunikasi yang baik antara unsur pemerintah daerah dan aparat pertahanan dalam rangka menjaga stabilitas dan keamanan wilayah. 3. Terbangunnya suasana kondusif yang mendukung pelaksanaan tugas pemerintahan dan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Memperkuat koordinasi dan komunikasi antara pemerintah daerah, BPP, dan aparat pertahanan dalam mendukung stabilitas wilayah. 2. Mendorong sinergi lintas sektor guna menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan Papua Barat Daya. 3. Menjaga kesinambungan hubungan kelembagaan sebagai bagian dari upaya mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing pihak.
Dokumentasi	 

14) Kegiatan 14

Nama Kegiatan	Peresmian Sumur Bor secara Serentak di wilayah Korem 181/PrajaVira Tama Kodam XVIII/Kasuari
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 9 Desember 2025 di Kp. Kurowatu Klalin, Aimas
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan peresmian sumur bor secara serentak sebagai bentuk partisipasi Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung penyediaan akses air bersih bagi masyarakat, serta penguatan sinergi lintas sektor dalam mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Korem 181/PrajaVira Tama Kodam; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi dan Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Terlaksananya kegiatan peresmian sumur bor secara serentak di wilayah Korem 181/Praja Vira Tama Kodam XVIII/Kasuari dengan tertib dan lancar. 2. Terbangunnya sinergi antara unsur TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mendukung penyediaan sarana air bersih. 3. Meningkatnya akses masyarakat terhadap sumber air bersih yang mendukung kesehatan dan kualitas hidup.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Mendorong pemeliharaan dan pengelolaan sarana sumur bor secara berkelanjutan oleh pihak terkait dan masyarakat setempat. 2. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam pengembangan program penyediaan air bersih di wilayah Papua Barat Daya. 3. Mengintegrasikan penyediaan akses air bersih sebagai bagian dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan berkelanjutan.
Dokumentasi	-

15) Kegiatan 15

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 9 Desember 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan koordinasi terkait update permasalahan Eks Pekerja PT Pertamina EP Sorong.
Peserta Kegiatan	
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Terlaksananya dialog dan koordinasi antara Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya dengan Lembaga Solidaritas Ketenagakerjaan Papua Provinsi Papua Barat Daya terkait permasalahan dimaksud.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Menghimpun dan mendokumentasikan hasil pertemuan sebagai bahan koordinasi dan evaluasi dalam pelaksanaan tugas BPP. 2. Melaksanakan koordinasi lanjutan dengan instansi dan pemangku kepentingan terkait sesuai dengan kewenangan masing-masing.
Dokumentasi	-

16) Kegiatan 16

Nama Kegiatan	Audiensi dan Wawancara bersama Tim KOMPAS TV
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 9 Desember 2025 di Aula KPPN Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	1. Menyampaikan secara terbuka peran, fungsi, dan kewenangan BP3OKP Papua Barat Daya kepada publik. 2. Memberikan pemahaman mengenai posisi BP3OKP sebagai lembaga koordinatif dan pengarah percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 3. Membangun komunikasi yang konstruktif dengan media nasional dalam rangka edukasi publik.

	4. Mendukung transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Tim Kompas TV
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Harmoni Sosial-Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	1. Hasil yang dicapai dari kegiatan audiensi dan wawancara ini antara lain: 2. Tersampainya informasi yang utuh dan jelas mengenai peran dan fungsi BP3OKP Papua Barat Daya kepada publik melalui media nasional. 3. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai mekanisme percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua. 4. Terbangunnya hubungan komunikasi yang positif dan kolaboratif antara BP3OKP dan media. 5. Terciptanya ruang dialog publik yang sehat terkait pembangunan Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Penguatan kerja sama dan komunikasi berkelanjutan antara BP3OKP dan media massa. 2. Penyusunan materi komunikasi publik yang lebih terstruktur dan mudah dipahami masyarakat. 3. Pelaksanaan forum dialog atau diskusi publik secara berkala terkait isu strategis pembangunan Papua Barat Daya. 4. Optimalisasi peran media sebagai mitra strategis dalam mendukung transparansi dan akuntabilitas pembangunan Otsus.
Dokumentasi	

17) Kegiatan 17

Nama Kegiatan	Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Desember 2025 di Hotel Aston Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri Rapat Kerja Daerah Percepatan Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) Provinsi Papua Barat Daya, mengingat Badan Pengarah Papua (BPP) merupakan bagian dari Satuan Tugas (Satgas) MBG Provinsi. Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat pelaksanaan Program MBG di wilayah Papua Barat Daya serta menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen lintas sektor dalam implementasi program secara terpadu dan berkelanjutan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja); Pemda PBD; Satgas MBG PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif)
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan Rakerda menghasilkan kesepahaman bahwa keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis di Papua Barat Daya memerlukan koordinasi yang semakin erat antara pemerintah daerah, TNI-Polri, MRP Papua Barat Daya, DPR Papua Barat Daya, serta mitra pembangunan lainnya. Dalam forum ini juga disampaikan pentingnya peran Dinas Pertanian, Pangan, Kelautan dan Perikanan (P2KP) Provinsi Papua Barat Daya bersama Satgas MBG Provinsi untuk melakukan pendataan ketersediaan bahan pangan sebagai upaya menjaga ketahanan pangan dan mengendalikan inflasi daerah. Selain itu, teridentifikasi kendala dalam pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di wilayah terpencil, yang dipengaruhi oleh faktor cuaca dan kondisi geografis lokasi pembangunan yang sulit dijangkau.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyusunan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) pembagian tugas yang jelas antara anggota Satgas MBG Provinsi dalam berkoordinasi dengan Satgas MBG Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, perlu dilaksanakan rapat tindak lanjut yang bersifat teknis bersama OPD terkait dan Satgas MBG Kabupaten/Kota untuk memastikan ketersediaan dan distribusi bahan pangan. Koordinasi dan pemetaan tren inflasi akibat pembelanjaan bahan pangan oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga perlu dilakukan bersama Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Terkait pembangunan SPPG di wilayah terpencil, dipandang perlu adanya pemberian tambahan waktu kerja bagi investor yang terlibat guna menyesuaikan dengan tantangan kondisi cuaca dan geografis.
Dokumentasi	

18) Kegiatan 18

Nama Kegiatan	Pembukaan Papua Barat Daya Investment Year 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Desember 2025 di Gd. Lambert Jitmau Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan pembukaan Papua Barat Daya Investment Year 2025 yang bertujuan untuk menyampaikan visi dan arah kebijakan investasi di Provinsi Papua Barat

	Daya tahun 2025, mempromosikan potensi dan peluang investasi unggulan daerah kepada investor nasional dan regional, membangun kepercayaan serta sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya, serta mendorong investasi yang inklusif, berkelanjutan, dan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	1. Tersampainya komitmen Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam membuka ruang investasi yang sehat dan bertanggung jawab. 2. Meningkatnya minat dan perhatian pelaku usaha terhadap peluang investasi di Papua Barat Daya. 3. Terbangunnya komunikasi awal dan jejaring kemitraan antara pemerintah daerah dan calon investor. 4. Menguatnya citra Papua Barat Daya sebagai daerah tujuan investasi yang aman, potensial, dan berkelanjutan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. Penyusunan dan publikasi daftar proyek investasi prioritas (investment project ready to offer). 2. Penguatan promosi investasi secara berkelanjutan melalui forum, pameran, dan business matching. 3. Peningkatan koordinasi lintas OPD dalam mendukung kemudahan investasi dan pelayanan terpadu. 4. Pengawasan investasi agar selaras dengan rencana pembangunan daerah dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat lokal.

Dokumentasi



19) Kegiatan 19

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Desember 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Mensinkronkan usulan pembangunan dan peningkatan jalan daerah dan jalan nasional, menyiapkan kelengkapan data teknis dan Basic Price untuk pengusulan Inpres Jalan Daerah tahun 2026, serta menyepakati langkah tindak lanjut penyelesaian kendala lahan, keamanan, dan dukungan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); BBPJN

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	RIPPP – Kondisi Perlu (Infrastruktur)
Hasil Kegiatan	1. Seluruh usulan jalan wajib dilengkapi data teknis dan narasi manfaat ekonomi. 2. Basic Price material harus diserahkan paling lambat 12 Desember 2025. 3. Pengusulan Inpres Jalan Daerah dan jalan nasional dilakukan melalui aplikasi SITIA. 4. Penyelesaian persoalan lahan dan dukungan keamanan menjadi kunci persetujuan pusat. 5. Diperlukan koordinasi lintas pemerintah provinsi dan kabupaten untuk ruas lintas wilayah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	1. BPP dan Asisten II Maybrat menyiapkan Data Basic Price yang ditandatangani Bupati Maybrat, Tambrau, dan Sorong Selatan dalam 2 hari. 2. Pemda Maybrat menyiapkan data teknis jalan dan jembatan untuk diserahkan ke Balai Jalan. 3. Pengusulan ruas prioritas ke aplikasi SITIA untuk tahun anggaran 2026. 4. Koordinasi Gubernur Papua Barat Daya dan Papua Barat bersama Kepala Balai Jalan serta Bupati Maybrat dan Bintuni terkait pembebasan lahan. 5. Penyiapan surat dukungan masyarakat dan jaminan keamanan untuk ruas Susumuk–Bintuni. 6. BPP memastikan jaminan Keamanan dari pihak KASAD berupa surat penegasan yang memberikan jaminan keamanan 7. Rapat lanjutan terkait status kantor Balai Jalan di Kilo 10 dan Welek.

Dokumentasi



20) Kegiatan 20

Nama Kegiatan	Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas) Episode ke-5
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Desember 2025 di Auditorium Mutiara STIK Lemdiklat Polri Jakarta
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan sebagai narasumber dalam Dialog Literasi Kebangsaan STIK (Dilibas) Episode ke-5, sebagai bagian dari pelaksanaan dialog publik dan bentuk komitmen Polri dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Cerdas); Polri; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	1. Tersampainya pemahaman mengenai mandat Badan Pengarah Papua (BPP) sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021, yang menetapkan empat misi Percepatan

	Pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai. 2. Disampaikannya pentingnya penguatan sinergi lintas sektor dalam rangka merestorasi misi Papua Damai di Tanah Papua, antara lain melalui: • Keterlibatan aktif sebagai Pokja Papua Damai. • Persiapan formasi sekolah kedinasan Polri bagi Orang Asli Papua (OAP) bekerja sama dengan enam pemerintah provinsi di Tanah Papua, sesuai amanat PP Nomor 106 Tahun 2023. • Penyusunan konsep dan desain penyelesaian masalah atau konflik berbasis pendekatan antropologi budaya dan keagamaan. • Penerapan meritokrasi SDM Polri secara merata tanpa stratifikasi, dengan penguatan pada jenjang Bintara dan anggota Polri di wilayah 3T dan wilayah konflik. • Penguatan kapasitas SDM serta peningkatan kualitas layanan Polri pada tingkat Polsek berbasis community friendly. • Peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan anggota Polri, dimulai dari penguatan layanan di tingkat Polsek. 3. Disampaikannya gagasan integrasi Transformasi Polri dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029, yang berpotensi mendorong pembangunan Papua agar lebih cepat, inklusif, dan berkelanjutan, dengan peran Polri tidak hanya sebagai penjaga keamanan tetapi juga sebagai mitra pembangunan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Kegiatan dialog literasi kebangsaan serupa dapat diinisiasi dan difasilitasi oleh Pokja Papua Damai sebagai ruang diskusi berkelanjutan dalam rangka penguatan sinergi dan perbaikan kualitas pelayanan Polri di daerah.

Dokumentasi



21) Kegiatan 21

Nama Kegiatan	Undangan Ibadah Natal Bapperida Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 10 Desember 2025 di Rylich Panorama Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri undangan Ibadah Natal Bapperida Provinsi Papua Barat Daya sebagai bentuk kehadiran dan dukungan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam memperkuat nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan

	keharmonisan antar aparaturnya serta pemangku kepentingan pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Bapperida PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan Ibadah Natal Bapperida Provinsi Papua Barat Daya berlangsung dengan tertib dan khidmat, serta dihadiri oleh unsur perangkat daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini menjadi sarana penguatan nilai-nilai kebersamaan, toleransi, dan solidaritas antar aparaturnya, sekaligus mempererat hubungan kelembagaan dalam suasana kekeluargaan yang mendukung terciptanya iklim kerja yang harmonis.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Momentum kegiatan keagamaan ini dapat dimanfaatkan untuk terus memperkuat komunikasi dan silaturahmi antar perangkat daerah serta pemangku kepentingan pembangunan. Selain itu, nilai-nilai kebersamaan dan etika pelayanan yang tercermin dalam kegiatan ini diharapkan dapat terus diinternalisasikan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing instansi.
Dokumentasi	 

22) Kegiatan 22

Nama Kegiatan	Simposium Papua Barat Daya - PBDIY 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis, 11 Desember 2025 di Gd. Lambert Jitmau Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan sebagai narasumber dalam Simposium Papua Barat Daya – PBDIY 2025 yang bertujuan menjadi forum strategis dialog kebijakan dan praktik investasi di Papua Barat Daya tahun 2025. Kegiatan ini juga dimaksudkan untuk menegaskan peran BP3OKP sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong investasi yang inklusif dan berkeadilan, mengkonsolidasikan pemahaman para pemangku kepentingan mengenai arah investasi Papua Barat Daya, serta menghasilkan rekomendasi strategis bagi penguatan iklim investasi yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Simposium Papua Barat Daya – PBDIY 2025 berhasil mempertemukan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, BP3OKP, investor, akademisi, dan masyarakat adat, dalam forum dialog kebijakan investasi daerah. Melalui kegiatan ini, posisi BP3OKP semakin menguat sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam pengawalan investasi. Selain itu, terbangun kesepahaman bersama mengenai pentingnya investasi yang berkeadilan dan berpihak kepada Orang Asli Papua (OAP). Kegiatan ini juga menghimpun berbagai masukan dan rekomendasi kebijakan investasi Papua Barat Daya tahun 2025, serta membentuk jejaring kolaborasi lintas

	sektor dalam rangka mendukung iklim investasi yang inklusif dan berkelanjutan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan simposium, direkomendasikan penguatan peran BP3OKP dalam mengawal sinkronisasi kebijakan investasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hasil simposium perlu dihimpun dan disusun sebagai bahan rekomendasi kebijakan investasi Papua Barat Daya serta diintegrasikan ke dalam agenda resmi Papua Barat Daya Investment Year 2025. Selain itu, diperlukan pengembangan mekanisme monitoring dan evaluasi investasi yang berbasis dampak sosial dan ekonomi bagi Orang Asli Papua (OAP), serta pelaksanaan forum lanjutan seperti FGD tematik atau business matching dengan pendampingan BP3OKP guna memperkuat implementasi hasil simposium.
Dokumentasi	

23) Kegiatan 23

Nama Kegiatan	Pertemuan/Audiensi dengan Tokoh Masyarakat OAP
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 12 Desember 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan pertemuan dan tatap muka dengan tokoh masyarakat Orang Asli Papua (OAP) guna menghimpun saran, pendapat, dan informasi terkait persoalan terkini di Distrik Teminabuan, Kabupaten Sorong Selatan, Provinsi Papua Barat Daya, sebagai bahan pertimbangan dalam pelaksanaan tugas koordinasi dan perumusan rekomendasi pembangunan daerah.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Ibu Sherly Thesia

Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Audiensi menghasilkan pemetaan awal potensi ekonomi lokal di Distrik Teminabuan, khususnya pengembangan usaha pengolahan ikan melalui keramba dan kolam. Usaha ini dinilai memiliki peluang untuk berkembang dengan baik apabila didukung oleh akses infrastruktur jalan yang memadai menuju area kerja. Selain berpotensi meningkatkan pendapatan masyarakat, kegiatan ekonomi produktif tersebut juga dipandang dapat berkontribusi dalam menekan tingkat kriminalitas di kalangan angkatan kerja, dengan mengalihkan aktivitas masyarakat dari perilaku negatif seperti konsumsi minuman keras dan penyalahgunaan narkoba ke kegiatan yang lebih positif dan produktif, yakni budidaya ikan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan pengawasan dan pemetaan terhadap rantai pasok dan peredaran narkoba di Distrik Teminabuan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dan instansi terkait. Selain itu, perlu dilakukan pengawalan terhadap proposal pengusulan kegiatan pembangunan di tingkat Provinsi Papua Barat Daya, khususnya yang berkaitan dengan pembangunan dan perbaikan akses jalan serta dukungan permodalan untuk pengembangan usaha keramba ikan dan kolam di Distrik Teminabuan, agar program yang diusulkan tepat sasaran dan dapat memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Dokumentasi	-

24) Kegiatan 24

Nama Kegiatan	Penutupan Papua Barat Daya Investment Year 2025
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at, 12 Desember 2025 di Gd. Lambert Jitmau Kota Sorong

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Penutupan Papua Barat Daya Investment Year 2025 yang bertujuan untuk menyampaikan evaluasi dan capaian utama pelaksanaan Papua Barat Daya Investment Year 2025, mengapresiasi kontribusi para pemangku kepentingan yang terlibat dalam rangkaian kegiatan, menegaskan komitmen keberlanjutan agenda investasi Papua Barat Daya pasca-2025, serta menyampaikan arah tindak lanjut dan agenda strategis investasi Papua Barat Daya ke depan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Kegiatan penutupan Papua Barat Daya Investment Year 2025 menjadi forum penyampaian laporan capaian dan evaluasi pelaksanaan Investment Year kepada seluruh pemangku kepentingan. Melalui kegiatan ini, terbangun dan menguat komitmen bersama untuk melanjutkan agenda investasi yang berkelanjutan di Papua Barat Daya. Selain itu, kesinambungan jejaring dan komunikasi antara pemerintah daerah dan pelaku usaha tetap terjaga, serta terbentuk fondasi awal sebagai dasar perumusan agenda dan kebijakan investasi Papua Barat Daya pada tahun-tahun berikutnya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penyusunan dokumen evaluasi dan pembelajaran (lessons learned) sebagai bahan perbaikan kebijakan investasi daerah. Selain itu, direkomendasikan penetapan daftar proyek investasi prioritas lanjutan berdasarkan hasil Papua Barat Daya Investment Year 2025, penguatan peran OPD dan lembaga mitra strategis dalam pengawalan investasi berkelanjutan, serta pelaksanaan kegiatan lanjutan seperti business matching, FGD tematik, dan promosi investasi berkelanjutan. Hasil Investment Year 2025 juga perlu

	diintegrasikan ke dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan investasi Papua Barat Daya selanjutnya.
Dokumentasi	-

25) Kegiatan 25

Nama Kegiatan	Kunjungan Menteri Agama Republik Indonesia di Kota Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 13 Desember 2025 di Masjid Al-Akbar/Raya Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri rangkaian kunjungan kerja Menteri Agama Republik Indonesia di Kota Sorong sebagai bagian dari penguatan silaturahmi, kebersamaan, serta nilai-nilai kerukunan umat beragama, sekaligus memastikan pelaksanaan kegiatan selaras dengan arah kebijakan pembangunan Papua Barat Daya dan kerangka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Pemda PBD; Gubernur PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Kegiatan berjalan dengan tertib dan kondusif serta diikuti oleh berbagai unsur masyarakat dan pemangku kepentingan. Melalui kegiatan jalan santai bersama, terbangun suasana kebersamaan dan kedekatan antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kegiatan ini juga memperkuat pesan persatuan, toleransi, dan harmoni sosial sebagai fondasi penting dalam menjaga stabilitas dan kehidupan bermasyarakat yang damai di Kota Sorong dan Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu terus didorong kegiatan-kegiatan serupa yang bersifat inklusif dan partisipatif guna memperkuat kerukunan umat beragama dan kohesi sosial di Papua Barat Daya. Selain itu, diperlukan koordinasi berkelanjutan antara pemerintah pusat, daerah, dan tokoh agama dalam menjaga stabilitas

sosial serta mendukung iklim pembangunan yang aman dan harmonis.

Dokumentasi



26) Kegiatan 26

Nama Kegiatan	Undangan Ibadah Natal IDI Cabang Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Minggu, 14 Desember 2025 di GGK Sorong City Blessing
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri Ibadah Natal IDI Cabang Sorong sebagai bentuk partisipasi dan dukungan terhadap kegiatan keagamaan, serta memperkuat silaturahmi dan sinergi antara Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dengan organisasi profesi, khususnya di bidang kesehatan, dalam

	rangka mendukung suasana sosial yang harmonis dan selaras dengan arah pembangunan Papua Barat Daya dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Pengurus IDI Sorong; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai dan Papua Sehat
Hasil Kegiatan	Kegiatan Ibadah Natal IDI Cabang Sorong berlangsung dengan khidmat dan tertib, serta dihadiri oleh anggota IDI dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat hubungan kelembagaan dan kebersamaan lintas profesi, sekaligus memperkuat nilai-nilai persaudaraan, toleransi, dan kepedulian sosial dalam mendukung kehidupan bermasyarakat yang sehat dan harmonis di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Perlu dilanjutkan penguatan komunikasi dan kolaborasi antara BPP Provinsi Papua Barat Daya dan organisasi profesi kesehatan dalam mendukung program-program pembangunan sektor kesehatan. Selain itu, kegiatan keagamaan dan sosial dapat terus dimanfaatkan sebagai ruang mempererat sinergi dan menjaga keharmonisan sosial di Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

27) Kegiatan 27

Nama Kegiatan	Konsultasi Publik 2-Revisi RTRW Kabupaten Tambrauw dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Revisi RTRW Kabupaten Tambrauw Tahun 2025-2044
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 15 Desember 2025 di Vega Prime Hotel Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Konsultasi Publik II Revisi RTRW Kabupaten Tambrauw dan KLHS sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam memastikan arah kebijakan penataan ruang daerah selaras dengan prinsip pembangunan berkelanjutan, serta sejalan dengan kebijakan nasional, provinsi, dan kerangka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pemda Kab. Tambrauw; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Pelaksanaan Konsultasi Publik II menghasilkan terhimpunnya berbagai masukan, saran, dan rekomendasi substantif dari masyarakat, OPD, lembaga adat, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya terhadap penyempurnaan dokumen Revisi RTRW dan KLHS Kabupaten Tambrauw Tahun 2025–2044. Kegiatan ini juga meningkatkan pemahaman dan partisipasi publik terhadap arah kebijakan penataan ruang daerah serta membangun kesepahaman awal mengenai penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan sebagai dasar pengelolaan ruang di Kabupaten Tambrauw. Selain itu, tersedia bahan yang memadai untuk penyempurnaan dokumen sebelum memasuki tahapan penetapan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, seluruh masukan dan rekomendasi hasil Konsultasi Publik II perlu ditindaklanjuti dalam proses penyempurnaan dokumen Revisi RTRW dan KLHS Kabupaten Tambrauw. Diperlukan harmonisasi dokumen

	RTRW dengan kebijakan nasional, provinsi, serta rencana pembangunan daerah, serta memastikan integrasi rekomendasi KLHS ke dalam kebijakan penataan ruang. Selanjutnya, perlu disusun berita acara dan laporan resmi hasil Konsultasi Publik II sebagai bagian dari proses legalisasi, serta melanjutkan tahapan penetapan RTRW sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Dokumentasi	 

28) Kegiatan 28

Nama Kegiatan	Penyambutan Kepala BKN RI
---------------	---------------------------

Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 15 Desember 2025 di Kota Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Berpartisipasi dalam kegiatan penyambutan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia di Kota Sorong sebagai bentuk dukungan terhadap kunjungan kerja pemerintah pusat, sekaligus memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam penguatan tata kelola kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia aparatur di Provinsi Papua Barat Daya, agar selaras dengan arah kebijakan pembangunan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Pemda PBD; Gubernur PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	Kegiatan penyambutan Kepala BKN RI berlangsung dengan tertib dan lancar serta dihadiri oleh unsur pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kegiatan ini menjadi momentum penguatan hubungan kelembagaan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam mendukung peningkatan kualitas manajemen ASN, pengembangan SDM aparatur, serta penegasan komitmen bersama terhadap tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan di Provinsi Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan koordinasi dan komunikasi berkelanjutan antara BKN dan pemerintah daerah dalam rangka peningkatan kapasitas dan kualitas ASN di Papua Barat Daya. Selain itu, hasil dan arahan dari kunjungan kerja Kepala BKN RI dapat menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan pengelolaan kepegawaian daerah yang selaras dengan regulasi nasional dan mendukung percepatan pembangunan daerah.

Dokumentasi



29) Kegiatan 29

Nama Kegiatan	Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus Bagi Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Papua Barat Daya
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa-Kamis, 16-18 Desember 2025 di Hotel Aston Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otonomi Khusus sebagai narasumber, dalam rangka mengidentifikasi permasalahan tata kelola yang dihadapi OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, meningkatkan pemahaman mengenai risiko korupsi dalam pengelolaan Dana Otonomi Khusus, serta mendorong penguatan integritas, akuntabilitas, dan penerapan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program Otsus di Provinsi Papua Barat Daya.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja); KPK; Pemda PBD; MRP; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Harmoni Sosial-Papua Polhukam/Damai

Hasil Kegiatan	Kegiatan seminar dan lokakarya menghasilkan penguatan pemahaman bersama mengenai pentingnya keterkaitan antara RIPPP dan RAPP sebagai instrumen pengendali program pembangunan dan Otonomi Khusus guna mencegah bias perencanaan. Teridentifikasi berbagai permasalahan tata kelola yang menghambat daya serap Dana Otsus pada OPD teknis di tingkat provinsi dan kabupaten/kota, serta tersusunnya daftar awal area rawan korupsi dan tantangan implementasi Otsus. Kegiatan ini juga menegaskan pentingnya pendataan Orang Asli Papua (OAP) sebagai dasar penentuan peruntukan anggaran Otsus yang tepat sasaran. Selain itu, terbangun diskusi multipihak, termasuk dengan media, serta meningkatnya kesadaran dan komitmen aparatur pemerintah daerah untuk memperkuat integritas birokrasi dan pencegahan korupsi dalam tata kelola Otsus.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan perencanaan kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) lanjutan dengan OPD teknis dan pengelola anggaran, khususnya untuk mengidentifikasi faktor penghambat tata kelola Otsus. Selain itu, perlu dilakukan penguatan sistem perencanaan, penganggaran, dan pelaporan Dana Otsus berbasis transparansi dan akuntabilitas, peningkatan kapasitas aparatur melalui pelatihan berkelanjutan, serta optimalisasi peran pengawasan internal dan sinergi dengan lembaga pengawas eksternal. Selanjutnya, diperlukan penyusunan dan penerapan rencana aksi pencegahan korupsi yang terintegrasi ke dalam kebijakan dan program pembangunan Otonomi Khusus di Provinsi Papua Barat Daya.

Dokumentasi



30) Kegiatan 30

Nama Kegiatan	Launching/Peluncuran RAPPP 2025-2029
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 16 Desember 2025 di Kantor Kementerian PPN/Bappenas RI
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri kegiatan Launching/Peluncuran Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) Tahun 2025–2029 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam memastikan instrumen kebijakan percepatan pembangunan Papua.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Bapperida/Pemda se-Papua; Bappenas; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Harmoni Sosial-Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Peluncuran RAPPP Tahun 2025–2029 berlangsung dengan lancar dan menjadi momentum penting dalam penegasan arah kebijakan dan prioritas percepatan pembangunan Papua secara terintegrasi. Kegiatan ini memperkuat kesepahaman pemangku kepentingan pusat dan daerah mengenai kerangka implementasi RAPPP sebagai instrumen operasional RIPPP, sekaligus menegaskan peran pemerintah daerah dan Badan Pengarah Papua dalam mengawal pelaksanaan program pembangunan agar tepat sasaran, terkoordinasi, dan berdampak langsung bagi masyarakat Papua.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan sinkronisasi RAPPP Tahun 2025–2029 dengan dokumen perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota. Selain itu, perlu dilakukan penguatan koordinasi dan harmonisasi pelaksanaan program lintas sektor agar sejalan dengan misi percepatan pembangunan Papua. BPP Provinsi Papua Barat Daya diharapkan terus berperan aktif dalam melakukan pemantauan dan evaluasi implementasi RAPPP



31) Kegiatan 31

Nama Kegiatan	Pertemuan dengan Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sorong
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Rabu, 16 Desember 2025 di Papua Barat Daya
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan pertemuan dengan Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sorong dalam rangka menjalin sinergi antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Papua (BPP) dan sektor perbankan, khususnya untuk mendukung peningkatan layanan keuangan, penguatan pemberdayaan Orang Asli Papua (OAP), serta dukungan terhadap Program Strategis Nasional dan percepatan pembangunan di Provinsi Papua Barat Daya yang selaras dengan kerangka Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Produktif); Pimpinan Bank Mandiri Cabang Sorong
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Hasil pertemuan menunjukkan komitmen Bank Mandiri dalam mendukung pemberdayaan OAP, penguatan ekonomi masyarakat melalui Program Koperasi Merah

	Putih, serta peningkatan akses dan kualitas layanan keuangan di Provinsi Papua Barat Daya. Selain itu, disampaikan bahwa secara kebijakan dimungkinkan adanya pengalihan pengelolaan dana Otonomi Khusus dan dana desa ke Bank Mandiri, dengan catatan tetap memerlukan keputusan Gubernur serta mempertimbangkan aspek tata kelola dan regulasi keuangan yang berlaku.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, pembukaan layanan Bank Mandiri di Kabupaten Maybrat dipandang penting untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan perbankan, memperluas inklusi keuangan, serta menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat. Selain itu, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah terkait aspek kebijakan dan tata kelola dalam rangka optimalisasi dukungan sektor perbankan terhadap pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

32) Kegiatan 32

Nama Kegiatan	Pra-Rakortek Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Kamis-Sabtu, 18-20 Desember 2025 di Hotel Aston Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan kegiatan Pra-Rapat Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah di Tanah Papua sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam hal fasilitator forum/rapat sebagai dukungan upaya

	pelindungan, pelestarian, dan pengembangan bahasa dan sastra daerah, serta memastikan keselarasan kebijakan dengan arah pembangunan Papua Cerdas sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP (Anggota BPP Papua & Pokja Cerdas); Balai Bahasa Papua; Pusat Bahasa; Pemda PBD; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	Kegiatan Pra-Rakortek menghasilkan kesepakatan antara Badan Pengarah Papua dan Badan Bahasa Nasional terhadap sejumlah poin strategis terkait pelindungan bahasa dan sastra daerah di Tanah Papua, yang selanjutnya dituangkan dan ditandatangani dalam dokumen kesepakatan bersama. Selain itu, disepakati rencana pelaksanaan Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah yang direncanakan pada bulan Agustus 2026 sebagai tindak lanjut penguatan kebijakan dan implementasi program pelindungan bahasa daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan perencanaan dan persiapan yang terkoordinasi oleh masing-masing Pokja Papua Cerdas di enam provinsi di Tanah Papua dalam rangka mendukung pelaksanaan Rakortek Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk memastikan kesiapan substansi, dukungan kelembagaan, dan keberlanjutan program pelindungan bahasa dan sastra daerah.



33) Kegiatan 33

Nama Kegiatan	Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tambrau 2026-2030
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Sabtu, 20 Desember 2025 di Hotel Kyriad Sorong
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri dan berperan sebagai narasumber dalam kegiatan Workshop Penyusunan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tambrau Tahun 2026–2030, sekaligus melakukan sinkronisasi program antara OPD terkait dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) agar penyusunan RAD-PUG selaras dengan arah kebijakan percepatan pembangunan Papua dan prinsip pembangunan inklusif.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Pokja Sehat); Pemda Kab. Tambrau; Dinas PPPA Kab. Tambrau; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Sinkronisasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Sehat
Hasil Kegiatan	Kegiatan workshop menegaskan pentingnya penyelarasan Rencana Aksi Daerah Pengarusutamaan Gender (RAD-PUG) Kabupaten Tambrau Tahun 2026–2030 dengan RAPPP sebagai kerangka acuan pembangunan daerah. Selain itu, mengemuka perhatian terhadap peningkatan ketahanan rumah tangga sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan dan upaya pencegahan stunting. Kegiatan ini juga menghasilkan tahap awal penyusunan dokumen RAD-PUG Kabupaten Tambrau Tahun 2026–

	2030 sebagai dasar perencanaan program pengarusutamaan gender di daerah.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Sebagai tindak lanjut, diperlukan pelaksanaan kegiatan Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) lanjutan terkait penyusunan dan finalisasi RAD-PUG Kabupaten Tambrauw Tahun 2026–2030. Selain itu, diperlukan penguatan koordinasi lintas OPD agar implementasi RAD-PUG terintegrasi dengan program percepatan pembangunan Papua, khususnya pada aspek ketahanan keluarga, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Dokumentasi	

34) Kegiatan 34

Nama Kegiatan	Forum SHEK BPP: Pendidikan Karakter
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 22 Desember 2025 di Sekretariat BPP PBD
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan Forum SHEK Badan Pengarah Papua (BPP) dengan fokus Pendidikan Karakter dalam rangka menyelaraskan kebijakan dan program penguatan pendidikan karakter di Provinsi Papua Barat Daya. Kegiatan ini bertujuan mendorong sinergi antara BPP, Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta lembaga pendidikan tinggi keagamaan, mengidentifikasi tantangan

	dan kebutuhan strategis implementasi pendidikan karakter bagi peserta didik Orang Asli Papua (OAP), serta merumuskan rekomendasi kebijakan sebagai bahan koordinasi dan tindak lanjut antar pemangku kepentingan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi ruang pembelajaran dan refleksi internal BPP dalam penguatan karakter pimpinan, pokja, dan staf guna menunjang kinerja dan integritas tim BPP dalam pelaksanaan tugas tahun 2026.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja); Kepala STPK Benediktus Sorong; Tamu undangan lainnya
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi dan Koordinasi
Misi/Keterangan	Papua Cerdas
Hasil Kegiatan	Forum SHEK Pendidikan Karakter berfungsi sebagai ruang evaluasi dan refleksi bersama, baik terhadap pelaksanaan program pendidikan karakter di Papua Barat Daya maupun terhadap penguatan karakter internal BPP. Kegiatan ini mendorong evaluasi diri terkait nilai-nilai karakter dalam bekerja, kemampuan memahami perbedaan karakter antar kolega dan pimpinan, serta penguatan etika, tanggung jawab, dan semangat kolaborasi dalam tim. Selain itu, forum ini memperkaya pemahaman mengenai pentingnya pendidikan karakter sebagai fondasi pembangunan manusia Papua yang berkelanjutan.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, forum pendidikan karakter perlu direncanakan dan dilaksanakan secara rutin, minimal setiap bulan, sebagai bagian dari penguatan budaya kerja dan karakter aparatur di lingkungan BPP. Selain itu, hasil diskusi dan refleksi forum dapat dijadikan bahan penyusunan agenda koordinasi lanjutan dengan pemangku kepentingan pendidikan dalam rangka penguatan pendidikan karakter bagi peserta didik OAP di Provinsi Papua Barat Daya.

Dokumentasi



35) Kegiatan 35

Nama Kegiatan	Kunjungan Kerja dalam rangka SHEK Misi Papua Polhukam/Damai di Kabupaten Maybrat sekaligus Audiensi dengan Masyarakat Distrik Ayamaru Tengah dan Aifat Timur/Aifat Timur Tengah Kabupaten Maybrat
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Jum'at-Minggu, 26-28 Desember 2025 di Kabupaten Maybrat
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan kunjungan kerja dalam rangka Sinkronisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) Misi Papua Polhukam/Damai di Kabupaten Maybrat guna mendukung pelaksanaan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), khususnya pengarusutamaan harmoni sosial pada aspek politik, hukum, dan keamanan di tingkat kabupaten. Kegiatan ini bertujuan memperkuat koordinasi, dialog, dan pendampingan strategis antara Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP), pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, mendorong pendekatan keamanan yang humanis dan berbasis kearifan lokal, serta menghimpun masukan lapangan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Maybrat.

Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota & Pokja Produktif); Pemda Kab. Maybrat; Kepala Suku dan Masyarakat Distrik Ayamaru Tengah dan Aifat Timur Kab. Maybrat
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	SHEK
Misi/Keterangan	Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Kegiatan kunjungan kerja dan audiensi menghasilkan penguatan kesepahaman bersama mengenai integrasi pelaksanaan Misi Papua Damai dan Papua Produktif di Kabupaten Maybrat. Melalui dialog langsung dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat, teridentifikasi berbagai isu strategis, peluang, serta kebutuhan pendampingan lanjutan terkait stabilitas keamanan, pencegahan konflik sosial, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat berbasis potensi lokal. Kegiatan ini juga memperkuat koordinasi lintas sektor serta mendorong pendekatan pembangunan yang sensitif terhadap konteks sosial dan budaya masyarakat Maybrat.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan penguatan mekanisme koordinasi rutin lintas OPD dan pemangku kepentingan di Kabupaten Maybrat. Selain itu, direkomendasikan penyusunan rencana aksi terpadu untuk pelaksanaan Misi Papua Damai dan Papua Produktif yang berbasis kebutuhan lokal, peningkatan pendampingan teknis dan kelembagaan bagi program ekonomi produktif OAP, serta penguatan peran tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas sosial. Monitoring dan evaluasi berkala juga perlu dilakukan untuk memastikan dampak nyata dan keberlanjutan pelaksanaan kedua misi tersebut.

Dokumentasi



36) Kegiatan 36

Nama Kegiatan	Kunjungan di Area Persiapan Pertanian/Ketahanan Pangan serta Rencana Agrowisata di Wayer Kabupaten Sorong Selatan (Batalyon Teritorial Pembangunan)
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Senin, 29 Desember 2025 di Wayer Kabupaten Sorong Selatan
Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Melaksanakan kunjungan lapangan ke area persiapan pertanian dan ketahanan pangan serta rencana pengembangan agrowisata di Wayer, Kabupaten Sorong Selatan, sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pangan dan ekonomi lokal. Kegiatan ini bertujuan memastikan keselarasan program dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), mendorong sinergi antara pemerintah daerah dan unsur Batalyon Teritorial Pembangunan, serta menghimpun informasi lapangan sebagai bahan perumusan rekomendasi kebijakan pembangunan yang berkelanjutan.
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Batalyon Teritorial Pembangunan Sorong Selatan
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Evaluasi
Misi/Keterangan	Papua Produktif
Hasil Kegiatan	Kunjungan lapangan memberikan gambaran awal mengenai potensi pengembangan pertanian, ketahanan pangan, dan agrowisata di wilayah Wayer, Kabupaten Sorong Selatan. Kegiatan ini memperkuat pemahaman terhadap kesiapan lahan, dukungan kelembagaan, serta peluang pengembangan ekonomi berbasis potensi lokal. Selain itu, terbangun komunikasi dan kesepahaman awal antara pemangku kepentingan terkait pentingnya pengelolaan sektor pertanian dan agrowisata secara terintegrasi untuk mendukung kesejahteraan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

Rekomendasi/Rencana Tindaklanjuti	Sebagai tindak lanjut, diperlukan koordinasi lanjutan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait untuk penyusunan rencana pengembangan pertanian dan agrowisata yang terintegrasi. Selain itu, perlu dilakukan pemetaan kebutuhan teknis, kelembagaan, dan dukungan sarana prasarana guna memastikan keberlanjutan program ketahanan pangan. Monitoring dan evaluasi secara berkala juga diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program selaras dengan arah kebijakan pembangunan Papua Barat Daya.
Dokumentasi	

37) Kegiatan 37

Nama Kegiatan	Acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026
Pelaksanaan Kegiatan (Waktu dan Lokasi)	Selasa, 30 Desember 2025 di Kantor Gubernur Provinsi Papua Barat Daya

Tujuan Pelaksanaan Kegiatan	Menghadiri Acara Penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya Tahun Anggaran 2026 sebagai bagian dari pelaksanaan tugas Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung tertib administrasi pengelolaan keuangan daerah, serta memastikan arah kebijakan penganggaran selaras dengan prioritas pembangunan daerah dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).
Peserta Kegiatan	BPP PBD (Anggota); Pemda PBD; Gubernur PBD; OPD Teknis PBD
Tugas dan Fungsi Yang Dilaksanakan	Harmonisasi
Misi/Keterangan	RIPPP (Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif) dan Harmoni Sosial-Papua Polhukam/Damai
Hasil Kegiatan	Kegiatan penyerahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026 berlangsung dengan tertib dan lancar serta diikuti oleh seluruh perangkat daerah terkait. Kegiatan ini menandai kesiapan Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya dalam melaksanakan program dan kegiatan tahun anggaran 2026 secara terencana dan akuntabel. Selain itu, kegiatan ini memperkuat komitmen bersama terhadap pelaksanaan anggaran yang efektif, efisien, dan berorientasi pada hasil guna mendukung percepatan pembangunan di Papua Barat Daya.
Rekomendasi/Rencana Tindaklanjut	Sebagai tindak lanjut, diperlukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran Tahun Anggaran 2026 agar berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, koordinasi antar perangkat daerah perlu terus diperkuat untuk memastikan sinergi program dan optimalisasi pemanfaatan anggaran dalam mendukung pencapaian target pembangunan Papua Barat Daya secara berkelanjutan.

Dokumentasi



2.2 Capaian

Selama bulan Desember 2025, Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan rangkaian kegiatan Sosialisasi, Harmonisasi, Evaluasi, dan Koordinasi (SHEK) yang tersebar di tingkat provinsi, kabupaten/kota, serta nasional. Pelaksanaan kegiatan ini secara konsisten diarahkan untuk memastikan keselarasan kebijakan dan program pembangunan daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Fokus kegiatan mencakup seluruh misi utama percepatan pembangunan Papua, yaitu Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam/Damai, serta didukung oleh penguatan tata kelola Otonomi Khusus, data Orang Asli Papua (OAP), penataan ruang, dan infrastruktur. Adapun capaian utama bulan Desember 2025 dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Penguatan Tata Kelola Otonomi Khusus, Perencanaan, dan Akuntabilitas

Pada bulan Desember 2025, BPP Provinsi Papua Barat Daya berperan aktif dalam penguatan tata kelola Otonomi Khusus melalui berbagai forum evaluasi, koordinasi, dan sinkronisasi kebijakan. Kegiatan seperti Seminar dan Lokakarya Pencegahan Korupsi dalam Tata Kelola Otsus, peluncuran RAPPP 2025–2029 di Bappenas, serta penyerahan DPA Tahun Anggaran 2026 memperlihatkan upaya sistematis BPP dalam memastikan perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program Otsus berjalan transparan, akuntabel, dan selaras dengan RIPPP. Evaluasi terhadap hambatan serapan Dana Otsus, identifikasi area rawan korupsi, serta penegasan pentingnya data OAP sebagai dasar afirmasi anggaran menjadi fondasi penting dalam memperbaiki kualitas tata kelola pembangunan di Papua Barat Daya.

2. Penguatan Layanan Kesehatan dan Ketahanan Sosial – Papua Sehat

Capaian di bidang Papua Sehat ditandai dengan penguatan koordinasi lintas sektor dalam penanganan isu kesehatan prioritas dan ketahanan sosial masyarakat. Forum SHEK Misi Papua Sehat terkait penanggulangan HIV/AIDS, partisipasi dalam Rakerda Program Makan Bergizi Gratis (MBG), serta kolaborasi dengan organisasi profesi kesehatan menunjukkan peran BPP dalam mendorong pendekatan kesehatan yang komprehensif. Selain aspek layanan kesehatan, integrasi MBG dengan ketahanan pangan lokal dan pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian utama. Kegiatan keagamaan bersama organisasi profesi dan masyarakat juga memperkuat dimensi sosial Papua Sehat sebagai bagian dari kesehatan holistik masyarakat.

3. Penguatan Pendidikan, Budaya, dan Karakter – Papua Cerdas

Pelaksanaan misi Papua Cerdas pada bulan Desember 2025 difokuskan pada penguatan pendidikan formal, vokasi, kebudayaan, dan pendidikan karakter. Sosialisasi revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi, penguatan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH), serta pendampingan implementasi kebijakan pendidikan vokasi memperlihatkan konsistensi BPP dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia Papua. Di bidang kebudayaan, FGD Master Plan Pembangunan Pusat Kebudayaan serta Pra-Rakortek Pelindungan Bahasa dan Sastra Daerah menjadi tonggak penting dalam menjaga identitas budaya Papua Barat Daya. Forum SHEK Pendidikan Karakter juga memperlihatkan pendekatan ganda BPP, yaitu penguatan karakter peserta didik OAP sekaligus refleksi dan penguatan karakter internal aparatur BPP sebagai fondasi etika dan integritas kerja.

4. Penguatan Ekonomi Lokal dan Investasi Berkeadilan – Papua Produktif

Misi Papua Produktif pada bulan Desember 2025 menunjukkan capaian signifikan melalui rangkaian kegiatan Papua Barat Daya Investment Year 2025, FGD investasi berkeadilan, simposium investasi, serta penutupan Investment Year. BPP berperan strategis dalam mengawal narasi investasi yang inklusif, berkeadilan, dan berpihak pada OAP, dengan menekankan prinsip FPIC, pengakuan hak masyarakat adat, dan penguatan ekonomi lokal. Selain itu, koordinasi terkait Koperasi Merah Putih, pemberdayaan UMKM, pengembangan pertanian, ketahanan pangan, dan rencana agrowisata memperlihatkan pendekatan ekonomi yang berbasis potensi lokal dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

5. Penguatan Data OAP, Penataan Ruang, dan Infrastruktur Pendukung

Bulan Desember 2025 juga diwarnai dengan capaian penting dalam penguatan basis data dan penataan ruang sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan. Koordinasi pendataan terpilah OAP di Kabupaten Maybrat, konsultasi publik Revisi

RTRW dan KLHS Kabupaten Tambrau, serta sinkronisasi pembangunan jalan dengan BBPJN menunjukkan peran BPP dalam memastikan pembangunan berbasis data, spasial, dan lingkungan. Data OAP semakin diposisikan sebagai rujukan utama afirmasi kebijakan, sementara penataan ruang diarahkan untuk menyeimbangkan kepentingan pembangunan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan perlindungan hak masyarakat adat.

6. Penguatan Harmoni Sosial, Keamanan, dan Jejaring Kelembagaan – Papua Polhukam/Damai

Penguatan Papua Polhukam/Damai pada bulan Desember 2025 tercermin melalui partisipasi BPP dalam kegiatan keagamaan, kunjungan kerja tokoh nasional, dialog literasi kebangsaan, serta kunjungan kerja SHEK di Kabupaten Maybrat. Kegiatan-kegiatan ini memperkuat dialog sosial, pendekatan keamanan humanis berbasis kearifan lokal, serta sinergi antara pemerintah, aparat keamanan, tokoh adat, tokoh agama, dan masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa stabilitas keamanan dan harmoni sosial merupakan prasyarat utama bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua Barat Daya.

Kesimpulan

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya selama bulan Desember 2025 menunjukkan kinerja yang komprehensif, terkoordinasi, dan strategis dalam mengawal percepatan pembangunan Papua. Capaian bulan ini memperlihatkan bahwa BPP tidak hanya berperan sebagai lembaga koordinatif, tetapi juga sebagai simpul pengarah kebijakan yang menjembatani pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat. Secara umum, kinerja bulan Desember 2025 dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Penguatan tata kelola Otonomi Khusus dan perencanaan pembangunan** semakin terarah melalui evaluasi, sinkronisasi RAPP, serta penguatan akuntabilitas dan pencegahan korupsi.
2. **Peningkatan kualitas layanan dasar dan pembangunan manusia** diwujudkan melalui penguatan sektor kesehatan, pendidikan, vokasi, kebudayaan, dan pendidikan karakter.
3. **Penguatan ekonomi afirmatif dan investasi berkeadilan** berhasil dikonsolidasikan melalui Investment Year 2025, penguatan koperasi, pangan lokal, dan pemberdayaan ekonomi OAP.
4. **Penguatan basis data OAP, penataan ruang, dan infrastruktur** menjadi fondasi penting bagi pembangunan berbasis bukti, lingkungan, dan keadilan sosial.

5. **Penguatan harmoni sosial dan stabilitas wilayah** melalui pendekatan dialog, keagamaan, dan keamanan humanis semakin mempertegas misi Papua Damai sebagai prasyarat pembangunan berkelanjutan.

Secara keseluruhan, rangkaian kegiatan bulan Desember 2025 memperlihatkan konsistensi BPP Provinsi Papua Barat Daya dalam mengimplementasikan fungsi SHEK secara utuh dan berkesinambungan, serta menegaskan peran strategis BPP sebagai pengawal arah pembangunan Papua yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan sesuai mandat RIPP.

BAB III

PENUTUP

Demikian laporan ini disusun dan disampaikan sebagai bentuk realisasi sekaligus pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya, yang diwujudkan melalui rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan selama bulan Desember 2025.

Diharapkan laporan ini dapat membawa manfaat bagi BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya dalam evaluasi kinerja dan peningkatan kinerja ke depannya, serta bermanfaat bagi Wakil Presiden RI selaku Ketua Badan Pengarah Papua (BPP), Sekretaris Badan Pengarah Papua (BPP) dan Sekretariat Badan Pengarah Papua (BPP) dalam monitoring kegiatan BPP/BP3OKP Provinsi Papua Barat Daya.

Sorong, 9 Januari 2026

Nomor : 4/SPny/BPP-PBD/SOQ/II/2026
Lampiran : 3 (tiga) berkas
Perihal : **Penyampaian Laporan Badan Pengarah Papua (BPP)
Provinsi Papua Barat Daya**

Kepada Yth.
Kepala Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura
Di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Sekretariat Badan Pengarah Papua Jayapura Papua, antara lain:

1. Nomor S3/SETBPP/JYP/JYP.02/2025 tanggal 5 Februari 2025 hal Pedoman Penyampaian Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua; dan
2. Nomor S- 80/SETBPP/JYP/2025 tanggal 29 Desember 2025 hal Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 dan Program Kerja Tahun 2026 Badan Pengarah Papua.

bersama ini kami menyampaikan beberapa laporan Badan Pengarah Papua (BPP) Provinsi Papua Barat Daya, sebagai berikut:

1. **Laporan Bulanan Percepatan Pembangunan Papua**, serta **Laporan Operasional dan Kegiatan BPP Provinsi Papua Barat Daya Periode Bulan Desember 2025** (tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1uAfYst8Yz_qOekDUljZS6UjAaX5BrSWY?usp=sharing);
2. **Laporan Capaian Kinerja Tahun 2025 BPP Provinsi Papua Barat Daya** (tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1n_wjdoC5ZwNt0C1A7c7unjaxG4wvLGw4?usp=sharing);
dan
3. **Program Kerja BPP Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026** (tautan: https://drive.google.com/drive/folders/1S0wnRpFzX6LmEaFu4NI-OB3EvSjW_Qby?usp=sharing).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya kami ucapkan terimakasih.

**Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya,**



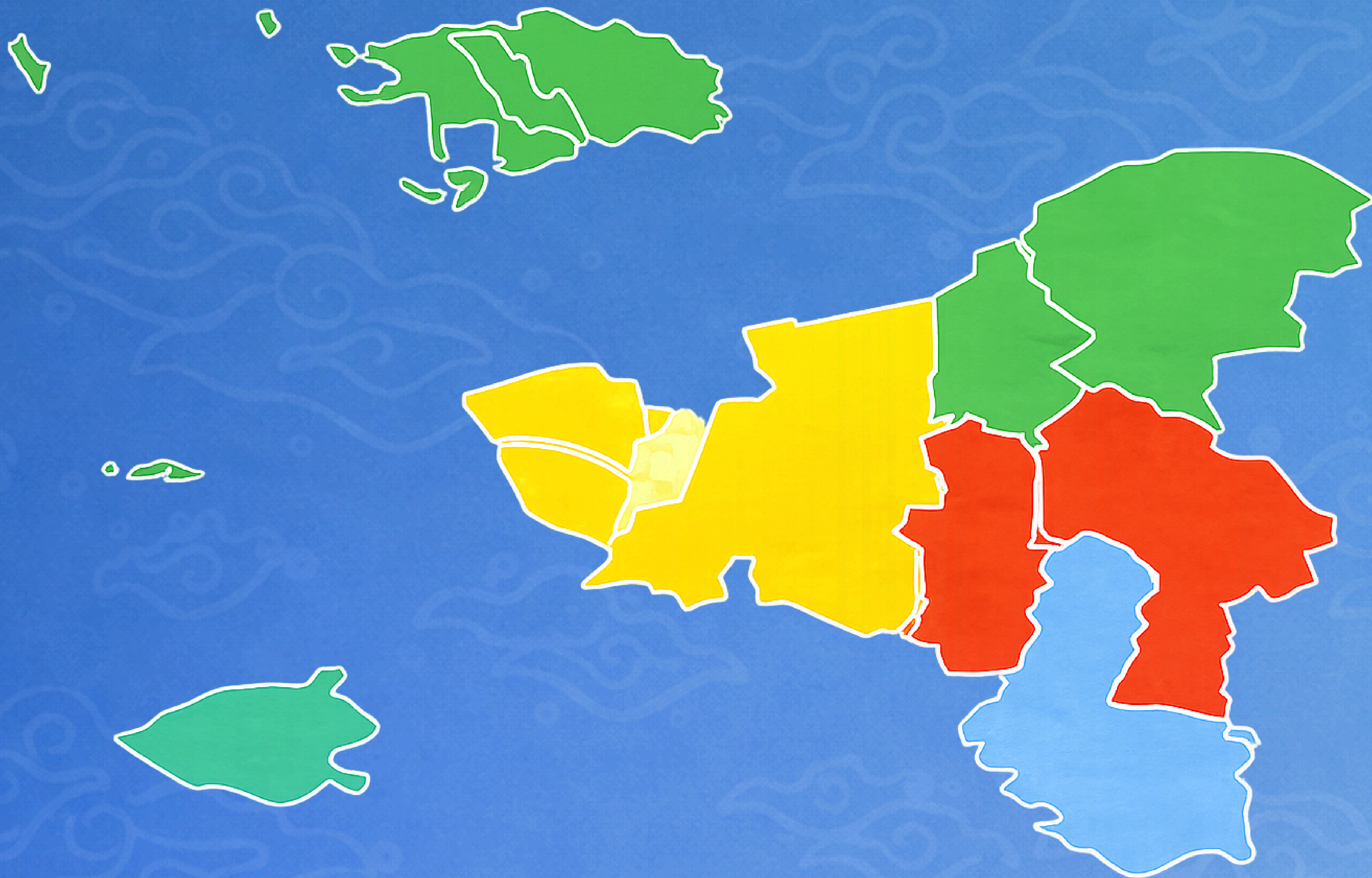
DRS OTTO IHALAUW, MA

Tembusan :

1. Sekretariat Badan Pengarah Papua Manokwari
2. KPPN Sorong selaku Tim Dukungan Administratif Sekretariat BPP Papua Barat Daya



LAPORAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025



Tim Penyusun

Pengarah

Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya

Drs. Otto Ihalauw, MA

Anggota Kelompok Kerja (Pokja)
BPP Provinsi Papua Barat Daya

Pokja Papua Sehat - drg. Rosaline Novita Irianna Krimadi, MPH., SpPM

Pokja Papua Cerdas - Helena Trivona Tuririday, S.Si., M.Si

Pokja Papua Produktif - Herman Wafom Tubur, S.P., M.Si

Kontributor

Alberd Berhad Duwith, M.T

Virginus Senau Air Turot, B.Sc

Penyusun-Editor-Desain

Dea Anggie Varena, S.Kom



Pasir Timbul Mansuar, Raja Ampat

Kata Pengantar

Anggota BPP Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya



Puji dan syukur ke hadirat **Tuhan Yang Maha Esa**, karena atas rahmat dan karunia-Nya, **Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua**

Barat Daya Tahun 2025 dapat disusun dan disampaikan sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Otonomi Khusus Papua*.

Laporan ini disusun sebagai refleksi atas pelaksanaan peran **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** dalam mendukung arah kebijakan pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022-2041* dan *Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)*. Seluruh capaian yang disajikan dalam laporan ini merupakan hasil kerja kolaboratif antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pemangku kepentingan dalam upaya mewujudkan pembangunan Papua yang lebih *adil, inklusif, dan berkelanjutan*.

Sepanjang **Tahun 2025**, pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** diarahkan untuk mendukung pencapaian misi utama pembangunan Papua, yaitu **Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, serta penguatan stabilitas politik, hukum, dan keamanan (Papua Damai)**.

Selain itu, laporan ini juga menyoroti capaian penting pada *aspek penguatan tata kelola pemerintahan dan kelembagaan daerah* sebagai fondasi keberlanjutan percepatan pembangunan dan efektivitas pelaksanaan *Otonomi Khusus Papua*.

Kami menyadari bahwa percepatan pembangunan di **Provinsi Papua Barat Daya** masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari aspek *geografis, sosial, ekonomi, maupun kapasitas kelembagaan*. Oleh karena itu, laporan ini tidak hanya menyajikan capaian kinerja, tetapi juga memuat *evaluasi, permasalahan, serta rekomendasi kebijakan* sebagai bahan perbaikan dan penguatan pelaksanaan pembangunan pada periode selanjutnya.

Akhir kata, kami berharap **Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025** dapat menjadi referensi dan pijakan bersama dalam memperkuat *sinergi kebijakan, meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan, serta mendukung penyusunan Program kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026* yang selaras dengan arah kebijakan nasional dan kebutuhan riil masyarakat Papua Barat Daya.

Atas dukungan, kerja sama, dan kontribusi seluruh pihak, kami sampaikan terima kasih.

Drs. Otto Ihalauw, MA
Anggota Badan Pengarah Papua
Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya



Piaynemo, Raja Ampat

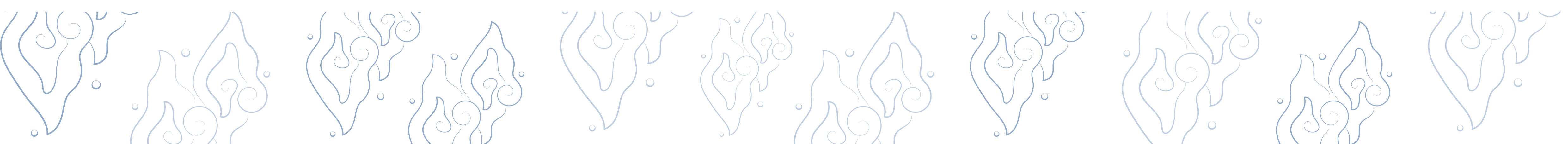


Daftar Isi

Kata Pengantar	4
Bab I Pendahuluan	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Maksud & Tujuan	8
Bab II Landasan Kebijakan	9
2.1 Landasan Kebijakan (Dasar Hukum)	9
2.2 Keterkaitan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Papua	10
Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025	11
3.1 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Sehat	11
3.2 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Cerdas	12
3.3 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Produktif	13
3.4 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)/Damai	14
3.5 Pelaksanaan Tusi SHEK Strategis Lainnya (Tata Kelola Pemerintahan, dsb)	15
Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025	16
4.1 Capaian Papua Sehat	16-19
4.2 Capaian Papua Cerdas	20-22
4.3 Capaian Papua Produktif	23-25
4.4 Capaian Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)/Damai	26
4.5 Capaian Lainnya	27
Bab V Permasalahan & Tantangan	28
5.1 Permasalahan yang Dihadapi	28
5.2 Upaya Tindak Lanjut	28
Bab VI Penutup	29
6.1 Kesimpulan	29
6.2 Rekomendasi	29



Pulau Koh, Raja Ampat
Gugusan kepulauan menakjubkan di
Papua Barat Daya, Indonesia.



Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) atau Badan Pengarah Papua (BPP) dibentuk berdasarkan *Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022* sebagai lembaga nonstruktural yang memiliki mandat untuk melaksanakan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) terhadap percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di Tanah Papua.*

Sejak dibentuk pada **tahun 2022**, BPP telah melaksanakan berbagai inisiatif strategis dalam rangka mendukung pencapaian Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan ekonomi lokal, serta pengembangan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, **BPP** mengedepankan *pendekatan kolaboratif melalui keterlibatan lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, perguruan tinggi, serta mitra pembangunan*, sehingga berperan sebagai *jembatan koordinatif* antara arah kebijakan nasional dan kebutuhan nyata masyarakat di Tanah Papua.

Berbagai kegiatan serta capaian kinerja yang dilaksanakan sepanjang Tahun **2025** merupakan refleksi dari upaya pendampingan dan fasilitasi **BPP** dalam membuka sumbatan kebijakan, memperkuat kapasitas pemerintah daerah, serta memastikan pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus berjalan sejalan dengan semangat paradigma baru pembangunan Papua sebagaimana diamanatkan dalam RIPPP.

1.2 Maksud & Tujuan

Maksud

Maksud penyusunan **Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Tahun 2025** adalah untuk menyajikan gambaran komprehensif mengenai pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Pengarah Papua** dalam melaksanakan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi* percepatan pembangunan serta pelaksanaan *Otonomi Khusus* di Tanah Papua khususnya di Provinsi **Papua Barat Daya** selama **Tahun 2025**.

Tujuan:

1. **Mendokumentasikan capaian kinerja Badan Pengarah Papua Tahun 2025** sebagai bentuk akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.
2. **Menyediakan informasi dan bahan evaluasi** terhadap pelaksanaan percepatan pembangunan dan Otonomi Khusus di Tanah Papua.
3. **Menjadi dasar dan acuan dalam penyusunan Program Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026** yang selaras dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).
4. **Mendukung penguatan koordinasi dan sinergi** antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan pembangunan Otonomi Khusus Papua.

Bab II Landasan Kebijakan

2.1 Landasan Kebijakan (Dasar Hukum)

Pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Pengarah Papua** dalam melaksanakan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi* percepatan pembangunan serta pelaksanaan *Otonomi Khusus* di Tanah Papua pada **Tahun 2025** berpedoman pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. *Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Percepatan Pembangunan Kesejahteraan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat*, sebagai arahan kebijakan nasional dalam mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Papua.
2. *Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua*.
3. *Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua*, sebagai dasar pembagian kewenangan dan penguatan kelembagaan pelaksana Otsus.
4. *Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan, dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua*.
5. *Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua*, sebagai dasar pembentukan, tugas, dan fungsi Badan Pengarah Papua.
6. *Peraturan Presiden Nomor 102 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 121 Tahun 2022 tentang Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua*, yang memperkuat peran, fungsi, dan mekanisme kerja Badan Pengarah Papua.
7. *Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2023 tentang Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)*, sebagai dokumen perencanaan jangka panjang percepatan pembangunan Papua (20 tahunan).
8. *Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025 tentang Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)*, sebagai pedoman operasional pelaksanaan RIPPP dalam jangka menengah dan tahunan (5 tahunan).
9. *Peraturan Ketua Badan Pengarah Papua Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengarah Papua*.
10. *Keputusan Presiden Nomor 15/M Tahun 2023 tentang Pengangkatan Keanggotaan Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua*.
11. *Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2025–2029*.
12. *Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah untuk Periode Tahun 2025–2029*.
13. *Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor 1 Tahun 2025 tentang Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus Provinsi Papua*.
14. *Peraturan Menteri Keuangan Nomor 33 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dalam rangka Otonomi Khusus*.



Bab II Keterkaitan

2.2 Keterkaitan Pelaksanaan Kinerja Tahun 2025 dengan Arah Kebijakan Pembangunan Papua

Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) Tahun 2022–2041 menetapkan visi pembangunan Papua, yaitu **“Terwujudnya Papua yang Mandiri, Adil, dan Sejahtera”**, yang dijabarkan ke dalam tiga misi utama pembangunan, yakni **Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif**. Ketiga misi tersebut menjadi kerangka strategis dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan percepatan pembangunan Papua, termasuk dalam pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Pengarah Papua**.

Sejalan dengan visi dan misi *RIPPP* tersebut, pelaksanaan kegiatan **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** pada **Tahun 2025** diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan melalui kegiatan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi* terhadap kebijakan serta program pembangunan Otonomi Khusus Papua. Dalam konteks **Papua Sehat**, peran **Badan Pengarah Papua** diwujudkan melalui fasilitasi koordinasi kebijakan dan program lintas sektor guna mendorong peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan, pemerataan tenaga kesehatan, serta penguatan sistem jaminan kesehatan bagi masyarakat.

Pada misi **Papua Cerdas**, kegiatan **Badan Pengarah Papua** berfokus pada penguatan sinkronisasi kebijakan di bidang pendidikan, termasuk fasilitasi penyelarasan perencanaan pembangunan pendidikan yang inklusif, peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan, pemerataan tenaga pendidik, serta dukungan terhadap afirmasi pendidikan bagi Orang Asli Papua. Upaya tersebut dilaksanakan untuk mendorong tercapainya masyarakat Papua yang berwawasan luas, cerdas, dan berdaya saing.

Sementara itu, dalam rangka mendukung misi **Papua Produktif**, **Badan Pengarah Papua** melaksanakan fungsi koordinasi dan harmonisasi kebijakan pembangunan ekonomi daerah, khususnya dalam penguatan ekonomi masyarakat adat dan ekonomi lokal, pengembangan sektor unggulan daerah, serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan. Kegiatan tersebut diarahkan untuk meningkatkan kemampuan bekerja dan berusaha masyarakat serta mendorong terciptanya pusat-pusat pertumbuhan ekonomi di wilayah **Papua Barat Daya**.

Selain mendukung pencapaian misi utama *RIPPP*, pelaksanaan kinerja **Badan Pengarah Papua Tahun 2025** juga memperhatikan **kondisi perlu, pengarusutamaan**, serta kaidah pelaksanaan pembangunan sebagaimana diatur dalam *RIPPP*. Hal ini tercermin melalui penguatan tata kelola pembangunan, perlindungan hak-hak masyarakat adat, harmonisasi sosial, pengarusutamaan gender dan sosial budaya, transformasi digital, serta peningkatan ketahanan terhadap risiko bencana dan perubahan iklim dalam setiap proses koordinasi dan rekomendasi kebijakan.

Selanjutnya, seluruh pelaksanaan kegiatan **Badan Pengarah Papua** pada **Tahun 2025** diselaraskan dengan *Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2025*. *RAPPP* menjadi pedoman operasional dalam memastikan keterkaitan antara arah kebijakan jangka panjang *RIPPP* dengan pelaksanaan program dan kegiatan tahunan, sehingga capaian kinerja **Badan Pengarah Papua Tahun 2025** dapat berkontribusi secara berkelanjutan terhadap pencapaian target pembangunan Papua hingga **Tahun 2041**.



Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025

3.1 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Sehat

Pelaksanaan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* pada **Misi Papua Sehat** sepanjang **Tahun 2025** dilaksanakan dengan memperhatikan kondisi awal indikator kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. Pada awal tahun 2025, capaian indikator **Umur Harapan Hidup (UHH)**, **prevalensi stunting**, **serta eliminasi malaria** pada kabupaten dan kota di **Provinsi Papua Barat Daya** secara rata-rata masih berada di bawah capaian rata-rata nasional. **Kabupaten Tambrau** dan **Maybrat** tercatat sebagai daerah dengan capaian indikator kesehatan terendah dibandingkan kabupaten lainnya dan **Kota Sorong**, sehingga menjadi fokus utama pelaksanaan pendampingan oleh **Pokja Sehat**.

Dalam rangka menindaklanjuti kondisi tersebut, **Pokja Sehat Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** melaksanakan berbagai upaya pendampingan dan evaluasi kebijakan sektor kesehatan di tingkat kabupaten/kota. Pada **Kabupaten Tambrau**, pendampingan difokuskan pada pengawalan peningkatan status **RS Tipe D Pratama Tambrau**, yang diawali dengan pelaksanaan proses *akreditasi rumah sakit* sebagai prasyarat peningkatan mutu layanan dan pengembangan kelas rumah sakit. Selain itu, dilakukan pendampingan kepada **Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak** dalam rangka *sinkronisasi program*, khususnya sinergi penurunan *prevalensi stunting* serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak.

Pada **Kabupaten Sorong Selatan**, **Pokja Sehat** melaksanakan pendampingan terhadap **Dinas Kesehatan** dan **RSUD Scholoo Keyen**, seiring diterimanya laporan mengenai kekosongan tenaga kesehatan, khususnya *dokter spesialis anak dan dokter spesialis obstetri dan ginekologi (SpOG)*, yang meninggalkan tempat tugas sebelum masa tugas berakhir. Permasalahan tersebut dipicu oleh keterlambatan pembayaran insentif dan jasa pelayanan kesehatan untuk bulan November dan Desember **Tahun 2024**, serta keterbatasan anggaran untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan. Kondisi ini menjadi perhatian dalam pelaksanaan *SHEK* guna mendorong koordinasi lintas sektor dan penyelesaian kebijakan pendanaan kesehatan.

Selanjutnya, pada **Kabupaten Maybrat**, **Pokja Sehat** melaksanakan evaluasi pelaksanaan *Otonomi Khusus* bidang kesehatan yang mengidentifikasi beberapa isu strategis, antara lain lemahnya sinergi pelayanan kesehatan akibat belum optimalnya pemanfaatan data, perlunya percepatan peningkatan kelas **RS Tipe D Pratama Maybrat** menuju Tipe C, serta upaya peningkatan mutu pelayanan dasar melalui percepatan akreditasi puskesmas.

Sementara itu, di **Kabupaten Sorong**, pelaksanaan evaluasi pembangunan dan *Otonomi Khusus* bidang kesehatan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Sorong mengungkapkan adanya ketidaksinkronan program kesehatan antara pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan kementerian/lembaga. Keterbatasan logistik menjadi salah satu faktor rendahnya capaian layanan *Cek Kesehatan Gratis*, serta belum adanya regulasi yang memadai menyebabkan terputusnya komunikasi lintas wilayah kabupaten, kota, dan provinsi dalam penanganan kasus penyakit yang bersifat lintas wilayah.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *SHEK Misi Papua Sehat* pada **Tahun 2025** diarahkan untuk memperkuat sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, meningkatkan koordinasi lintas sektor, serta mendorong perbaikan tata kelola dan mutu layanan kesehatan. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah strategis **Badan Pengarah Papua** dalam mendukung pencapaian sasaran **Papua Sehat** sebagaimana diamanatkan dalam *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)*.



Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025

3.2 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Cerdas

Pelaksanaan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* pada **Misi Papua Cerdas** sepanjang **Tahun 2025** diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas dan pemerataan layanan pendidikan di **Provinsi Papua Barat Daya**, khususnya dalam rangka peningkatan indikator **Harapan Lama Sekolah (HLS)** dan **Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)** yang masih berada di bawah rata-rata nasional pada sebagian besar kabupaten.

Dalam rangka mendorong peningkatan indikator **HLS dan RLS**, **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** melalui **Pokja Cerdas** melaksanakan pendampingan dan fasilitasi *SHEK* kepada pemerintah kabupaten/kota dengan fokus pada penguatan kebijakan pendidikan berbasis kebutuhan daerah. Salah satu upaya yang dilakukan adalah mendorong inisiasi pendidikan berbasis *Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)*, baik pada jenjang pendidikan menengah maupun pendidikan tinggi, sebagai alternatif percepatan peningkatan **HLS**, khususnya di **Kabupaten Tambrauw**.

Selain itu, pelaksanaan *SHEK Misi Papua Cerdas* juga diarahkan pada penguatan kualitas sumber daya manusia lokal melalui peningkatan kapasitas Bidan Kampung, sebagai bagian dari pendekatan pendidikan vokasi dan afirmasi berbasis kebutuhan riil masyarakat. Sejalan dengan hal tersebut, **Pokja Cerdas** menginisiasi revitalisasi pendidikan vokasi dan pelatihan vokasi, termasuk upaya mengaktifkan kembali **AKNESS** sebagai lembaga pendidikan Diploma II yang berbasis potensi lokal daerah dan menghasilkan tenaga kerja siap pakai.

Dalam rangka peningkatan mutu layanan pendidikan, **Pokja Cerdas** turut melaksanakan evaluasi dan pendampingan terkait peningkatan kualitas guru serta redistribusi guru, khususnya pada sekolah-sekolah swasta dan sekolah yang diselenggarakan oleh masyarakat. Upaya ini dilakukan sebagai respons terhadap dinamika distribusi guru pasca kebijakan nasional dan untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan di wilayah terpencil.

Pelaksanaan *SHEK Misi Papua Cerdas* juga mencakup inisiasi model pendidikan berbasis konteks lokal, antara lain pendidikan pola asrama di **Kabupaten Maybrat**, penguatan dan pengembangan Program Sekolah Sepanjang Hari (SSH) di Kabupaten Maybrat dan **Kabupaten Sorong Selatan**, serta inisiasi pelaksanaan SSH di **Kabupaten Tambrauw** sebagai bagian dari strategi percepatan peningkatan mutu dan durasi layanan pendidikan.

Selain aspek formal pendidikan, **Pokja Cerdas** turut menginisiasi dan mengidentifikasi strategi perlindungan dan revitalisasi bahasa serta budaya Papua di **Provinsi Papua Barat Daya**, sebagai bagian dari upaya menjaga identitas kultural dan mendukung pendidikan yang kontekstual dan inklusif.

Selanjutnya, pelaksanaan *SHEK* juga diarahkan pada penguatan perencanaan program pendidikan berbasis masalah, melalui pemanfaatan data dan hasil evaluasi Rapor Pendidikan sebagai dasar penyusunan kebijakan dan program intervensi pendidikan di tingkat daerah. Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas perencanaan, ketepatan sasaran program, serta mempercepat pencapaian target **Misi Papua Cerdas** sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP).



Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025

3.3 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Produktif

Pelaksanaan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* pada **Misi Papua Produktif** sepanjang **Tahun 2025** diarahkan untuk memperkuat fondasi ekonomi masyarakat, meningkatkan produktivitas daerah, serta mendukung pelaksanaan program strategis nasional dan daerah yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di **Provinsi Papua Barat Daya**. Pendekatan yang digunakan menekankan pada penguatan ekonomi lokal, ketahanan pangan, penciptaan nilai tambah, serta keterpaduan kebijakan pusat dan daerah.

Salah satu fokus utama pelaksanaan **SHEK Misi Papua Produktif** adalah pengawalan Program Nasional **Makan Bergizi Gratis (MBG)** sebagai program strategis yang memiliki efek berganda (*multiplier effect*) terhadap sektor ekonomi, ketahanan pangan, dan pemberdayaan masyarakat. **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** berperan aktif dalam mendorong sinkronisasi kebijakan dan kesiapan daerah melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, pemerintah daerah, TNI/Polri, serta pemangku kepentingan lainnya. Pelaksanaan **SHEK** difokuskan pada pembentukan dan penguatan Satuan Tugas MBG dan Satuan Tugas Ketahanan Pangan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota guna memastikan kesiapan kelembagaan, pendanaan, serta dukungan logistik.

Dalam rangka memperkuat keterlibatan ekonomi lokal, pelaksanaan **SHEK Misi Papua Produktif** juga diarahkan untuk mendorong partisipasi pelaku usaha lokal, UMKM, yayasan, serta organisasi keagamaan sebagai mitra dalam pelaksanaan program MBG, baik dalam penyediaan bahan pangan lokal, pengelolaan dapur sehat (SPPG), maupun distribusi logistik. Pendekatan ini diharapkan dapat menciptakan trigger effect pembangunan ekonomi melalui peningkatan permintaan terhadap komoditas lokal, penyerapan tenaga kerja, dan penguatan rantai pasok daerah.

Selain pengawalan program **MBG, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** juga melaksanakan **SHEK** dalam rangka penguatan ekonomi masyarakat melalui pendampingan dan fasilitasi pengembangan UMKM berbasis potensi lokal. Kegiatan tersebut meliputi identifikasi permasalahan usaha, fasilitasi koordinasi dengan perangkat daerah terkait, serta penguatan dukungan kebijakan untuk meningkatkan kapasitas produksi, legalitas usaha, dan perluasan akses pasar. Pendekatan ini diarahkan untuk mendukung peningkatan pendapatan masyarakat serta penurunan tingkat kemiskinan di wilayah **Papua Barat Daya**.

Pelaksanaan **SHEK Misi Papua Produktif** juga mencakup pengawalan terhadap program strategis lain yang beririsan dengan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, antara lain dukungan terhadap program pembangunan perumahan, penguatan konektivitas wilayah, serta penyelarasan kebijakan pembangunan infrastruktur dengan kebutuhan ekonomi lokal. Dalam konteks ini, **Badan Pengarah Papua** berperan memastikan agar perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan ekonomi daerah selaras dengan arah kebijakan nasional, Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP), serta Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).

Secara keseluruhan, pelaksanaan **SHEK Misi Papua Produktif** pada **Tahun 2025** tidak hanya difokuskan pada pengawalan program, tetapi juga pada penguatan tata kelola, koordinasi lintas sektor, dan keberlanjutan kebijakan. Upaya tersebut menjadi bagian penting dalam mendorong terwujudnya **Papua Produktif**, yakni masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja dan berusaha, ekonomi lokal yang berdaya saing, serta pemanfaatan sumber daya daerah yang optimal dan berkelanjutan.



Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025

3.4 Pelaksanaan Tusi SHEK Misi Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)/Damai

Pelaksanaan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* pada **Misi Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Papua Damai)** sepanjang **Tahun 2025** tetap dilaksanakan meskipun secara kelembagaan Pokja khusus Polhukam belum terbentuk di Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya. Dalam pelaksanaannya, fungsi *SHEK* pada misi ini dijalankan secara lintas misi, terutama melalui **Pokja Produktif**, sebagai bentuk adaptasi kelembagaan guna memastikan isu stabilitas keamanan dan kedamaian tetap terkelola dengan baik.

Dalam kerangka tersebut, pelaksanaan *SHEK Misi Papua Damai* diarahkan untuk mendorong perubahan paradigma keamanan, dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan kesejahteraan, dialog sosial, dan pembangunan berbasis keadilan. Pendekatan ini dipandang penting untuk menciptakan stabilitas wilayah yang berkelanjutan sebagai prasyarat percepatan pembangunan di **Provinsi Papua Barat Daya**.

Salah satu fokus utama pelaksanaan *SHEK* pada misi ini adalah **pengawasan isu keamanan dan stabilitas di Kabupaten Maybrat**. Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengawal aspirasi Pemerintah Daerah Kabupaten Maybrat terkait kebutuhan pembiayaan keamanan agar dapat dialihkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Kementerian Pertahanan. Selain itu, dilakukan pengusulan evaluasi penempatan Satuan Tugas TNI/Polri pada wilayah-wilayah yang telah berangsur kondusif, serta mendorong pendekatan jaminan keamanan bagi guru, tenaga kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam rangka penanganan wilayah konflik di **Papua Barat Daya**, khususnya di **Kabupaten Maybrat**, pelaksanaan *SHEK* dilakukan melalui dialog langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, kepala distrik, serta masyarakat terdampak konflik. Dari proses tersebut, dihimpun berbagai isu strategis di wilayah Aifat Timur, Aifat Selatan, dan Aifat, antara lain eksodus warga, trauma sosial, serta terganggunya layanan dasar. **Badan Pengarah Papua** turut mengawal usulan pemulangan warga eksodus dan program pemulihan pascakonflik, serta melakukan kajian awal terhadap usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Aifat Timur sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang dalam peningkatan pelayanan publik.

Selain itu, pelaksanaan *SHEK Misi Papua Damai* juga mencakup fasilitasi infrastruktur strategis dan konektivitas, khususnya pembangunan jalan strategis Susumuk–Bintuni (**Kabupaten Maybrat**) dan Mare–Feef (**Kabupaten Tambrauw**). Dalam konteks ini, Badan Pengarah Papua berperan dalam mengawal penyelesaian persoalan hak ulayat dan status lahan (*clean and clear*), serta mengoordinasikan dukungan keamanan bagi kelancaran pembangunan infrastruktur strategis.

Pengelolaan isu sosial-politik strategis juga menjadi bagian dari pelaksanaan *SHEK*, antara lain pengawasan aspirasi terkait sengketa tiga pulau di **Kabupaten Raja Ampat** (Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas), serta mendorong harmonisasi kebijakan politik Orang Asli Papua (OAP) sesuai amanat Undang-Undang Otonomi Khusus.

Sebagai bagian dari *pendekatan humanis dan penguatan kepercayaan publik*, **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** melaksanakan forum-forum *SHEK* dan dialog lintas suku secara berkala, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan di wilayah konflik seperti Aifat (Maybrat), serta membangun kolaborasi dengan gereja dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), termasuk dalam mendukung pembangunan infrastruktur strategis.



Bab III Pelaksanaan Tusi Tahun 2025

3.5 Pelaksanaan Tusi SHEK Strategis Lainnya (Tata Kelola Pemerintahan, dsb)

Pelaksanaan *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* strategis lainnya pada **Tahun 2025** diarahkan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas perencanaan dan penganggaran pembangunan, serta memastikan pengarusutamaan isu-isu strategis lintas sektor dalam rangka percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus di **Provinsi Papua Barat Daya**.

Dalam aspek **tata kelola dan perencanaan pembangunan, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** melaksanakan pendampingan dan evaluasi terhadap proses perencanaan dan penganggaran daerah, termasuk review Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan ini bertujuan untuk memastikan keselarasan program dan kegiatan daerah dengan arah kebijakan nasional, *Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)*, *Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)*, serta kebijakan efisiensi anggaran.

Pelaksanaan *SHEK* strategis lainnya juga mencakup pengawalan terhadap penyaluran Dana Transfer ke Daerah (TKD) agar tepat waktu, tepat sasaran, dan selaras dengan prioritas pembangunan Otonomi Khusus. Dalam konteks ini, **Badan Pengarah Papua** berperan memfasilitasi koordinasi antara pemerintah daerah dan kementerian/lembaga terkait guna meminimalkan risiko keterlambatan penyaluran, ketidaksesuaian perencanaan, maupun potensi duplikasi program.

Selain itu, **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** turut melaksanakan *SHEK* dalam rangka penguatan mekanisme perencanaan partisipatif, termasuk fasilitasi dan koordinasi persiapan *Musyawarah Perencanaan Pembangunan Otonomi Khusus (Musrenbang Otsus)*. Kegiatan ini diarahkan untuk memastikan bahwa aspirasi daerah dan masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP), terintegrasi dalam perencanaan pembangunan yang berbasis kebutuhan dan karakteristik wilayah.

Dalam rangka pengarusutamaan isu strategis lintas sektor, pelaksanaan *SHEK* juga diarahkan pada penguatan perlindungan masyarakat adat, kesetaraan gender, sosial budaya, serta harmonisasi sosial. **Badan Pengarah Papua** berperan mendorong integrasi prinsip-prinsip tersebut ke dalam kebijakan dan program pembangunan daerah agar pelaksanaan *Otonomi Khusus* Papua berjalan secara inklusif dan berkeadilan.

Pelaksanaan *SHEK* strategis lainnya juga mencakup penguatan komunikasi publik dan diseminasi kebijakan, melalui koordinasi dengan media dan pemangku kepentingan terkait. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman publik terhadap kebijakan *Otonomi Khusus*, peran **Badan Pengarah Papua**, serta program-program strategis pemerintah, sehingga dapat membangun kepercayaan publik dan dukungan masyarakat terhadap percepatan pembangunan di **Provinsi Papua Barat Daya**.

Secara keseluruhan, pelaksanaan *SHEK* strategis lainnya pada Tahun 2025 menjadi fondasi penting dalam memastikan ***konsistensi kebijakan, efektivitas pelaksanaan program, serta keberlanjutan pembangunan Otonomi Khusus Papua***. Penguatan tata kelola, perencanaan yang berkualitas, dan pengarusutamaan isu strategis lintas sektor diharapkan mampu mendukung pencapaian sasaran pembangunan Papua secara terintegrasi dan berkelanjutan.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

4.1 Capaian Papua Sehat

Capaian kinerja Papua Sehat pada Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan **sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)** yang dilakukan oleh **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** dalam mendukung percepatan pembangunan sektor kesehatan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Capaian ini dinilai berdasarkan indikator Papua Sehat sebagaimana ditetapkan dalam **Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP)** dan dijabarkan lebih lanjut dalam **Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)**.

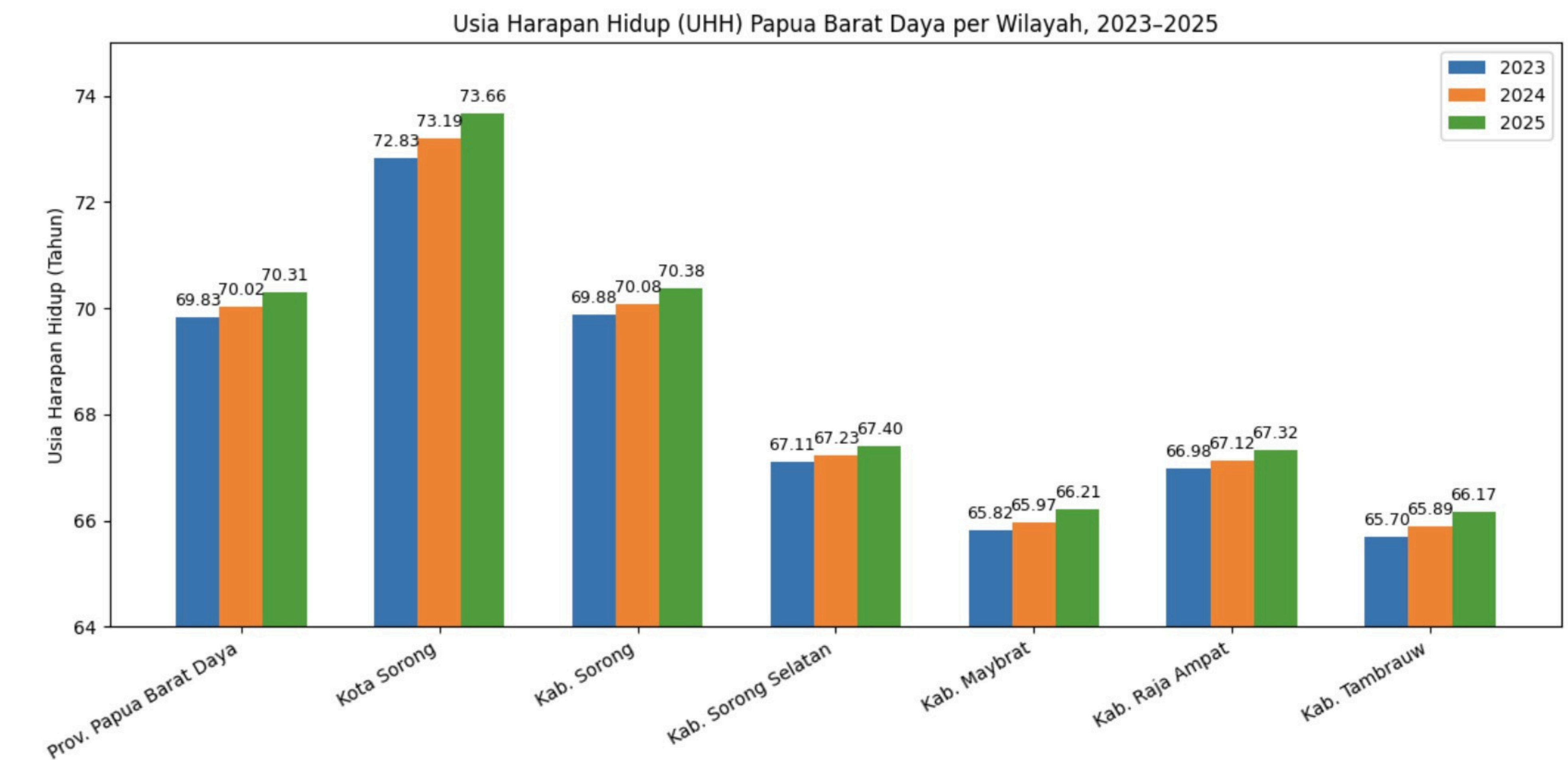
Sesuai dengan kerangka **RIPPP**, terdapat **tiga indikator utama Papua Sehat, yaitu Umur Harapan Hidup (UHH), prevalensi stunting, dan eliminasi malaria**, yang digunakan untuk mengukur derajat kesehatan masyarakat serta efektivitas pembangunan sektor kesehatan di wilayah Papua. Ketiga indikator tersebut menjadi dasar dalam melakukan pemantauan dan evaluasi capaian pembangunan kesehatan di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Evaluasi capaian Papua Sehat pada Tahun 2025 dilakukan dengan memperhatikan perkembangan indikator-indikator tersebut secara temporal, perbandingan antarwilayah, serta kesenjangan terhadap capaian nasional. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai kemajuan pembangunan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya, sekaligus mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan intervensi kebijakan ke depan.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, capaian Papua Sehat pada Tahun 2025 menunjukkan adanya perbaikan secara bertahap, meskipun masih terdapat indikator yang belum mencapai kondisi optimal. Oleh karena itu, pada bagian ini disajikan capaian kinerja Papua Sehat berdasarkan masing-masing indikator utama RIPPP, sebagai dasar perumusan langkah strategis dan rekomendasi kebijakan pada periode selanjutnya.

Usia Harapan Hidup (UHH)

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Usia Harapan Hidup (UHH) (tahun) Sumber: Badan Pusat Statistik	Provinsi Papua Barat Daya	69.83	70.02	70.31
	Kota Sorong	72.83	73.19	73.66
	Kabupaten Sorong	69.88	70.08	70.38
	Kabupaten Sorong Selatan	67.11	67.23	67.40
	Kabupaten Maybrat	65.82	65.97	66.21
	Kabupaten Raja Ampat	66.98	67.12	67.32
	Kabupaten Tambrau	65.70	65.89	66.17



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

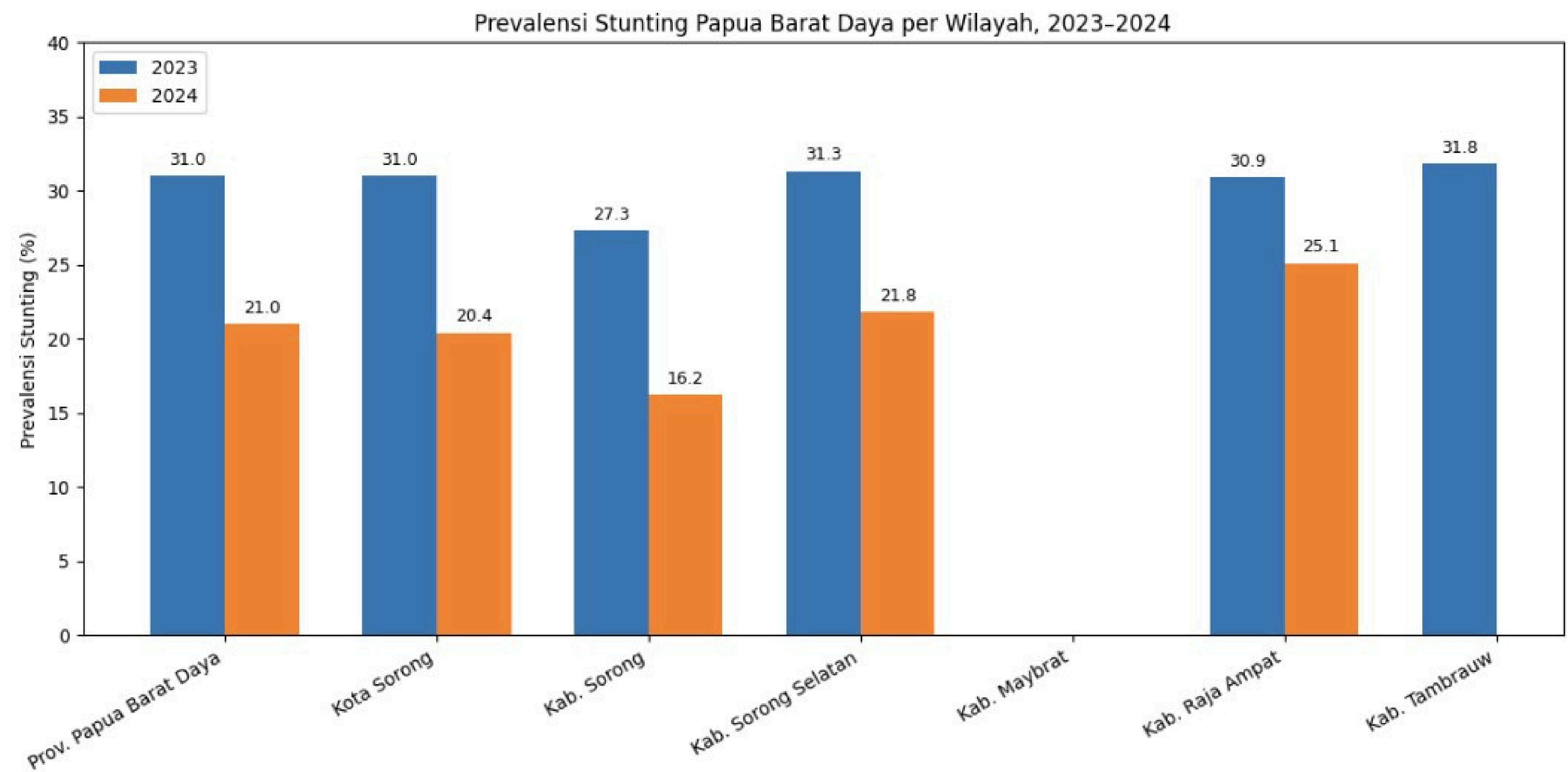
Capaian Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten selama periode Tahun 2023–2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, UHH Provinsi Papua Barat Daya meningkat dari 69,83 tahun pada Tahun 2023, menjadi 70,02 tahun pada Tahun 2024, dan mencapai 70,31 tahun pada Tahun 2025. Tren ini mencerminkan adanya perbaikan bertahap dalam derajat kesehatan masyarakat serta peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan di wilayah Papua Barat Daya.

Secara kabupaten/kota, Kota Sorong mencatat capaian UHH tertinggi, yaitu meningkat dari 72,83 tahun (2023) menjadi 73,66 tahun (2025), yang menunjukkan kondisi layanan kesehatan relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Sementara itu, kabupaten lain juga menunjukkan tren peningkatan, meskipun dengan capaian yang masih relatif rendah. Kabupaten Sorong meningkat dari 69,88 tahun menjadi 70,38 tahun, Kabupaten Sorong Selatan dari 67,11 tahun menjadi 67,40 tahun, Kabupaten Raja Ampat dari 66,98 tahun menjadi 67,32 tahun, Kabupaten Maybrat dari 65,82 tahun menjadi 66,21 tahun, serta Kabupaten Tambrauw dari 65,70 tahun menjadi 66,17 tahun.

Meskipun capaian UHH di seluruh kabupaten/kota menunjukkan arah yang positif, kesenjangan antarwilayah masih cukup terlihat, khususnya antara Kota Sorong dan kabupaten-kabupaten dengan kondisi geografis yang sulit dijangkau. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi kesehatan yang lebih terarah dan berkeadilan guna mempercepat peningkatan UHH di wilayah dengan capaian terendah.

Prevalensi Stunting

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Prevalensi Stunting (%) Sumber: Kementerian Kesehatan, Survei Kesehatan Indonesia Tahun 2023 & Survei Status Gizi Indonesia 2024	Provinsi Papua Barat Daya	31.00	21.00	Belum Rilis
	Kota Sorong	31.00	20.40	Belum Rilis
	Kabupaten Sorong	27.30	16.20	Belum Rilis
	Kabupaten Sorong Selatan	31.30	21.80	Belum Rilis
	Kabupaten Maybrat	-	-	Belum Rilis
	Kabupaten Raja Ampat	30.90	25.10	Belum Rilis
	Kabupaten Tambrauw	31.80	-	Belum Rilis



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian penurunan prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan pada periode Tahun 2023–2024, meskipun masih berada pada tingkat yang relatif tinggi. Berdasarkan data Kementerian Kesehatan melalui Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023 dan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) Tahun 2024, prevalensi stunting Provinsi Papua Barat Daya mengalami penurunan dari 31,00% pada Tahun 2023 menjadi 21,00% pada Tahun 2024.

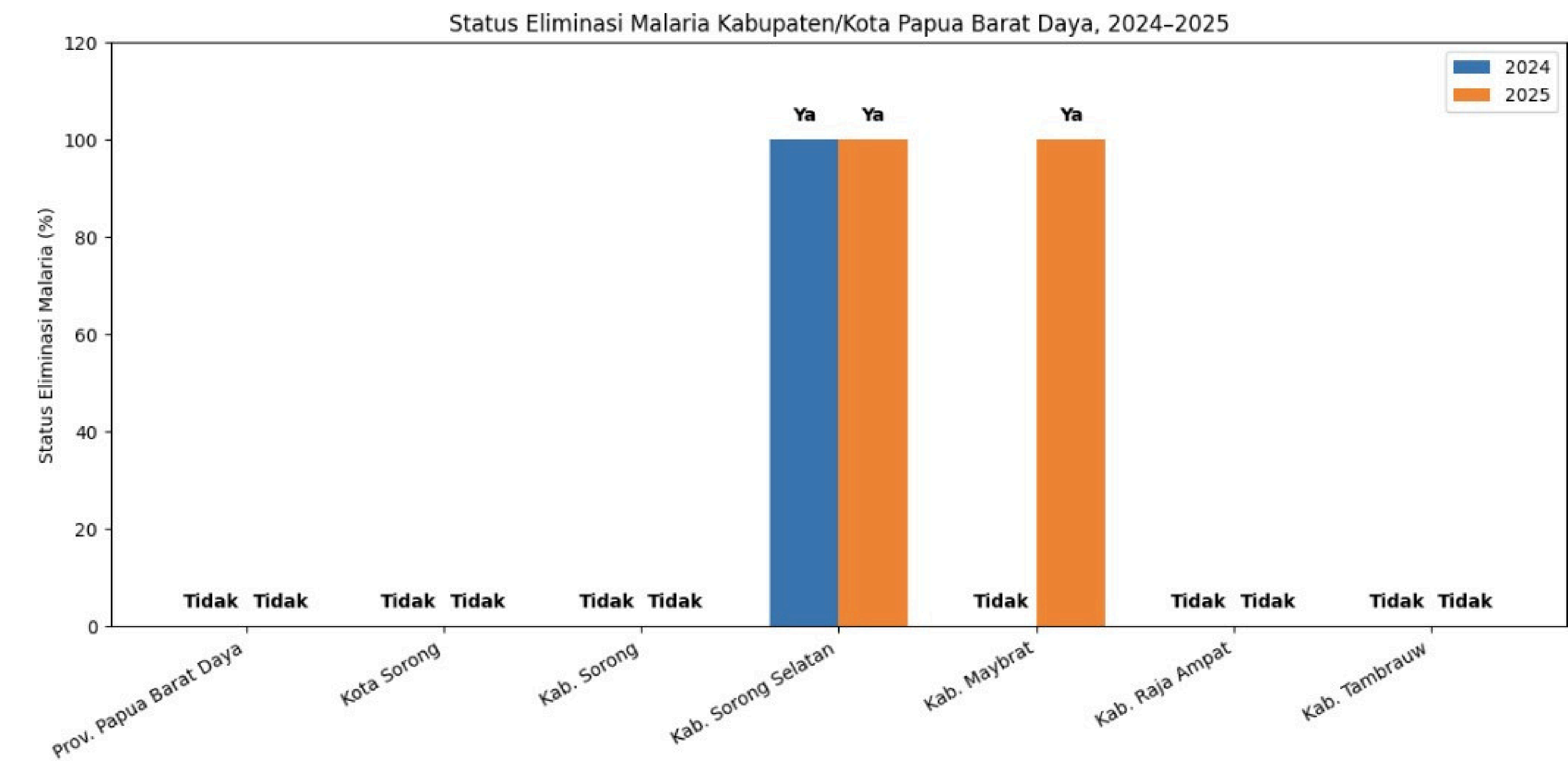
Penurunan prevalensi stunting juga terjadi di hampir seluruh kabupaten/kota. Kota Sorong menurun dari 31,00% menjadi 20,40%, Kabupaten Sorong dari 27,30% menjadi 16,20%, Kabupaten Sorong Selatan dari 31,30% menjadi 21,80%, serta Kabupaten Raja Ampat dari 30,90% menjadi 25,10%. Sementara itu, data prevalensi stunting untuk Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau masih belum tersedia secara lengkap, sehingga memerlukan penguatan sistem pendataan dan pemutakhiran informasi.

Untuk Tahun 2025, data prevalensi stunting di Provinsi Papua Barat Daya dan kabupaten/kota belum dirilis, sehingga evaluasi capaian dilakukan berdasarkan tren dua tahun sebelumnya. Meskipun menunjukkan penurunan yang cukup signifikan, capaian prevalensi stunting tersebut masih berada di atas target nasional, sehingga diperlukan penguatan intervensi lintas sektor, khususnya pada aspek kesehatan ibu dan anak, sanitasi, gizi, serta sinergi program perlindungan perempuan dan anak.

Pada aspek penanganan stunting, praktik baik (best practice) yang dilaksanakan oleh Kabupaten Sorong dalam menurunkan prevalensi stunting menjadi salah satu model penanganan yang akan direplikasi dan ditawarkan oleh Pokja Sehat BPP kepada kabupaten/kota lain yang belum menunjukkan progres penanganan stunting secara signifikan.

Eliminasi Malaria

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Eliminasi Malaria (Kab/Kota) Sumber: Dinas Kesehatan Setempat	Provinsi Papua Barat Daya	-	Tidak	Tidak
	Kota Sorong	-	Tidak	Tidak
	Kabupaten Sorong	-	Tidak	Tidak
	Kabupaten Sorong Selatan	-	Ya	Ya
	Kabupaten Maybrat	-	Tidak	Ya
	Kabupaten Raja Ampat	-	Tidak	Tidak
	Kabupaten Tambrau	-	Tidak	Tidak



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian eliminasi malaria di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan perkembangan yang masih bervariasi antarwilayah. Berdasarkan data Dinas Kesehatan setempat, hingga Tahun 2024–2025, Provinsi Papua Barat Daya secara umum belum mencapai status eliminasi malaria. Kondisi serupa juga terjadi di Kota Sorong dan sebagian besar kabupaten lainnya.

Namun demikian, terdapat kemajuan di beberapa wilayah. Kabupaten Sorong Selatan telah mencapai status eliminasi malaria pada Tahun 2024 dan mampu mempertahankannya hingga Tahun 2025. Selain itu, Kabupaten Maybrat menunjukkan perkembangan positif dengan capaian eliminasi malaria pada Tahun 2025, meskipun pada tahun sebelumnya belum mencapai status tersebut.

Sebaliknya, Kabupaten Sorong, Kabupaten Raja Ampat, dan Kabupaten Tambrau masih belum mencapai status eliminasi malaria hingga Tahun 2025. Hal ini menunjukkan bahwa upaya penanggulangan malaria masih menghadapi tantangan, terutama terkait kondisi geografis, mobilitas penduduk, keterbatasan sumber daya kesehatan, serta keberlanjutan program pengendalian penyakit menular.

Capaian Lainnya

Selain capaian berdasarkan indikator utama Papua Sehat sebagaimana ditetapkan dalam RIPP, terdapat sejumlah capaian penting lainnya pada Tahun 2025 yang berkontribusi terhadap penguatan sistem layanan kesehatan dan perlindungan sosial di Provinsi Papua Barat Daya.

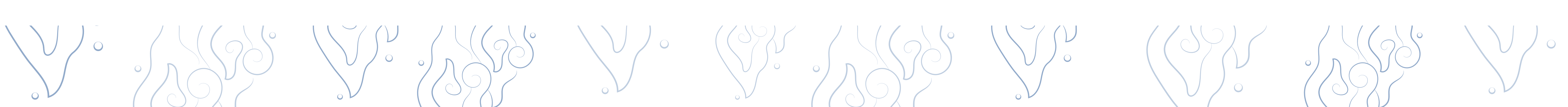
Pada aspek peningkatan mutu layanan kesehatan rujukan, Rumah Sakit Tipe D Pratama Tambrau berhasil memperoleh status akreditasi dengan predikat “Paripurna”. Capaian ini menjadi tonggak penting dalam peningkatan kualitas layanan rumah sakit serta menjadi dasar penguatan kelembagaan dan pengembangan status rumah sakit ke depan.

Dalam rangka penguatan perlindungan perempuan dan anak, Pokja Sehat Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya melaksanakan sinkronisasi program lintas sektor dan memberikan penguatan materi pembangunan bidang pemberdayaan perempuan. Hasil dari proses tersebut adalah terbentuknya Tim Terpadu Keliling Pelayanan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan di Kabupaten Tambrau, yang diharapkan dapat meningkatkan akses layanan perlindungan bagi kelompok rentan, khususnya di wilayah terpencil.

Pada Kabupaten Sorong Selatan, pelaksanaan SHEK menghasilkan capaian konkret melalui koordinasi dengan Direktorat Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan, yang menghasilkan kesepakatan penempatan dokter spesialis di daerah tersebut. Selain itu, koordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sorong Selatan mendorong percepatan pembayaran insentif dokter dan tenaga kesehatan, sehingga dapat mencegah terhentinya pelayanan kesehatan di RSUD Scholoo Keyen.

Sementara itu, di Kabupaten Maybrat, terdapat komitmen kuat dari pimpinan daerah, yang diwakili oleh Wakil Bupati Maybrat, dalam upaya peningkatan status rumah sakit serta perbaikan pelayanan kesehatan tingkat pertama (puskesmas). Komitmen tersebut diwujudkan melalui instruksi langsung kepada Dinas Kesehatan dan jajarannya untuk melakukan konsultasi dan pendampingan bersama Pokja Sehat BP3OKP guna mempercepat peningkatan mutu layanan kesehatan.

Secara keseluruhan, capaian Papua Sehat pada Tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan yang nyata, baik pada indikator utama RIPP maupun pada penguatan sistem dan tata kelola layanan kesehatan di Provinsi Papua Barat Daya. Penurunan prevalensi stunting, capaian eliminasi malaria pada beberapa wilayah, serta peningkatan mutu layanan kesehatan menjadi fondasi penting dalam percepatan pembangunan sektor kesehatan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan intervensi kebijakan yang lebih terintegrasi, khususnya untuk mempercepat peningkatan Umur Harapan Hidup dan pemerataan layanan kesehatan antarwilayah, sebagai bagian dari upaya berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran Papua Sehat yakni tercapainya kehidupan yang sehat bagi seluruh penduduk.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

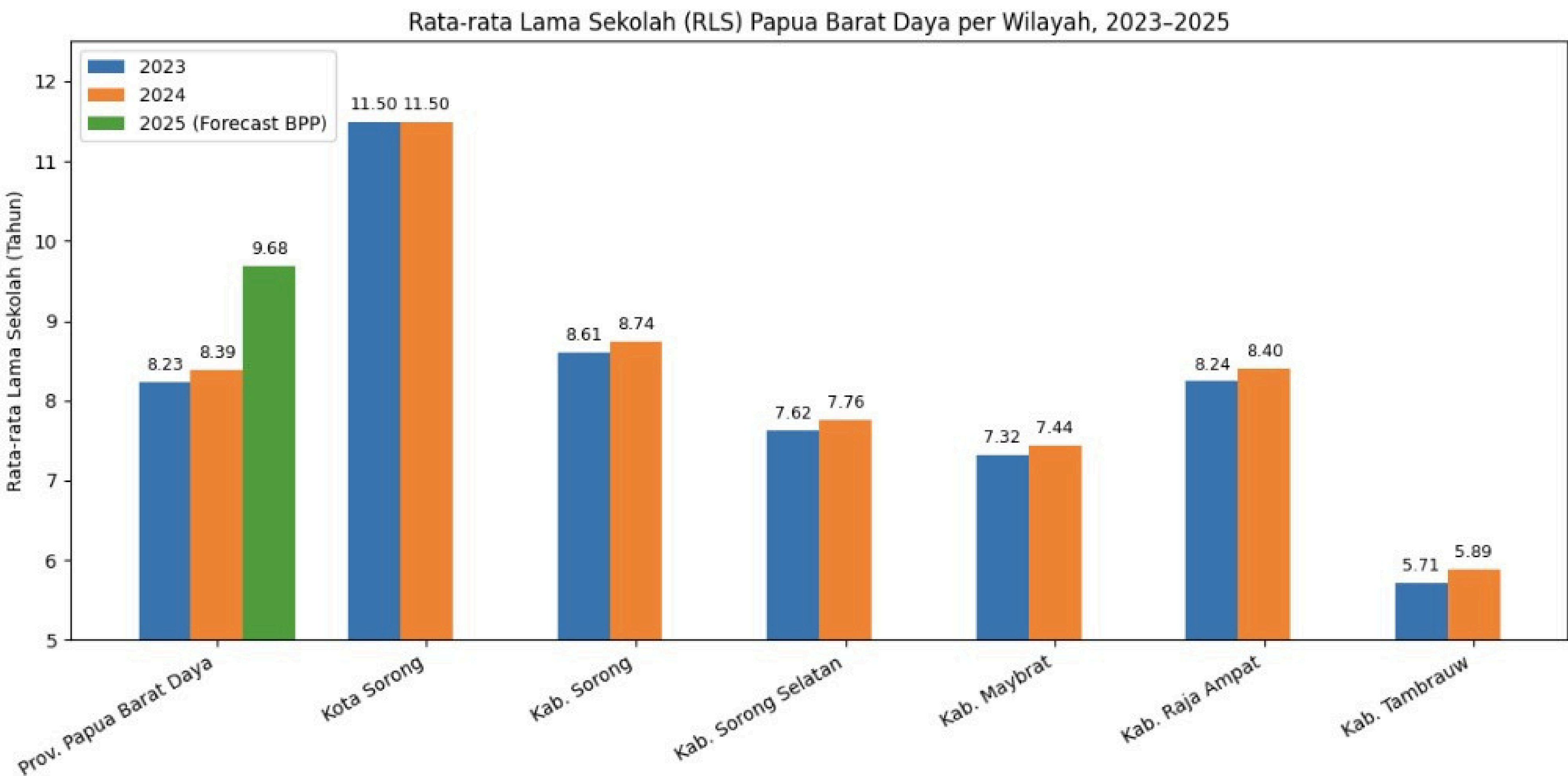
4.2 Capaian Papua Cerdas

Capaian kinerja Papua Cerdas pada Tahun 2025 merupakan hasil dari pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) yang dilakukan oleh Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya dalam mendukung percepatan pembangunan sektor pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Orang Asli Papua. Capaian ini dinilai berdasarkan indikator Papua Cerdas sebagaimana ditetapkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan dijabarkan lebih lanjut dalam Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP).

Sesuai dengan kerangka RIPPP, indikator utama Papua Cerdas difokuskan pada Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) sebagai ukuran utama keberhasilan pembangunan pendidikan. Kedua indikator tersebut digunakan untuk menggambarkan capaian pendidikan masyarakat secara aktual maupun proyeksi kesempatan pendidikan yang akan ditempuh oleh penduduk usia sekolah.

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) Sumber: Badan Pusat Statistik & Forecasting (Diolah BPP)	Provinsi Papua Barat Daya	8.23	8.39	9.68 Forecasting (Diolah BPP) BPS Belum Rilis
	Kota Sorong	11.50	11.50	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Sorong	8.61	8.74	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Sorong Selatan	7.62	7.76	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Maybrat	7.32	7.44	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Raja Ampat	8.24	8.40	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Tambrau	5.71	5.89	BPS Belum Rilis



Capaian Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan tren peningkatan selama periode Tahun 2023–2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik serta hasil pengolahan dan proyeksi oleh Badan Pengarah Papua, RLS Provinsi Papua Barat Daya meningkat dari 8,23 tahun pada Tahun 2023 menjadi 8,39 tahun pada Tahun 2024, dan diproyeksikan mencapai 9,68 tahun pada Tahun 2025. Peningkatan ini mencerminkan adanya kemajuan dalam akses dan partisipasi masyarakat terhadap layanan pendidikan.

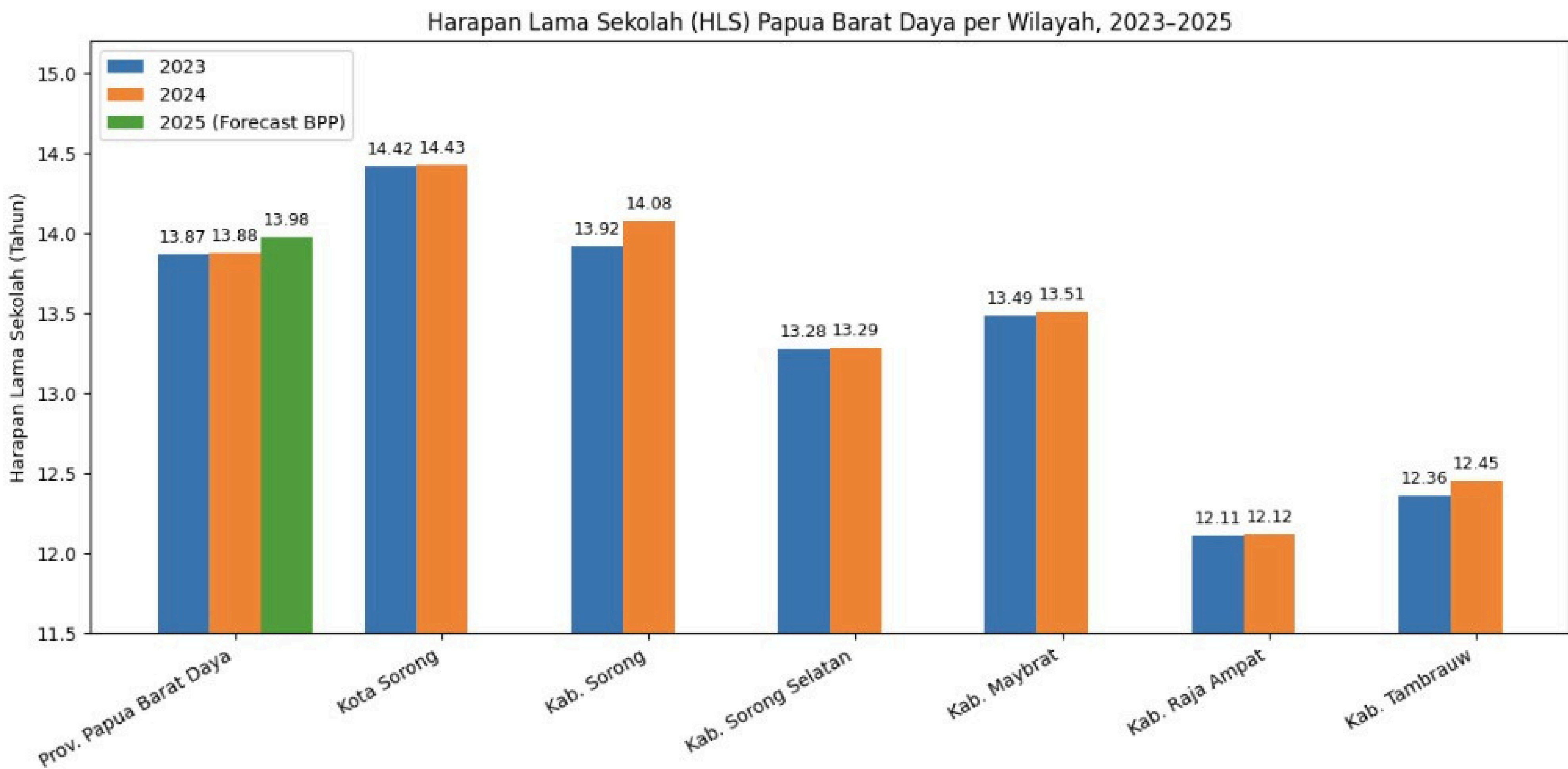
Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Secara kabupaten/kota, **Kota Sorong mencatat capaian RLS tertinggi, yaitu sebesar 11,50 tahun pada Tahun 2023 dan 2024**, yang menunjukkan tingkat partisipasi pendidikan relatif lebih baik dibandingkan wilayah lainnya. Kabupaten Sorong mengalami peningkatan dari **8,61 tahun menjadi 8,74 tahun**, **Kabupaten Sorong Selatan dari 7,62 tahun menjadi 7,76 tahun**, **Kabupaten Maybrat dari 7,32 tahun menjadi 7,44 tahun**, **Kabupaten Raja Ampat dari 8,24 tahun menjadi 8,40 tahun**, serta **Kabupaten Tambrau dari 5,71 tahun menjadi 5,89 tahun**.

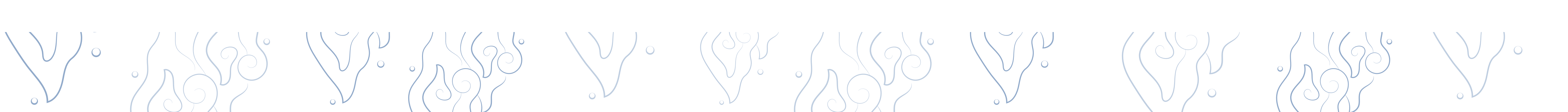
Meskipun menunjukkan tren peningkatan, capaian RLS antarwilayah masih memperlihatkan kesenjangan yang cukup signifikan, terutama antara wilayah perkotaan dan kabupaten dengan tantangan geografis serta keterbatasan akses pendidikan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan intervensi kebijakan pendidikan yang lebih terarah dan afirmatif untuk meningkatkan lama sekolah di wilayah dengan capaian terendah.

Harapan Lama Sekolah (HLS)

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Harapan Lama Sekolah (HLS) Sumber: Badan Pusat Statistik & Forecasting (Diolah BPP)	Provinsi Papua Barat Daya	13.87	13.88	13.98 Forecasting (Diolah BPP) BPS Belum Rilis
	Kota Sorong	14.42	14.43	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Sorong	13.92	14.08	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Sorong Selatan	13.28	13.29	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Maybrat	13.49	13.51	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Raja Ampat	12.11	12.12	BPS Belum Rilis
	Kabupaten Tambrau	12.36	12.45	BPS Belum Rilis



Capaian Harapan Lama Sekolah (HLS) di Provinsi Papua Barat Daya relatif stabil dan menunjukkan kecenderungan meningkat. Berdasarkan data **Badan Pusat Statistik** serta hasil forecasting yang diolah oleh **Badan Pengarah Papua**, HLS Provinsi Papua Barat Daya meningkat dari **13,87 tahun pada Tahun 2023 menjadi 13,88 tahun pada Tahun 2024**, dan **diproyeksikan mencapai 13,98 tahun pada Tahun 2025**. Capaian ini menggambarkan adanya peluang pendidikan yang semakin terbuka bagi penduduk usia sekolah.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Pada tingkat kabupaten/kota, **Kota Sorong memiliki capaian HLS tertinggi, yaitu 14,42 tahun pada Tahun 2023 dan 14,43 tahun pada Tahun 2024.** Kabupaten Sorong mengalami peningkatan dari **13,92 tahun menjadi 14,08 tahun, Kabupaten Sorong Selatan dari 13,28 tahun menjadi 13,29 tahun, Kabupaten Maybrat dari 13,49 tahun menjadi 13,51 tahun, Kabupaten Raja Ampat dari 12,11 tahun menjadi 12,12 tahun, serta Kabupaten Tambrauw dari 12,36 tahun menjadi 12,45 tahun.**

Meskipun capaian HLS menunjukkan tren yang positif, kesenjangan antarwilayah masih terlihat, khususnya pada **kabupaten dengan kondisi geografis terpencil.** Hal ini mengindikasikan **perlunya penguatan kebijakan perluasan akses pendidikan menengah dan tinggi, termasuk melalui skema afirmasi dan pendekatan pendidikan berbasis konteks lokal.**

Capaian Lainnya

Selain capaian indikator utama Papua Cerdas, terdapat sejumlah capaian strategis lainnya pada Tahun 2025 yang mendukung penguatan tata kelola dan akses layanan pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya.

Salah satu capaian kebijakan penting adalah **pengawasan isu kekosongan guru pada sekolah yayasan sebagai dampak rekrutmen guru PPPK,** mengingat sebagian besar peserta didik, khususnya Orang Asli Papua (OAP), bersekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat. Isu tersebut dibawa oleh Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya ke tingkat pemerintah pusat dan menghasilkan terbitnya **Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 1 Tahun 2025 tentang redistribusi guru ASN pada sekolah swasta/yayasan,** yang memberikan dasar hukum penempatan guru PPPK di sekolah yayasan. Namun demikian, implementasi kebijakan ini masih memerlukan tindak lanjut, khususnya terkait sinkronisasi sistem IMUT dengan data sekolah swasta.

Pada aspek peningkatan akses pendidikan, **telah disusun dokumen konsep Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)** dan dilakukan inisiasi kerja sama dengan perguruan tinggi swasta di Kota Sorong, yang telah mengusulkan kurikulum RPL sebagai bagian dari upaya percepatan peningkatan Harapan Lama Sekolah (HLS).

Di bidang pendidikan vokasi, **revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi dilaksanakan melalui SHEK dan pendampingan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya ke kementerian/lembaga terkait.** Selain itu, telah diinisiasi **nota kesepahaman (MoU) dengan Universitas Papua (UNIPA)** sebagai perguruan tinggi pembina, serta diagendakan penyusunan Masterplan Akademi Komunitas Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2026, termasuk persiapan penerimaan mahasiswa baru AKNESS di Kabupaten Sorong Selatan.

Pengembangan pendidikan berpola asrama juga didorong pada Tahun 2025, khususnya melalui penyiapan SMA berpola asrama di Kabupaten Tambrauw dan penguatan pendidikan asrama di Kabupaten Maybrat. Sementara itu, pelaksanaan **Sekolah Sepanjang Hari (SSH)** mengalami penambahan lokus pada Tahun 2025 dan direncanakan diperluas pada Tahun 2026 di wilayah **IMEKKO,** yang memiliki angka anak putus sekolah (APUS) tinggi.

Selain itu, **Badan Pengarah Papua se-Tanah Papua melaksanakan Pra-Rapat Koordinasi Teknis Pelestarian Bahasa dan Budaya pada akhir Tahun 2025 bersama Badan Bahasa Nasional,** sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Rakontek Bahasa dan Budaya di seluruh provinsi di Tanah Papua. Pokja Papua Cerdas juga melaksanakan SHEK kepada perangkat daerah teknis, termasuk pendampingan pada tahapan Musrenbang hingga pelaksanaan monitoring dan evaluasi, meskipun masih diperlukan pengembangan format evaluasi yang lebih baku dan terstandar.

Secara keseluruhan, capaian Papua Cerdas pada Tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan bertahap dalam peningkatan akses dan kualitas pendidikan di Provinsi Papua Barat Daya. Peningkatan Rata-Rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah, penguatan kebijakan redistribusi guru melalui penempatan guru PPPK pada sekolah yayasan, serta pengembangan pendidikan vokasi, RPL, pendidikan berpola asrama, dan Sekolah Sepanjang Hari menjadi fondasi penting dalam percepatan pembangunan sektor pendidikan. Namun demikian, masih diperlukan penguatan tindak lanjut kebijakan dan intervensi afirmatif yang lebih terintegrasi untuk mengurangi kesenjangan antarwilayah dan memastikan peningkatan kualitas pendidikan yang merata dan berkelanjutan sesuai sasaran Papua Cerdas dalam RIPPP.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

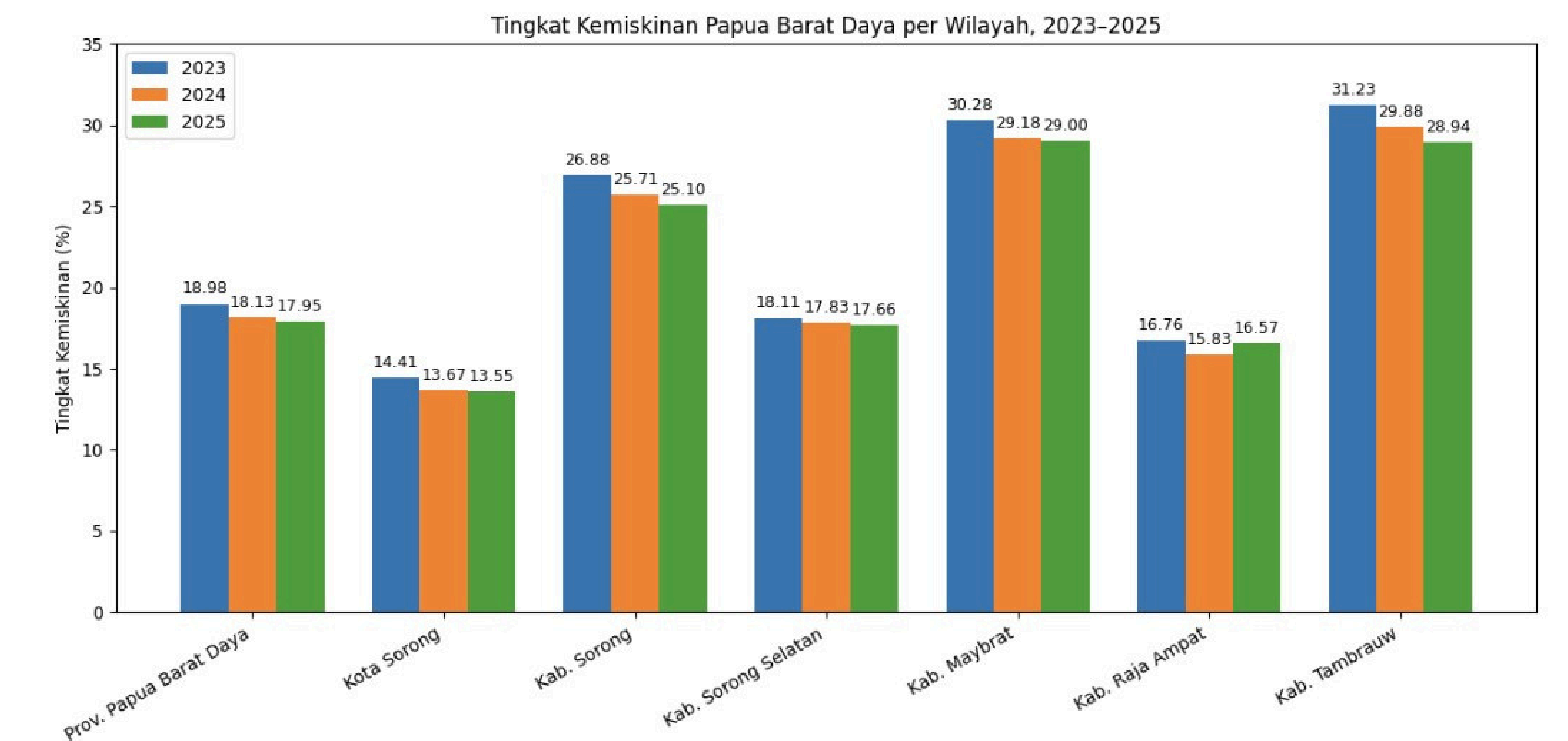
4.3 Capaian Papua Produktif

Capaian kinerja Papua Produktif pada Tahun 2025 menggambarkan perkembangan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya sebagai hasil dari pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK) oleh Badan Pengarah Papua. Penilaian capaian Papua Produktif dilakukan berdasarkan indikator ekonomi utama sebagaimana diarahkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP), yang mencerminkan kemampuan masyarakat untuk bekerja, berusaha, dan meningkatkan kesejahteraan.

Dalam laporan ini, capaian Papua Produktif diukur melalui tiga indikator utama, yaitu tingkat kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, dan realisasi investasi, yang secara bersama-sama mencerminkan dinamika ekonomi, pasar kerja, serta iklim investasi di Provinsi Papua Barat Daya.

Tingkat Kemiskinan

Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Kemiskinan (%) Sumber: Badan Pusat Statistik	Provinsi Papua Barat Daya	18.98	18.13	17.95
	Kota Sorong	14.41	13.67	13.55
	Kabupaten Sorong	26.88	25.71	25.10
	Kabupaten Sorong Selatan	18.11	17.83	17.66
	Kabupaten Maybrat	30.28	29.18	29.00
	Kabupaten Raja Ampat	16.76	15.83	16.57
	Kabupaten Tambrau	31.23	29.88	28.94



Capaian tingkat kemiskinan di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan tren penurunan yang konsisten selama periode Tahun 2023–2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, tingkat kemiskinan Provinsi Papua Barat Daya menurun dari 18,98% pada Tahun 2023 menjadi 18,13% pada Tahun 2024, dan kembali menurun menjadi 17,95% pada Tahun 2025. Penurunan ini mengindikasikan adanya perbaikan bertahap dalam kondisi kesejahteraan masyarakat.

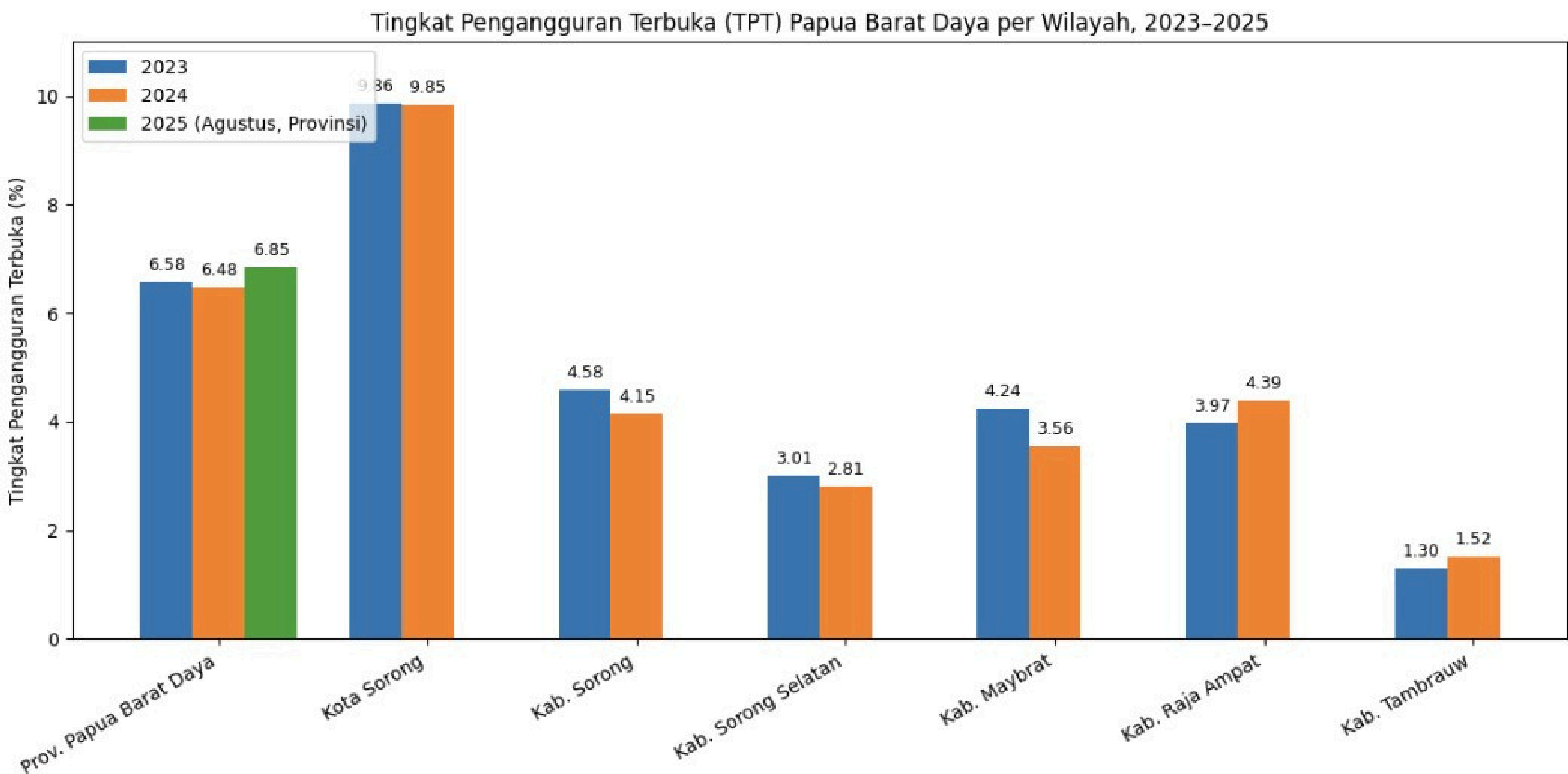
Secara kabupaten/kota, Kota Sorong mencatat tingkat kemiskinan terendah, yaitu menurun dari 14,41% (2023) menjadi 13,55% (2025). Kabupaten Sorong juga menunjukkan tren penurunan dari 26,88% menjadi 25,10%, sementara Kabupaten Sorong Selatan menurun dari 18,11% menjadi 17,66%. Kabupaten Maybrat dan Kabupaten Tambrau masih mencatat tingkat kemiskinan relatif tinggi, masing-masing sebesar 29,00% dan 28,94% pada Tahun 2025, meskipun keduanya menunjukkan tren penurunan dibandingkan tahun sebelumnya. Kabupaten Raja Ampat relatif stabil dengan tingkat kemiskinan 16,57% pada Tahun 2025.

Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbaikan secara agregat, kesenjangan tingkat kemiskinan antarwilayah masih cukup besar, sehingga diperlukan intervensi ekonomi yang lebih terarah dan berbasis wilayah, khususnya pada kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka

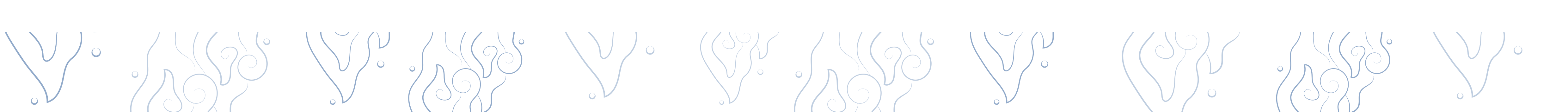
Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Tingkat Pengangguran Terbuka (%) Sumber: Badan Pusat Statistik	Provinsi Papua Barat Daya	6.58	6,48	6.85 (Agustus 2025)
	Kota Sorong	9.86	9.85	Belum Rilis
	Kabupaten Sorong	4.58	4.15	Belum Rilis
	Kabupaten Sorong Selatan	3.010	2.810	Belum Rilis
	Kabupaten Maybrat	4.24	3.56	Belum Rilis
	Kabupaten Raja Ampat	3.97	4.39	Belum Rilis
	Kabupaten Tambrau	1.3	1.52	Belum Rilis



Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan fluktuasi selama periode Tahun 2023-2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, TPT Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebesar 6,58% pada Tahun 2023, menurun menjadi **6,48% pada Tahun 2024**, namun **kembali meningkat menjadi 6,85% pada Tahun 2025 (Agustus)**. Peningkatan ini menunjukkan adanya tantangan dalam penyerapan tenaga kerja di tengah dinamika ekonomi dan pasar kerja.

Pada tingkat kabupaten/kota, **data TPT Tahun 2025 masih belum dirilis**. Namun demikian, pada Tahun 2023-2024, beberapa wilayah menunjukkan perbaikan, seperti **Kabupaten Sorong yang menurun dari 4,58% menjadi 4,15%**, **Kabupaten Sorong Selatan dari 3,01% menjadi 2,81%**, serta **Kabupaten Maybrat dari 4,24% menjadi 3,56%**. Sebaliknya, Kabupaten Raja Ampat dan Kabupaten Tambrau mengalami kenaikan TPT pada Tahun 2024 dibandingkan Tahun 2023.

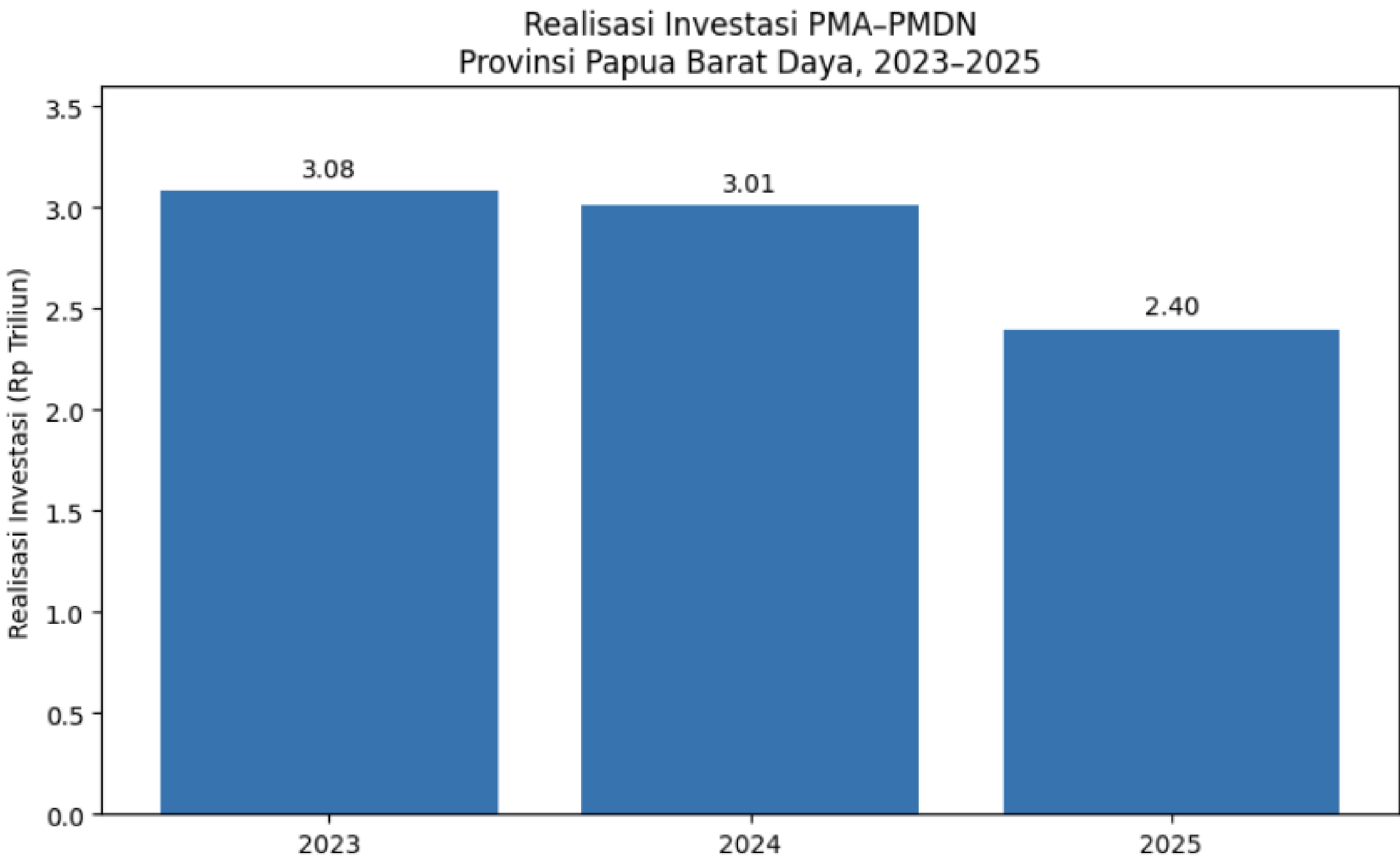
Kondisi ini menunjukkan perlunya penguatan kebijakan penciptaan lapangan kerja, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta pengembangan sektor-sektor produktif yang mampu menyerap tenaga kerja lokal secara berkelanjutan.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

Realisasi Investasi (PMA-PMDN)

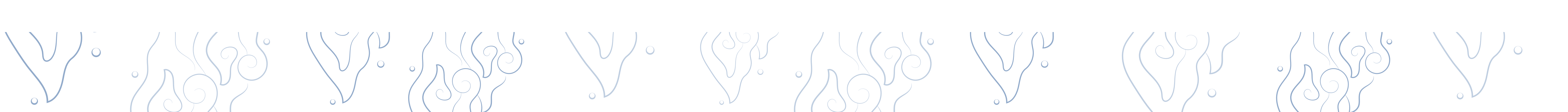
Indikator	Wilayah	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025
Realisasi Investasi PMA-PMDN (Rp Triliun/Miliar) Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, & Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	Provinsi Papua Barat Daya	3.08 Rp.Triliun Kementerian PPN/Bappenas, Buku RAPPP 2025-2029	3.009,5 Rp.Miliar (Januari-Desember 2024) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM	2.4 Rp. Triliun (Januari-September 2025) Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM
	Kota Sorong	-	-	-
	Kabupaten Sorong	-	-	-
	Kabupaten Sorong Selatan	-	-	-
	Kabupaten Maybrat	-	-	-
	Kabupaten Raja Ampat	-	-	-
	Kabupaten Tambrau	-	-	-



Capaian realisasi investasi Penanaman Modal Asing (PMA) dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Provinsi Papua Barat Daya menunjukkan tren penurunan selama periode Tahun 2023–2025. Berdasarkan data Kementerian PPN/Bappenas serta Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, realisasi investasi Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebesar **Rp3,08 triliun pada Tahun 2023**, kemudian menurun menjadi **Rp3,01 triliun pada Tahun 2024**, dan kembali menurun menjadi **Rp2,40 triliun pada Tahun 2025** (periode Januari–September).

Tren penurunan realisasi investasi tersebut tercermin jelas pada grafik realisasi investasi PMA-PMDN Tahun 2023–2025, yang menunjukkan berkurangnya nilai investasi dari tahun ke tahun. Kondisi ini mengindikasikan adanya tantangan dalam menjaga stabilitas dan pertumbuhan iklim investasi di Provinsi Papua Barat Daya, baik yang berkaitan dengan faktor eksternal perekonomian nasional maupun faktor internal daerah.

Data realisasi investasi pada tingkat kabupaten/kota belum tersedia secara terpisah, sehingga analisis investasi masih dilakukan pada tingkat provinsi. Meskipun demikian, capaian investasi tersebut menunjukkan masih adanya ruang dan potensi pengembangan investasi ke depan, khususnya melalui penguatan kepastian usaha, penyederhanaan perizinan, pengembangan sektor unggulan daerah, serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan ekonomi.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

4.4 Capaian Papua Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam)/Damai

Capaian Papua Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Papua Damai) pada Tahun 2025 disajikan dalam bentuk narasi kebijakan, mengingat tidak terdapat indikator kuantitatif utama yang secara spesifik ditetapkan dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP). Evaluasi capaian Papua Damai dilakukan berdasarkan hasil pelaksanaan **sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)** yang berfokus pada **penguatan stabilitas keamanan, penanganan konflik, perlindungan masyarakat sipil, serta penciptaan kondisi yang kondusif** bagi percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.

Penguatan Stabilitas Keamanan Berbasis Dialog

Pada Tahun 2025, pelaksanaan SHEK Papua Damai diarahkan untuk mendorong pergeseran paradigma keamanan dari pendekatan yang bersifat represif menuju pendekatan dialogis, humanis, dan berbasis kesejahteraan masyarakat. Dalam konteks ini, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya mengawal usulan Pemerintah Kabupaten Maybrat terkait pengalihan pembiayaan keamanan dari APBD ke APBN, melakukan fasilitasi evaluasi penempatan Satgas TNI/Polri pada wilayah yang berangsur kondusif, serta mendorong penguatan jaminan keamanan bagi guru, tenaga kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat sebagai prasyarat keberlanjutan layanan dasar dan pembangunan ekonomi.

Penanganan Konflik dan Pemulihan Pascakonflik

Sebagai bagian dari upaya penanganan konflik, Badan Pengarah Papua melaksanakan dialog langsung dengan tokoh adat, tokoh agama, kepala distrik, dan masyarakat terdampak konflik di Kabupaten Maybrat. Melalui proses tersebut, dihimpun berbagai isu strategis, antara lain eksodus warga, trauma sosial, dan terganggunya layanan dasar. Selain itu, Badan Pengarah Papua mengawal usulan pemulangan warga eksodus, program pemulihan sosial pascakonflik, serta melakukan kajian awal terhadap usulan pemekaran Daerah Otonomi Baru (DOB) Aifat Timur sebagai salah satu alternatif solusi jangka panjang dalam peningkatan pelayanan publik dan stabilitas wilayah.

Dukungan terhadap Pembangunan Infrastruktur Strategis

Pelaksanaan SHEK Papua Damai juga mencakup dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis sebagai bagian dari upaya memperkuat konektivitas dan membuka isolasi wilayah. Badan Pengarah Papua memfasilitasi koordinasi lintas sektor dalam pembangunan jalan Susumuk-Bintuni di Kabupaten Maybrat dan Mare-Feef di Kabupaten Tambrau, termasuk pengawalan penyelesaian persoalan hak ulayat, kepastian status lahan (clean and clear), serta koordinasi dukungan keamanan guna memastikan kelancaran pelaksanaan pembangunan infrastruktur.

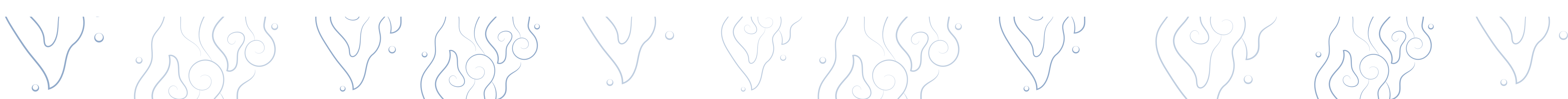
Pengelolaan Isu Sosial-Politik Strategis

Dalam rangka menjaga stabilitas sosial-politik, Badan Pengarah Papua turut mengawal aspirasi masyarakat terkait sengketa Pulau Sain, Piyai, dan Kiyas di Kabupaten Raja Ampat. Selain itu, dilakukan dorongan harmonisasi kebijakan politik agar selaras dengan Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, serta memastikan keberpihakan terhadap Orang Asli Papua (OAP) dalam setiap perumusan dan pelaksanaan kebijakan strategis di daerah.

Penguatan Pendekatan Humanis dan Kepercayaan Publik

Sebagai bagian dari penguatan kepercayaan publik, Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya memfasilitasi forum dialog sosial dan dialog lintas suku, menyalurkan bantuan kemanusiaan bagi kelompok rentan di wilayah terdampak konflik, serta membangun kolaborasi dengan gereja dan tokoh agama dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat kohesi sosial dan menciptakan suasana yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan.

Secara keseluruhan, capaian Papua Damai pada Tahun 2025 menunjukkan peran strategis Badan Pengarah Papua dalam menjaga stabilitas keamanan dan mendukung penanganan konflik melalui **pendekatan dialogis, humanis, dan berbasis kesejahteraan. Penguatan koordinasi lintas sektor, pengelolaan isu sosial-politik, serta dukungan terhadap pembangunan infrastruktur strategis** menjadi fondasi penting dalam menciptakan kondisi yang aman dan kondusif bagi percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat Daya.



Bab IV Capaian Kinerja Tahun 2025

4.5 Capaian Lainnya

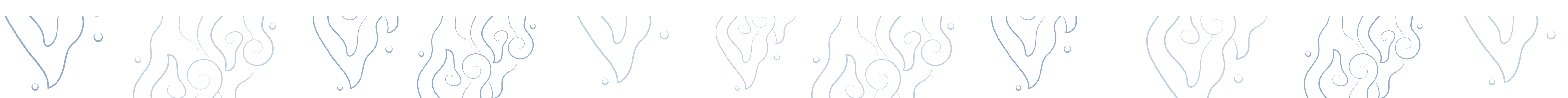
Selain capaian kinerja pada misi Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai, pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya sepanjang Tahun 2025 juga menghasilkan capaian penting pada aspek tata kelola pemerintahan dan penguatan kelembagaan daerah. Capaian ini merupakan dampak dari **pelaksanaan sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)** yang dilakukan secara berkelanjutan dengan pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait.

Pada aspek penguatan pengawasan dan akuntabilitas, **Pemerintah Kabupaten Sorong Selatan menindaklanjuti hasil koordinasi dan pendampingan dengan menjalin Nota Kesepahaman (MoU) dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).** Kerja sama ini menjadi **langkah strategis dalam memperkuat pengendalian intern pemerintah**, meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program, serta meminimalkan risiko tata kelola keuangan daerah.

Dalam bidang perencanaan dan penganggaran, **Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya berhasil memenuhi penyusunan Rencana Anggaran Program (RAP) Tahun 2026 secara tepat waktu**, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan pemerintah pusat. Selain itu, **Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya juga berhasil melaksanakan penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) tepat waktu.** Capaian ini menjadi prestasi penting, mengingat Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya tercatat sebagai pemerintah daerah pertama di Tanah Papua yang mampu menyelesaikan tahapan tersebut secara tepat waktu, sehingga **memberikan kepastian pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan sejak awal tahun anggaran.**

Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelaksanaan program strategis nasional, Badan Pengarah Papua Provinsi Papua Barat Daya menjadi bagian dari Satuan Tugas Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Keterlibatan ini mencerminkan **meningkatnya kesiapan kelembagaan dan koordinasi lintas sektor di tingkat daerah, serta menunjukkan hasil dari pelaksanaan SHEK Badan Pengarah Papua dalam mengintegrasikan kebijakan pusat dengan kesiapan daerah.**

Secara keseluruhan, capaian tata kelola pemerintahan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya tidak hanya berdampak pada sektor-sektor substantif pembangunan, tetapi juga berkontribusi nyata dalam peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengawasan, dan koordinasi kelembagaan daerah. Penguatan tata kelola ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan percepatan pembangunan dan efektivitas pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya.



Bab V Permasalahan & Tantangan

5.1 Permasalahan yang Dihadapi

Pelaksanaan tugas dan fungsi **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** pada **Tahun 2025** menunjukkan berbagai capaian positif, namun masih dihadapkan pada sejumlah permasalahan dan tantangan yang memerlukan perhatian dan tindak lanjut berkelanjutan.

Pertama, kesenjangan capaian pembangunan antarwilayah masih menjadi tantangan utama. Pada sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, perbedaan capaian indikator antara wilayah perkotaan dan kabupaten dengan kondisi geografis terpencil masih cukup signifikan. Keterbatasan aksesibilitas, kondisi wilayah yang sulit dijangkau, serta keterbatasan infrastruktur dasar berdampak pada lambatnya peningkatan kualitas layanan dan capaian indikator pembangunan di wilayah tertentu.

Kedua, keterbatasan dan ketidaksinkronan data masih menjadi kendala dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan. Belum tersedianya data yang mutakhir, terpilah, dan terintegrasi antarlevel pemerintahan menghambat proses evaluasi kinerja secara komprehensif, khususnya dalam pengukuran capaian indikator sektoral dan lintas sektor.

Ketiga, tantangan tata kelola dan kapasitas kelembagaan daerah masih perlu diperkuat. Perbedaan tingkat kesiapan sumber daya manusia aparatur, pemahaman kebijakan Otonomi Khusus, serta kualitas perencanaan dan penganggaran antar daerah berdampak pada efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan.

Keempat, dinamika sosial, politik, dan keamanan di beberapa wilayah masih menjadi tantangan dalam pelaksanaan pembangunan. Penanganan konflik, pemulihan pascakonflik, serta upaya menjaga stabilitas keamanan memerlukan pendekatan yang komprehensif, dialogis, dan berkelanjutan agar tidak menghambat penyediaan layanan dasar dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Kelima, sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah dalam beberapa sektor strategis masih memerlukan penguatan, khususnya dalam implementasi kebijakan nasional di tingkat daerah, agar dapat berjalan efektif sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan wilayah Papua Barat Daya.

5.2 Upaya Tindak Lanjut

Dalam menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan tersebut, **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** telah dan akan terus melakukan sejumlah upaya tindak lanjut strategis.

Pertama, memperkuat fungsi sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan melalui peningkatan koordinasi lintas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, guna memastikan kebijakan dan program pembangunan lebih responsif terhadap kebutuhan wilayah dan berorientasi pada pemerataan capaian pembangunan.

Kedua, mendorong penguatan sistem data dan evaluasi melalui pemanfaatan data sektoral, hasil monitoring dan evaluasi, serta pengembangan mekanisme evaluasi yang lebih terstandar sebagai dasar perumusan kebijakan dan rekomendasi pembangunan.

Ketiga, meningkatkan pendampingan terhadap pemerintah daerah, khususnya dalam penguatan tata kelola perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program, agar pembangunan dapat berjalan lebih efektif, akuntabel, dan berkelanjutan.

Keempat, melanjutkan pendekatan dialogis dan humanis dalam pengelolaan isu sosial-politik dan keamanan, serta mendukung upaya pemulihan wilayah terdampak konflik sebagai prasyarat terciptanya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

Kelima, memastikan keberlanjutan pelaksanaan tugas dan fungsi SHEK sebagai instrumen strategis dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua di Provinsi Papua Barat Daya pada periode berikutnya.



Bab VI Penutup

6.1 Kesimpulan

Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya Tahun 2025 menggambarkan pelaksanaan tugas dan fungsi *sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi (SHEK)* yang telah memberikan kontribusi nyata dalam mendukung percepatan pembangunan dan pelaksanaan *Otonomi Khusus Papua*.

Capaian pada misi **Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Damai** menunjukkan adanya kemajuan bertahap, baik pada ***peningkatan indikator pembangunan maupun penguatan tata kelola dan kelembagaan daerah***. Selain itu, capaian pada aspek tata kelola pemerintahan menjadi fondasi penting dalam mendukung efektivitas pelaksanaan pembangunan *Otonomi Khusus* Papua di Provinsi Papua Barat Daya.

Meskipun demikian, laporan ini juga menunjukkan bahwa percepatan pembangunan Papua masih memerlukan penguatan intervensi kebijakan yang terintegrasi, berkeadilan, dan berkelanjutan guna mengatasi kesenjangan wilayah, meningkatkan kualitas layanan dasar, serta memastikan stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil pelaksanaan dan evaluasi kinerja **Tahun 2025**, **Badan Pengarah Papua Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya** merekomendasikan beberapa langkah strategis sebagai berikut:

1. **Memperkuat sinergi kebijakan pusat dan daerah** dalam pelaksanaan *RIPPP* dan *RAPPP* agar program dan kegiatan pembangunan lebih terintegrasi dan berdampak langsung pada masyarakat.
2. **Mendorong penguatan tata kelola dan kapasitas kelembagaan daerah**, khususnya dalam perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan *Otonomi Khusus* Papua.
3. **Mengembangkan sistem data dan evaluasi** yang terintegrasi dan berkelanjutan sebagai dasar pengambilan keputusan dan perumusan kebijakan pembangunan.
4. **Memperluas pendekatan afirmatif dan berbasis wilayah** untuk mengurangi kesenjangan capaian pembangunan antar kabupaten/kota.
5. **Melanjutkan pendekatan dialogis dan humanis** dalam pengelolaan isu sosial, politik, dan keamanan sebagai prasyarat terciptanya stabilitas dan keberlanjutan pembangunan.
6. **Menjadikan hasil capaian dan evaluasi Tahun 2025** sebagai dasar penyusunan Program Kerja Badan Pengarah Papua Tahun 2026, agar selaras dengan arah kebijakan *RIPPP* dan *RAPPP* serta kebutuhan riil masyarakat Provinsi Papua Barat Daya.





Laporan Capaian Kinerja Badan Pengarah Papua (BPP) Perwakilan Provinsi Papua Barat Daya

Tahun 2025

